



TUGAS AKHIR - SS0141501

**PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI UANG DAN
LAYANAN KAS UNTUK MENENTUKAN LOKASI BARU
KANTOR PERWAKILAN DALAM NEGERI (KPwDN)
BANK INDONESIA DI PULAU SULAWESI
MENGUNAKAN ANALISIS FAKTOR**

FAKHRUL AZIZI INDILLAH
NRP 1311 100 064

Dosen Pembimbing
Santi Puteri Rahayu, M.Si, Ph.D

Co.Dosen Pembimbing
Dr. Suhartono, S.Si, M.Sc

PROGRAM STUDI S-1 STATISTIKA
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2015



FINAL PROJECT - SS0141501

**DEVELOPMENT OF MONEY DISTRIBUTION NETWORK
& CASH SERVICES TO DETERMINING NEW LOCATION
OF THE REGIONAL OFFICE (KPWDN) OF BANK
INDONESIA ON SULAWESI ISLAND USING FACTOR
ANALYSIS**

FAKHRUL AZIZI INDILLAH
NRP 1311 100 064

Supervisor
Santi Puteri Rahayu, M.Si, Ph.D

Co. Supervisor
Dr. Suhartono, S.Si, M.Sc

Undergraduate Programme of Statistics
Faculty of Mathematics and Natural Science
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2015

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI UANG DAN LAYANAN KAS UNTUK MENENTUKAN LOKASI BARU KANTOR PERWAKILAN DALAM NEGERI (KPwDN) BANK INDONESIA DI PULAU SULAWESI DENGAN MENGUNAKAN ANALISIS FAKTOR

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada

Program Studi S-1 Jurusan Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

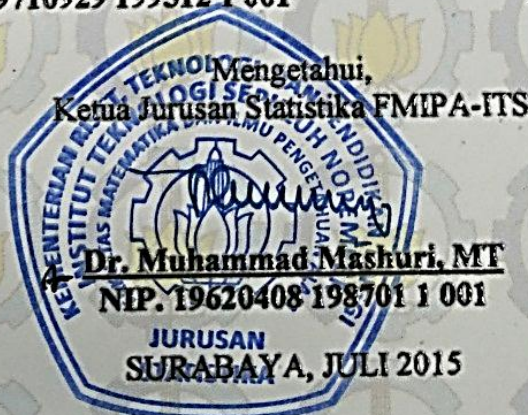
Oleh :

FAKHRUL AZIZI INDILLAH
NRP. 1311 100 064

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

1. Santi Puteri Rahayu, M.Si, Ph.D
NIP. 19750115 199903 2 003
2. Dr. Suhartono, S.Si, M.Sc
NIP. 19710929 199512 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Statistika FMIPA-ITS



JURUSAN
SURABAYA, JULI 2015

**PENGEMBANGAN JARINGAN DITRIBUSI UANG &
LAYANAN KAS UNTUK MENENTUKAN LOKASI BARU
KANTOR PERWAKILAN DALAM NEGERI (KPWDN)
BANK INDONESIA DI PULAU SULAWESI
MENGUNAKAN ANALISIS FAKTOR**

Nama : Fakhrul Azizi Indillah
NRP : 1311100064
Jurusan : Statistika FMIPA-ITS
Pembimbing : Santi Puteri Rahayu, M.Si, Ph.D
Co. Pembimbing : Dr. Suhartono, S.Si, M.Sc

Abstrak

Bank Indonesia memiliki tugas penting dalam pengelolaan uang rupiah, khususnya pendistribusiannya ke seluruh daerah, menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengedaran uang rupiah adalah ketersediaan moda dan jalur transportasi reguler yang terbatas, serta kondisi geografis maupun alam Indonesia, termasuk di dalamnya kondisi iklim dan cuaca yang sering mengalami perubahan. Dalam kasus ini akan dilakukan analisis menggunakan analisis faktor yang selanjutnya akan dibuat skor faktor untuk membuat pengelompokan daerah mana yang perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia baru. Pada Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. Pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. Pada Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. Pada Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. Pada provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. Pada provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia.

Kata kunci— Skor Faktor, Analisis Faktor, KPwDN

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

**DEVELOPMENT OF MONEY DISTRIBUTION
NETWORK & CASH SERVICES TO DETERMINING
NEW LOCATION OF THE REGIONAL OFFICE
(KPWDN) OF BANK INDONESIA ON SULAWESI ISLAND
USING FACTOR ANALYSIS**

Name : Fakhrol Azizi Indillah
NRP : 1311100064
Department : Statistika FMIPA-ITS
Supervisor : Santi Puteri Rahayu, M.Si, Ph.D
Co. Supervisor : Dr. Suhartono, S.Si, M.Sc

Abstract

Bank Indonesia has an important task in the management of the rupiah, particularly distribution across regions, challenges that Bank Indonesia got are not easy. One of the biggest challenges in the distribution of the rupiah is available modes and limited regular transport lines, as well as the geographical and natural conditions of Indonesia, including climate and weather conditions often change. In this case analysis will be done using factor analysis which would then be made to make the grouping factor scores which areas need to be build KPwDN new Bank Indonesia. The results of the analysis are province of Gorontalo, Pohuwato need to be build KPwDN Bank Indonesia. In the province of South Sulawesi, Makassar needs to be build KPwDN Bank Indonesia. In the province of North Sulawesi, Minahasa need to be build KPwDN Bank Indonesia. In the province of Central Sulawesi, Banggai need to be build KPwDN Bank Indonesia. In the province of Southeast Sulawesi, Kolaka need to be build KPwDN Bank Indonesia. In the province of West Sulawesi, Mamuju need to be build KPwDN Bank Indonesia.

Keywords—Score Factors, Factor Analysis, KPwDN

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul *Pengembangan Jaringan Distribusi Uang & Layanan Kas Untuk Menentukan Lokasi Baru Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) bank Indonesia di Pulau Sulawesi Menggunakan Analisis Faktor*.

Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan pada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Santi Puteri Rahayu, M.Si, Ph.D serta Bapak Dr. Suhartono, S.Si, M.Sc, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi masukan dan membimbing penulis.
2. Bapak Dr.Ir. Setiawan, M.S dan Imam Syafawi Ahmad, S.Si, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan pelajaran kepada penulis.
3. Dr. Muhammad Mashuri, MT. Selaku Ketua Jurusan Statistika ITS dan Ibu Dra. Lucia Aridinanti, MT selaku Kaprodi S1 Jurusan Statistika ITS yang telah memberikan fasilitas untuk kelancaran penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Ayah, Ibu, dan adik tercinta yang selalu memberikan semangat sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan.
5. Teman seperjuangan Tugas Akhir Laboraturium Ekonomi Bisnis yang selalu memberi semangat dan memberikan motivasi kepada penulis.
6. Seluruh keluarga besar Jurusan Statistika FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, khususnya teman-teman Statistika angkatan 2011 atas kebersamaan dan kehangatannya.
7. Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri yang telah membantu penulis dalam hal pengadaan data penelitian.

8. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mengharapkan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima apabila ada saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Surabaya, Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Batasan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Karakteristik Pulau Sulawesi	5
2.2 Statistika Deskriptif	6
2.3 Uji Kelayakan	6
2.4 Analisis Faktor	7
2.5 <i>Exploratory Factor Analysis</i>	9
2.6 <i>Principal Component Method</i>	9
2.7 <i>Factor Scores</i>	10
2.5 Fungsi Bank Sentral	12
2.6 Pengertian Bank Indonesia	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Sumber Data dan Variabel Penelitian	15

3.2 Langkah Penelitian	17
3.3 Diagram Alir.....	18
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Statistika Deskriptif	19
4.1.1 Provinsi Gorontalo.....	19
4.1.2 Provinsi Sulawesi Utara	22
4.1.3 Provinsi Sulawesi Selatan.....	26
4.1.4 Provinsi Sulawesi Tengah	30
4.1.5 Provinsi Sulawesi Tenggara	33
4.1.6 Provinsi Sulawesi Barat.....	37
4.2 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia	40
4.3 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia	47
4.4 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia	51
4.4 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia	58
4.5 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Indikator Pembangunan Ekonomi.....	64
4.6 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel Penelitian	15
Tabel 4.1 Sektor Pendidikan Provinsi Gorontalo	22
Tabel 4.2 Sektor pendidikan Provinsi Sulawesi Utara	25
Tabel 4.3 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	29
Tabel 4.4 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	33
Tabel 4.5 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara	36
Tabel 4.6 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat	40
Tabel 4.7 <i>Total Variance Explained</i> Provinsi Gorontalo	41
Tabel 4.8 <i>Loading Factor</i> Provinsi Gorontalo	42
Tabel 4.9 <i>Total Variance Explained</i> Provinsi Gorontalo tanpa KPwDN	44
Tabel 4.10 <i>Loading Factor</i> Provinsi Gorontalo tanpa KPwDN ..	45
Tabel 4.11 <i>KMO dan Bartlett's Test</i>	47
Tabel 4.12 <i>Total Variance Explained</i> Provinsi Sulawesi Selatan	48
Tabel 4.13 <i>Loading Factor</i> Provinsi Sulawesi Selatan	49
Tabel 4.14 <i>Total Variance Explained</i> Provinsi Sulawesi Utara ..	52
Tabel 4.15 <i>Loading Factor</i> Provinsi Sulawesi Utara	53
Tabel 4.16 <i>Total Variance Explained</i> Provinsi Sulawesi Utara tanpa KPwDN	55
Tabel 4.17 <i>Loading Factor</i> Provinsi Sulawesi Utara tanpa KPwDN	56
Tabel 4.18 <i>Total Variance Explained</i> Provinsi Sulawesi Tengah	59
Tabel 4.19 <i>Loading Factor</i> Provinsi Sulawesi Tengah	59
Tabel 4.20 <i>Total Variance Explained</i> Provinsi Sulawesi Tengah tanpa KPwDN	61
Tabel 4.21 <i>Loading Factor</i> Provinsi Sulawesi Tengah tanpa KPwDN	62

Tabel 4.22 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Tenggara 65

Tabel 4.23 Nilai *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Tenggara ... 66

Tabel 4.24 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Tenggara
tanpa KPwDN..... 68

Tabel 4.25 *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa
KPwDN 68

Tabel 4.26 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Barat .. 71

Tabel 4.27 *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Barat 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Pulau Sulawesi	5
Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Secara Keseluruhan.....	18
Gambar 4.1 Grafik PDRB 9 sektor Provinsi Gorontalo	20
Gambar 4.2 Grafik jumlah APBD Provinsi Gorontalo.....	21
Gambar 4.3 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Utara	23
Gambar 4.4 Grafik jumlah APBD Provinsi Sulawesi Utara.....	24
Gambar 4.5 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Selatan...	27
Gambar 4.6 Grafik jumlah APBD Provinsi Sulawesi Selatan.....	28
Gambar 4.7 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Tengah ..	31
Gambar 4.8 Grafik Jumlah APBD Provinsi Sulawesi Tengah	32
Gambar 4.9 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Tenggara	34
Gambar 4.10 Grafik Jumlah APBD Provinsi Sulawesi Tenggara	35
Gambar 4.11 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Barat....	38
Gambar 4.12 Grafik jumlah APBD Provinsi Sulawesi Barat.....	39
Gambar 4.13 <i>Scree Plot</i> Provinsi Gorontalo	41
Gambar 4.14 Faktor Skor pada Provinsi Gorontalo	43
Gambar 4.15 Faktor Skor Provinsi pada Provinsi Gorontalo tanpa KPwDN	46
Gambar 4.16 Peta Provinsi Gorontalo.....	47
Gambar 4.17 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Selatan	50
Gambar 4.18 Peta Provinsi Sulawesi Selatan.....	51
Gambar 4.19 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Utara	54
Gambar 4.20 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Utara tanpa KPwDN	57
Gambar 4.21 Peta Provinsi Sulawesi Utara.....	57
Gambar 4. 22 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tengah	60

Gambar 4. 23 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tengah tanpa KPwDN	63
Gambar 4.24 Peta Provinsi Sulawesi Tengah.....	64
Gambar 4. 25 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tenggara	67
Gambar 4. 26 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa KPwDN	69
Gambar 4.27 Peta Provinsi Sulawesi Tenggara.....	70
Gambar 4.28 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Barat	73
Gambar 4.29 Peta Provinsi Sulawesi Barat	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perannya dengan keuangan pemerintah, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan kewajiban untuk menyelenggarakan penyimpanan kas umum negara. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2009 tentang BI, maka salah satu tugas BI adalah mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran. Selanjutnya menurut UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, BI dalam menjalankan fungsi tersebut khususnya fungsi di bidang system pembayaran tunai harus berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran di seluruh Indonesia, khususnya pembayaran tunai, BI memberikan layanan kas baik kepada perbankan yaitu berupa setoran dan penarikan maupun kepada masyarakat yaitu untuk penukaran uang lusuh/rusak dan/atau penukaran uang pecahan kecil. Dalam pengerjaan tugas-tugasnya, Bank Indonesia dibantu oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI), 43 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) BI yang memiliki fungsi operasional kas, dan dengan 31 kas titipan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (kecuali Pulau Jawa).

Dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia terutama dalam pengelolaan uang rupiah, khususnya pengedarannya ke seluruh daerah, menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengedaran uang rupiah adalah ketersediaan moda dan jalur transportasi reguler yang terbatas, serta kondisi geografis maupun alam Indonesia, termasuk di dalamnya kondisi iklim dan cuaca yang sering mengalami perubahan.

Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi yang pesat terdapat masalah yang tidak kalah penting yaitu menyediakan layanan kas pada suatu daerah. Pada daerah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau terluar yang jauh dari jangkauan layanan kas Bank Indonesia, kualitas uang rupiah sangat rendah atau memiliki

tingkat kelusuan tinggi sehingga uang rupiah tersebut tidak layak edar. Di sisi lain, kinerja perekonomian nasional menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi, oleh karena itu dibutuhkan sistem pembayaran yang handal terutama dalam hal sistem pembayaran tunai. Peran strategis sistem pembayaran tunai dalam perekonomian sangatlah dibutuhkan untuk merespon adanya peningkatan kebutuhan uang di masyarakat. Kecenderungan peningkatan permintaan uang dari masyarakat harus diimbangi tidak hanya dari sisi pemenuhan jumlah nominal, namun juga dari sisi kecukupan pecahan melalui jalur distribusi yang handal serta dalam keadaan kondisi yang layak sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengenali ciri-ciri keaslian rupiah untuk menghindari peredaran uang palsu (BI, 2015).

Secara administratif, Pulau Sulawesi terbagi menjadi 6 provinsi yaitu Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Barat (Sulbar) dan Gorontalo. Di setiap provinsi tersebut hanya terdapat satu kantor wilayah. Kantor wilayah Sulsel terletak di Makassar, kantor wilayah Sulut terletak di Manado, kantor wilayah Sulteng terletak di Palu, Sulawesi Tenggara terletak di Kendari dan kantor wilayah Gorontalo terletak Gorontalo (BI, 2015).

Peredaran uang di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara terbilang cukup tinggi dengan total *cash inflow* dan *outflow* sebesar 16.731,09 miliar rupiah. *Cash inflow* dan *cash outflow* dari Provinsi Gorontalo masing-masing sebesar 420,93 dan 97,5 miliar rupiah, *cash inflow* dan *cash outflow* di Provinsi Sulawesi Tengah masing-masing sebesar 440,84 dan 1.884,82 miliar rupiah, *cash inflow* dan *cash outflow* dari Provinsi Sulawesi Utara masing-masing sebesar 1.050 dan 2.610 miliar rupiah, *cash inflow* dan *cash outflow* dari Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 5.080 dan 3.870 miliar rupiah, *cash inflow* dan *cash outflow* dari Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 253 dan 1.024 miliar rupiah. Namun kantor wilayah yang

disediakan pada setiap provinsi hanya satu. Untuk itu perlu dilakukan kajian mengenai perlunya pembangunan KPwDN BI baru di provinsi-provinsi tersebut untuk membantu analisis jaringan distribusi dan layanan kas Bank Indonesia di Pulau Sulawesi. Hal itu diperkuat pula dengan besarnya beredar uang tidak layak edar di Pulau Sulawesi, salah satu contohnya pada Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar pada triwulan IV 2014 tercatat sebesar Rp 0,40 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp 0,27 triliun (BI, 2015).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas akan dilakukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kab/kota yang perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia baru untuk dapat mengembangkan jalur distribusi uang dan layanan kas secara lebih optimal di wilayah Pulau Sulawesi. Analisis Faktor merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mereduksi dimensi sehingga didapatkan faktor-faktor baru yang kemudian akan dibuat skor faktor yang kemudian akan ditentukan kab/kota yang perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia baru berdasarkan dari skor faktor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Bank Indonesia memiliki kendala dalam pendistribusian uang ke kabupaten/kota yang belum memiliki KPwDN Bank Indonesia. Untuk itu akan dilakukan analisis menggunakan analisis faktor yang selanjutnya akan dibuat faktor skor dimana akan menunjukkan hasil kabupaten/kota yang memiliki perekonomian yang tinggi pada provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Selanjutnya hasil tersebut akan dijadikan bahan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk membangun KPwDN di kabupaten/kota yang memiliki perekonomian yang tinggi merujuk hasil dari faktor skor. Berdasarkan dengan masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar penentuan lokasi baru KPwDN BI baru di Pulau Sulawesi?
2. Bagaimana bentuk skor faktor dari kabupaten/kota di Pulau Sulawesi sebagai dasar penentuan lokasi baru KPwDN BI di Pulau Sulawesi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui deskripsi statistika deskriptif dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi.
2. Menentukan kabupaten/kota yang perlu dibangun KPwDN BI baru di Pulau Sulawesi berdasarkan skor faktor yang terbentuk.

1.4 Manfaat

Hasil dari Tugas Akhir ini adalah berupa rekomendasi kepada Bank Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Gubernur dan Departemen Pengelolaan Uang (DPU) dalam mengembangkan jalur distribusi uang dan layanan kas secara lebih optimal di wilayah Pulau Sulawesi dalam upaya pencapaian misi Bank Indonesia yaitu memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup.

1.5 Batasan Masalah

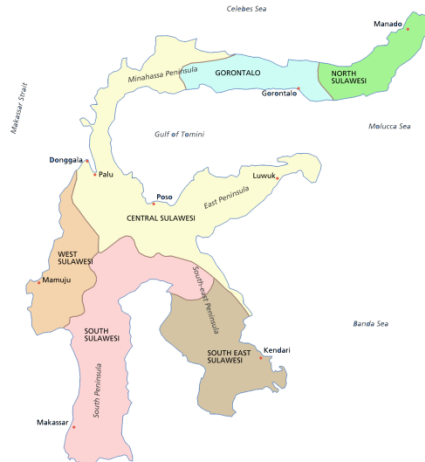
Batasan masalah Tugas Akhir ini adalah faktor yang digunakan sebanyak dua karena dua faktor sudah memenuhi, kemudian dalam penelitian ini diasumsikan telah memenuhi asumsi distribusi normal. Analisis yang dilakukan hanya pada wilayah Pulau Sulawesi yang meliputi 6 provinsi dan variabel yang digunakan meliputi aspek Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), APBD, UMR, jumlah industri, jumlah penduduk, luas wilayah, panjang jalan, jumlah ATM di kabupaten/kota di 6 provinsi di Pulau Sulawesi pada tahun 2013.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Pulau Sulawesi

Pulau Sulawesi berbentuk seperti huruf ‘k’ kecil. Pulau Sulawesi memiliki luas 174.600 kilometer persegi. Sulawesi merupakan pulau terbesar di dunia ke-11 setelah Pulau Ellesmere di Kanada sedangkan di Indonesia, luas Pulau Sulawesi menduduki peringkat ke-4 setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Hal ini terkenal digambarkan sebagai sebuah pulau besar dengan interior menarik, dengan dikelilingi oleh pulau-pulau besar lainnya seperti Borneo atau Kalimantan di sebelah barat, Filipina di utara, pulau-pulau Maluku di sebelah Timur, dan Flores dan Timor ke selatan. Sebuah harta-karun keanekaragaman hayati dengan sejumlah mengejutkan dari spesies endemik (spesies yang tidak lagi ditemukan di dunia), Sulawesi belakangan ini menjadi target konservasionis (Anonim, 2015).



Gambar 2.1 Peta Pulau Sulawesi

Dari segi perekonomian, Sulawesi sebagian besar tergantung pada perkebunan dan hasil budi daya laut. Pada tahun 2004

pertanian terdiri dari 34 persen untuk per ekonomi Sulawesi. Perkebunan merupakan hal yang penting dalam perekonomian di Pulau Sulawesi yang meliputi kelapa, pala, kedelai, kopi, dan beras. Pulau Sulawesi merupakan salah satu produsen terbesar di dunia kakao. Selain itu juga menghasilkan banyak cengkeh untuk rokok kretek. Industri ekonomi lainnya termasuk kayu komersial seperti jati dan rotan dan pariwisata, yang dipandang sebagai hal yang semakin penting bagi pemerintah. Pada tahun 2004, 16,7% penduduk Sulawesi dianggap hidup dalam kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan. Namun pemerintah kurang memerhatikan hal ini, bahkan dalam beberapa laporan menyebutkan bahwa ada beberapa wilayah yang justru orang menengah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah (Anonim, 2015).

2.2 Statistika Deskriptif

Dalam penelitian ini digunakan ukuran pemusatan data yang terdiri dari rata-rata, simpangan baku, nilai maksimum dan minimum. Berikut adalah statistika deskriptif dari rata-rata (Walpole, 1992).

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (2.1)$$

Keterangan:

x_i = nilai dari masing-masing data

n = jumlah data

\bar{x} = nilai rata-rata dari data

2.3 Uji Kelayakan

Dalam uji kelayakan terdapat dua metode yang digunakan yaitu *Kaiser Mayer Olkin (KMO)* dan uji Bartlett. Rencher menyatakan bahwa *KMO* bertujuan untuk melakukan pengecekan dari sebuah data atau melakukan validasi pada data sebelum dilakukan analisis faktor

Statistik Uji:

$$KMO = \frac{\sum_{i \neq j} r^2_{ij}}{\sum_{i \neq j} r^2_{ij} + \sum_{i \neq j} q^2_{ij}} \quad (2.2)$$

dengan

r_{ij}^2 = matriks korelasi dari elemen R

q_{ij}^2 = matriks korelasi parsial dari elemen Q .

Nilai $Q = DR^{-1}D$, dengan $D = [(diag R^{-1})^{1/2}]$. R^{-1} merupakan matriks diagonal. Apabila nilai KMO lebih besar dari 0,8 maka keputusan gagal tolak H_0 jadi kesimpulannya data layak untuk dilakukan analisis faktor

Uji Bartlett digunakan untuk mengetahui apakah terdapat atau tidak hubungan antar variabel dalam kasus multivariat. Apabila variabel x_1, x_2, \dots, x_p bersifat saling bebas (independen), maka matriks korelasi antar variabel sama dengan matriks identitas. Berdasarkan hal tersebut untuk menguji kebebasan antar variabel hipotesis pengujian yang digunakan dalam Uji Bartlett adalah sebagai berikut:

$H_0 : \rho = I$ yaitu tidak terdapat hubungan antar variabel

$H_1 : \rho \neq I$ yaitu terdapat hubungan antar variabel

Nilai statistik pada Uji Bartlett dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut,

$$\chi^2 = -\left(n - 1 - \frac{2p+5}{6}\right) \ln|R| \quad (2.3)$$

Keterangan:

$|R|$: nilai determinan dari matriks korelasi

n : banyaknya observasi

p : banyaknya variabel

Keputusan tolak H_0 apabila $\chi^2 > \chi^2_{(1/2p)(p-1); \alpha}$ atau apabila $p\text{-value} < \alpha$, yang artinya terdapat hubungan antar variabel (Morrison, 1976).

2.4 Analisis Faktor

Tujuan dari analisis faktor adalah untuk menggambarkan hubungan-hubungan kovarian antara beberapa variabel yang

mendasari tetapi tidak teramati yang disebut faktor (Johnson & Wichern, 2007). Vektor random teramati X dengan p komponen, memiliki rata-rata (μ) dan matrik kovarian (Σ). Model analisis faktor adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} X_1 - \mu_1 &= \ell_{11}F_1 + \ell_{12}F_2 + \dots + \ell_{1m}F_m + \varepsilon_1 \\ X_2 - \mu_2 &= \ell_{21}F_1 + \ell_{22}F_2 + \dots + \ell_{2m}F_m + \varepsilon_2 \\ &\vdots \\ X_p - \mu_p &= \ell_{p1}F_1 + \ell_{p2}F_2 + \dots + \ell_{pm}F_m + \varepsilon_p \end{aligned} \quad (2.4)$$

atau dapat ditulis dalam notasi matrik sebagai berikut :

$$\underset{(px1)}{\mathbf{X}} - \underset{(px1)}{\boldsymbol{\mu}} = \underset{(pxm)}{\mathbf{L}} \times \underset{(mx1)}{\mathbf{F}} + \underset{(px1)}{\boldsymbol{\varepsilon}} \quad (2.5)$$

dengan,

μ_i = rata-rata variabel ke- i

ε_i = faktor spesifik ke- i

F_j = *common factor* ke- j

ℓ_{ij} = *loading factor* dari variabel ke- i pada faktor ke- j

$i = 1, 2, \dots, n$ adalah banyaknya observasi

$k = 1, 2, \dots, m$ adalah banyaknya *common factor*

$h = 1, 2, \dots, p$ adalah banyaknya variabel

Selanjutnya, berdasarkan Johnson & Winchern (2007) struktur kovarians untuk model faktor orthoghonal dapat dilihat seperti pada persamaan (2.6).

$$\text{Cov}(\mathbf{X}) = \mathbf{L}\mathbf{L}' + \boldsymbol{\Psi}$$

atau,

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_i) &= \ell_{i1}^2 + \dots + \ell_{im}^2 + \psi_i \\ \text{Cov}(X_i, X_k) &= \ell_{i1}\ell_{k1} + \dots + \ell_{im}\ell_{km} \end{aligned} \quad (2.6)$$

Besarnya variansi yang dapat dijelaskan oleh m faktor yang terbentuk untuk variabel ke- i disebut komunalitas. Besarnya $\text{Var}(X_i) = \sigma_{ii}$ lebih dikenal sebagai *specific variance* dan dapat dihitung dengan rumus seperti persamaan (2.7).

$$\sigma_{ii} = \ell_{i1}^2 + \ell_{i2}^2 + \dots + \ell_{im}^2 + \psi_i \quad (2.7)$$

Selanjutnya, komunalitas dinotasikan sebagai h_i^2 yang dapat dihitung dengan persamaan (2.8) sebagai berikut.

$$h_i^2 = \ell_{i1}^2 + \ell_{i2}^2 + \dots + \ell_{im}^2 \quad (2.8)$$

2.5 Exploratory Factor Analysis

Faktor analisis dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *exploratory* dan *confirmatory*. Namun banyak peneliti mempertimbangkan hanya pada *exploratory* karena sangat berguna dalam menemukan struktur diantara variabel-variabel atau sebagai metode reduksi data. Pada banyak penerapannya dalam faktor analisis, penggunaan *exploratory* lebih cocok digunakan karena pada dasarnya tujuan dari *exploratory factor analysis* adalah untuk membuat konsep baru dari hasil penelitian, “take what the data give you” (Hair, 2010).

2.6 Principal Component Method

Johnson dan Wichern (2007) menyatakan salah satu metode estimasi yang banyak digunakan untuk mengestimasi *factor loadings* (ℓ_{ij}) dan *specific variance* (ψ_i) adalah metode *principal component*. Jika diberikan sampel random x_1, x_2, \dots, x_n diperoleh sebuah matriks sampel kovarians S , kemudian akan dilakukan estimasi terhadap *loading factor*, maka bentuk persamaan varians menjadi seperti pada persamaan (2.9).

$$S = \hat{L}\hat{L}' + \Psi \quad (2.9)$$

Dalam metode estimasi dengan menggunakan *principal component*, *specific variances* (ψ_i) = 0. Matrik kovarians (S) memiliki *eigenvalue-eigenvector* yang berpasangan (λ_i, \mathbf{e}_i) dengan $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$, maka untuk mengestimasi *loading factors* dapat menggunakan persamaan (2.10).

$$\tilde{L} = \left[\sqrt{\hat{\lambda}_1} \hat{\mathbf{e}}_1 : \sqrt{\hat{\lambda}_2} \hat{\mathbf{e}}_2 : \dots : \sqrt{\hat{\lambda}_m} \hat{\mathbf{e}}_m \right] \quad (2.10)$$

Besarnya nilai komunalitas dapat diestimasi dengan persamaan (2.11).

$$\tilde{h}_i^2 = \tilde{\ell}_{i1}^2 + \tilde{\ell}_{i2}^2 + \dots + \tilde{\ell}_{im}^2 \quad (2.11)$$

Penggunaan metode estimasi *principal component* untuk matriks korelasi \mathbf{R} dapat dilakukan dengan cara menggantikan matrik \mathbf{S} dengan matrik \mathbf{R} , namun data yang digunakan perlu distandarisasi terlebih dahulu (Johnson & Wichern, 2007). Penentuan *eigen value* dapat diperoleh dari matriks kovarian atau matriks korelasi. Perbedaan satuan pada variabel yang ada umumnya menjadi dasar pemilihan matriks korelasi untuk perhitungan *eigen value*. Berdasarkan Hair (2010) penentuan banyaknya komponen utama untuk lebih mengefektifkan dalam analisis komponen utama dengan memperhatikan beberapa hal:

1. Faktor dengan *eigen value* lebih besar dari 1
2. Pemilihan jumlah faktor berdasarkan tujuan dari penelitian dan/atau kepentingan penelitian
3. Jumlah faktor cukup dalam persentase dari variansi yang dapat dijelaskan berkisar 60% atau lebih tinggi
4. Memilih jumlah faktor berdasarkan *scree plot*.

Secara keseluruhan, besarnya total proporsi dari sampel varians untuk setiap j faktor dapat diketahui dengan persamaan (2.12).

$$\left(\begin{array}{l} \text{Besarnya} \\ \text{proporsi} \\ \text{sampel varians} \\ \text{tiap faktor ke-}j \end{array} \right) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\hat{\lambda}_j}{s_{11} + \dots + s_{pp}} & \text{analisis faktor untuk matrik } \mathbf{S} \\ \frac{\hat{\lambda}_j}{p} & \text{analisis faktor untuk matrik } \mathbf{R} \end{array} \right. \quad (2.12)$$

2.7 Factor Scores

Rencher (2002) menjelaskan bahwa nilai faktor di setiap pengamatan yang terdiri dari $\hat{\mathbf{f}}_i = (\hat{f}_{i1}, \hat{f}_{i2}, \dots, \hat{f}_{im})'$, $i = 1, 2, \dots, n$ dinamakan skor faktor. Ada dua manfaat utama dari penggunaan skor faktor, yaitu perilaku dari pengamatan yang menarik untuk diamati dan faktor skor dapat digunakan sebagai input untuk analisis lainnya seperti MANOVA. Rencher (2002) juga menyatakan bahwa pendekatan yang pada umumnya sering digunakan untuk mengestimasi skor faktor adalah metode regresi.

Semenjak diketahui bahwa $E(f_i) = 0$, maka hubungan antara f dengan x dapat dimodelkan ke dalam suatu model regresi seperti pada persamaan 2.13 sebagai berikut,

$$\begin{aligned} f_1 &= \beta_{11}(X_1 - \bar{X}_1) + \beta_{12}(X_2 - \bar{X}_2) + \dots + \beta_{1p}(X_p - \bar{X}_p) + \epsilon_1 \\ f_2 &= \beta_{21}(X_1 - \bar{X}_1) + \beta_{22}(X_2 - \bar{X}_2) + \dots + \beta_{2p}(X_p - \bar{X}_p) + \epsilon_2 \\ &\vdots \\ f_m &= \beta_{m1}(X_1 - \bar{X}_1) + \beta_{m2}(X_2 - \bar{X}_2) + \dots + \beta_{mp}(X_p - \bar{X}_p) + \epsilon_m \end{aligned} \quad (2.13)$$

atau dapat juga ditulis ke dalam bentuk matrik sebagai berikut,

$$\mathbf{f} = \mathbf{B}_1'(\mathbf{X} - \bar{\mathbf{X}}) + \epsilon \quad (2.14)$$

Jika persamaan (2.14) berlaku untuk semua pengamatan, maka modelnya menjadi,

$$\mathbf{f}_i = \mathbf{B}_1'(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}}) + \epsilon_i, \quad i=1,2,\dots,n. \quad (2.15)$$

Apabila persamaan (2.15) ditranspos, maka modelnya menjadi,

$$\mathbf{f}_i' = (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})' \mathbf{B}_1 + \epsilon_i', \quad i=1,2,\dots,n. \quad (2.16)$$

dimana \mathbf{B}_1 dapat diestimasi dengan persamaan (2.17),

$$\hat{\mathbf{B}}_1 = (\mathbf{X}_c' \mathbf{X}_c)^{-1} \mathbf{X}_c' \mathbf{F} = \mathbf{S}_{xx}^{-1} \mathbf{S}_{xf} \quad (2.17)$$

dengan \mathbf{S}_{xx} direpresentasikan oleh \mathbf{S} dan \mathbf{S}_{xf} oleh $\hat{\mathbf{L}}$, dimana $\hat{\mathbf{L}}$ mengestimasi $\text{cov}(\mathbf{y}, \mathbf{f}) = \mathbf{L}$. Sehingga persamaan 2.24 dapat ditulis dalam bentuk persamaan (2.18) sebagai berikut,

$$\hat{\mathbf{B}}_1 = \mathbf{S}^{-1} \hat{\mathbf{L}} \quad (2.18)$$

selanjutnya dari model persamaan (2.18), nilai estimasi \mathbf{f}_i dapat dicari dengan persamaan (2.19)

$$\hat{\mathbf{F}} = \begin{pmatrix} \hat{f}_1 \\ \vdots \\ \hat{f}_n \end{pmatrix} = \mathbf{X}_c \hat{\mathbf{B}}_1 = \mathbf{X}_c \mathbf{S}^{-1} \hat{\mathbf{L}}. \quad (2.19)$$

Jika pada penelitian menggunakan matrik \mathbf{R} , maka model persamaan (2.18) dan (2.19) berubah menjadi

$$\hat{\mathbf{B}}_1 = \mathbf{R}^{-1} \hat{\mathbf{L}} \quad (2.10)$$

$$\hat{\mathbf{F}} = \mathbf{X}_s \mathbf{R}^{-1} \hat{\mathbf{L}} \quad (2.21)$$

dimana \mathbf{X}_s adalah matrik yang tiap elemennya telah distandarkan, $(x_{ij} - \bar{x}_j)/s_j$. Dalam menghitung *factor score* dengan persamaan (2.19) dan (2.21), matrik \mathbf{S} atau \mathbf{R} yang digunakan diperkenan berupa matrik nonsingular.

2.5 Fungsi Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang menjadi pusat struktur moneter dan perbankan di negara yang bersangkutan dan yang melaksanakan kepentingan ekonomi nasional (Dina, 2014). Berikut adalah fungsi-fungsi dari bank sentral:

1. Memperlancar lalu lintas pembayaran
 - a. menciptakan uang kartal
 - b. menyelenggarakan kliring antar bank umum.
2. Sebagai bankir, agen dan penasihat pemerintah
 - a. memelihara rekening pemerintah
 - b. memberikan pinjaman sementara
 - c. memberikan pinjaman khusus
 - d. melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli valuta asing (valas)
 - e. menerima pembayaran pajak
 - f. membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah,
 - g. membantu pengedaran surat berharga pemerintah
 - h. mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi
3. Bank sentral sebagai agen dan penasihat pemerintah
 - a. mengadministrasi dan mengelola hutang nasional
 - b. memberikan jasa pembayaran bunga atas hutang
 - c. memberikan saran dan informasi mengenai keadaan pasar uang dan modal
4. Memelihara cadangan/cash reserve bank umum dan memelihara cadangan devisa negara
 - a. *internal reserve*, untuk keperluan jumlah uang beredar
 - b. *eksternal reserve*, untuk alat pembayaran internasional
5. Sebagai *bankers bank* dan *lender of last resort*
6. Mengawasi kredit

7. Mengawasi bank (*bank supervision*), pengawasan bank dibagi menjadi dua yaitu *Prudential Supervision* dan *Monetary Supervision*.
 - a. ***Prudential Supervision***: pengawasan bank yang diarahkan agar *individual bank* dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi.
 - b. ***Monetary Supervision***: menjaga nilai mata uang negara yang bersangkutan sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga kebijakan moneter maupun kebijakan ekonomi pemerintah lainnya.

2.6 Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah atau mata uang negara, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Dalam UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004, terdapat pasal 8 poin ke-a yang mengatur tentang operasional bank sentral sebagai pihak berwenang yang berkaitan dengan kebijakan moneter, diantaranya yaitu:

1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi
2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk dalam tetapi tidak terbatas pada:
 - operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing
 - penetapan tingkat diskonto
 - penetapan cadangan wajib minimum
 - pengaturan kredit atau pembiayaan

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber Data dan Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah data sekunder yang bersumber dari buku Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo dalam angka tahun 2014 yang diproduksi oleh BPS. Variabel yang digunakan dalam penelitiann ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Aspek	Simbol Variabel	Penjelasan Variabel	Satuan
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	X1	PDRB pertanian, peternakan, kehutanan di kab/kota Pulau Sulawesi	Miliar Rupiah
	X2	PDRB pertambangan, penggalian di kab/kota Pulau Sulawesi	Miliar Rupiah
	X3	PDRB industri pengolahan di kab/kota Pulau Sulawesi	Miliar Rupiah
	X4	PDRB listrik, gas, air bersih di kab/kota Pulau Sulawesi	Miliar Rupiah
	X5	PDRB konstruksi di kab/kota Pulau Sulawesi	Miliar Rupiah
	X6	PDRB perdagangan, hotel, restoran di kab/kota Pulau Sulawesi	Miliar Rupiah
	X7	PDRB pengangkutan, komunikasi di kab/kota Pulau Sulawesi	Miliar Rupiah
	X8	PDRB keuangan, real estate, jasa	Miliar Rupiah
	X9	PDRB sektor jasa-jasa	Miliar Rupiah

Tabel 3.1 Variabel Penelitian (lanjutan)

Aspek	Variabel Penelitian	Penjelasan Variabel	Satuan
Pertumbuhan Ekonomi	X10	Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan di kabupaten/kota Pulau Sulawesi	Persentase (%)
Nilai Anggaran Pemerintah Daerah (APBD)	X11	PAD (Pendapatan Asli Daerah) di kab/kota Pulau Sulawesi	Juta Rupiah
	X12	Dana perimbangan di kab/kota Pulau Sulawesi	Juta Rupiah
	X13	Lain-lain pendapatan daerah yang sah di kab/kota Pulau Sulawesi	Juta Rupiah
	X14	Belanja tidak langsung di kab/kota Pulau Sulawesi	Juta Rupiah
	X15	Belanja langsung di kab/kota Pulau Sulawesi	Juta Rupiah
Upah Minimum Provinsi (UMP)	X16	UMP di kab/kota Pulau Sulawesi	Juta Rupiah
Jumlah Industri	X17	Jumlah industri keseluruhan di kab/kota Pulau Sulawesi	Unit
Kepadatan Penduduk	X18	Jumlah penduduk per km ² pada kabupaten/kota Pulau Sulawesi	Jiwa/Km ²
Panjang Jalan	X19	Panjang jalan pada kabupaten/kota Pulau Sulawesi	Km
AHH	X20	Besar AHH di kab/kota Pulau Sulawesi	Tahun
IPM	X21	Besar Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Pulau Sulawesi	Rasio

Tabel 3.1 Variabel Penelitian (lanjutan)

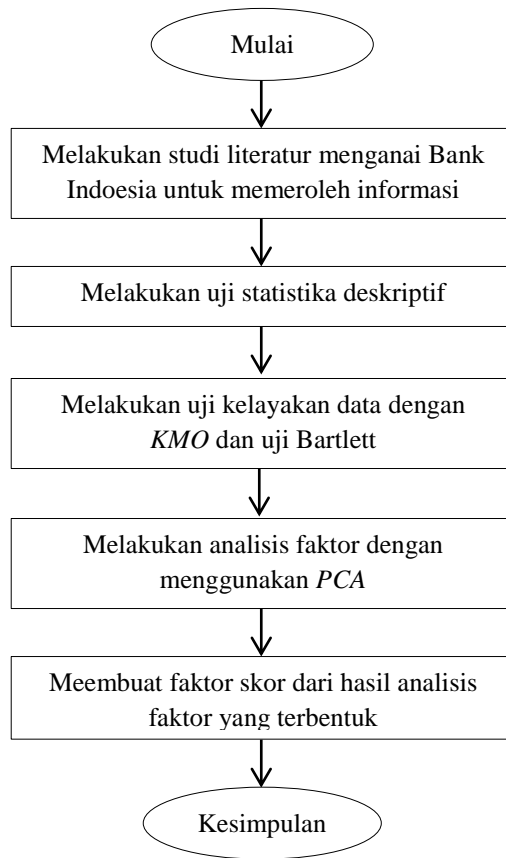
Aspek	Simbol Variabel	Penjelasan Variabel	Satuan
Pengeluaran per Kapita	X22	Besar pengeluaran per kapita di kab/kota Pulau Sulawesi	Ribu Rupiah
AMH	X23	Besar angka melek huruf penduduk di kab/kota Pulau Sulawesi	Tahun
Pendidikan	X24	Rata-rata lama sekolah di kab/kota Pulau Sulawesi	Tahun
Kantor Bank	X25	Jumlah ATM	Unit

3.2 Langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur mengenai Bank Indonesia untuk mengetahui informasi tentang Bank Indonesia dan mendapatkan data mengenai pengembangan jaringan distribusi uang dan layanan kas Bank Indonesia di Pulau Sulawesi.
2. Melakukan uji statistika deskriptif pada data pengembangan jaringan distribusi uang dan layanan kas Bank Indonesia di Pulau Sulawesi.
3. Melakukan uji kelayakan data dengan *KMO* dan uji Bartlett untuk melakukan pengecekan data pengembangan jaringan distribusi uang dan layanan kas Bank Indonesia di Pulau Sulawesi.
4. Melakukan analisis faktor dengan menggunakan *PCA*.
5. Membuat skor faktor dari hasil analisis faktor.
6. Menarik kesimpulan berdasarkan skor faktor yang diperoleh.

3.3 Diagram Alir



Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Secara Keseluruhan

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai statistika deskriptif dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dan pengelompokan KPwDN Bank Indonesia baru di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi.

4.1 Statistika Deskriptif

Berikut akan dibahas mengenai statistika deskriptif pada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Statistika deskriptif yang akan dibahas yaitu terkait dengan PRRB 9 sektor pada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan sektor pendidikan.

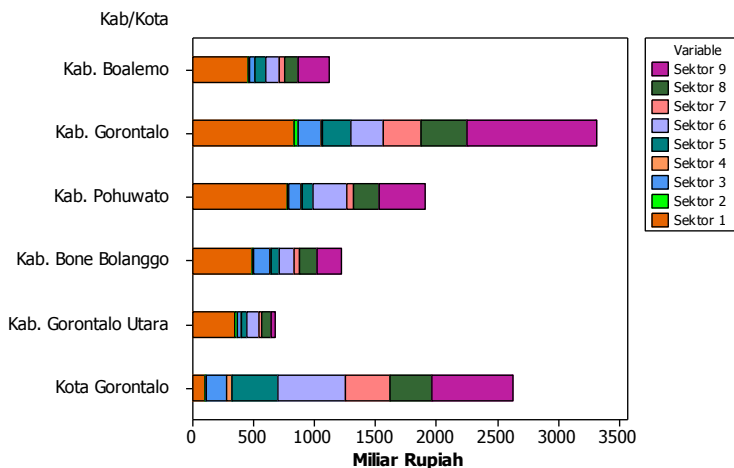
4.1.1 Provinsi Gorontalo

A. PDRB 9 Sektor

Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada Provinsi Gorontalo pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalian, PDRB sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan PDRB sektor jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Pada Gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa Kab. Gorontalo menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan sebesar 832,49 miliar rupiah atau 27,83% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pertambangan dan penggalian, Kab. Gorontalo juga menyumbang nilai terbesar yaitu 34,3 miliar rupiah atau 34.64% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor industri dan pengolahan, Kab. Gorontalo penyumbang terbesar dengan nilai 188,42 miliar rupiah atau

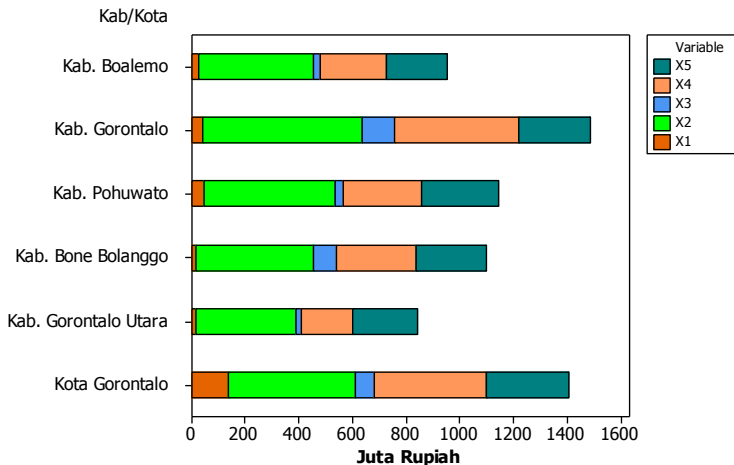
28,52% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor listrik, gas dan air bersih, Kota Gorontalo penyumbang terbesar dengan nilai 42,89 miliar rupiah atau 14,28% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor konstruksi, Kota Gorontalo penyumbang terbesar dengan nilai 380,73 miliar rupiah atau 42,58% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, Kota Gorontalo penyumbang terbesar dengan nilai 553,6 miliar rupiah atau 38,32% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, Kota Gorontalo penyumbang terbesar dengan nilai 359,16 miliar rupiah atau 42,45% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, Kab. Gorontalo penyumbang terbesar dengan nilai 378,06 miliar rupiah atau 30,55% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor jasa-jasa, Kab. Gorontalo penyumbang terbesar dengan nilai 1063,17 miliar rupiah atau 40,91% dari total keseluruhan. Pada Provinsi Gorontalo penyumbang terbesar dari PDRB 9 sektor adalah Kab. Gorontalo dan Kota Gorontalo.



Gambar 4.1 Grafik PDRB 9 sektor Provinsi Gorontalo

B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Gorontalo dalam satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung dan belanja langsung.



Gambar 4.2 Grafik jumlah APBD Provinsi Gorontalo

Pada Gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Kota Gorontalo memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 134,38 juta rupiah. Pada dana perimbangan Kab. Gorontalo memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 593,825 juta rupiah. Pada variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kab. Gorontalo memiliki nilai tertinggi sebesar 119,758 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak langsung, Kab. Gorontalo memiliki nilai tertinggi sebesar 463,145 juta rupiah. Pada variabel belanja langsung, Kota Gorontalo memiliki nilai tertinggi sebesar 302,86 juta rupiah. Pada Provinsi Gorontalo sektor APBD, Kab Gorontalo dan Kota Gorontalo merupakan daerah yang paling menonjol dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

C. Sektor Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah penduduk di daerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah sektor pendidikan dari Provinsi Gorontalo pada tahun 2013.

Tabel 4.1 Sektor Pendidikan Provinsi Gorontalo

Kab/Kota	AMH	Rata-rata lama sekolah
Kab. Boalemo	95.82	6.6
Kab. Gorontalo	95.55	6.9
Kab. Pohuwato	97.09	7.04
Kab. Bone Bolanggo	98.87	7.86
Kab. Gorontalo Utara	96.67	6.93
Kota Gorontalo	99.67	10.28

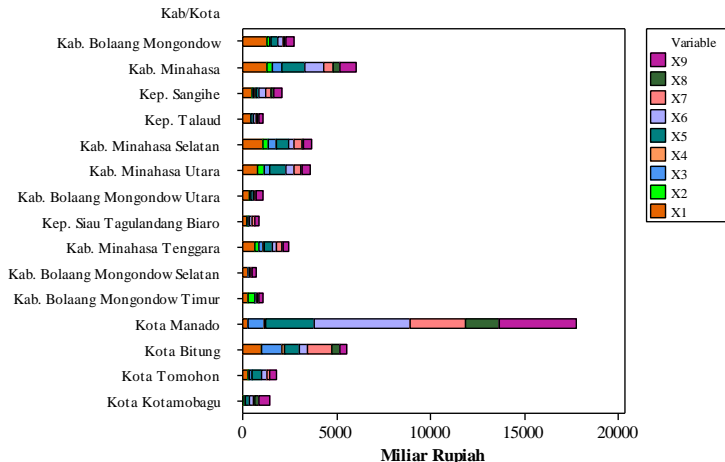
Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Kota Gorontalo memiliki sistem pendidikan yang sangat baik jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah pada Kota Gorontalo yakni sebesar 10,28, hal itu juga didukung dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang tinggi yakni sebesar 99,67%. Kab. Bone Bolanggo memiliki sistem pendidikan terbaik kedua setelah Kota Gorontalo dengan rata-rata lama sekolah sebesar 7,86, dengan AMH sebesar 98.87%.

4.1.2 Provinsi Sulawesi Utara

A. PDRB 9 Sektor

Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalan, PDRB sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB

sektor keuangan, real estate dan jasa perukaan dan PDRB sektor jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.



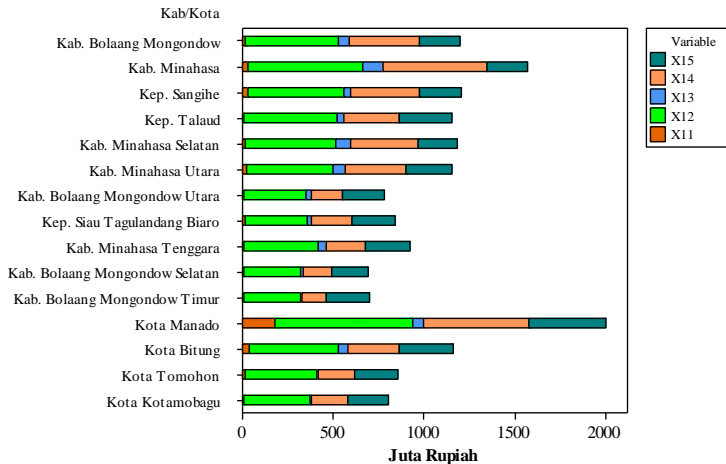
Gambar 4.3 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Utara

Pada Gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa Kab. Bolaang Mongondow menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan sebesar 1309,6 miliar rupiah atau 14,84% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pertambangan dan penggalian, Kab. Minahasa Utara juga menyumbang nilai terbesar yaitu 356,85 miliar rupiah atau 17,95% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor industri dan pengolahan, Kota Bitung penyumbang terbesar dengan nilai 1086,49 miliar rupiah atau 29,17% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor listrik, gas dan air bersih, Kota Manado penyumbang terbesar dengan nilai 111,12 miliar rupiah atau 28,81% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor konstruksi, Kota Manado penyumbang terbesar dengan nilai 2598,8 miliar rupiah atau 30,86% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, Kota Manado penyumbang

terbesar dengan nilai 5101,31 miliar rupiah atau 56,3% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, Kota Manado penyumbang terbesar dengan nilai 2959,13 miliar rupiah atau 44,74% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, Kota Manado penyumbang terbesar dengan nilai 1754,62 miliar rupiah atau 53,09% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor jasa-jasa, Kota Manado penyumbang terbesar dengan nilai 4130,09 miliar rupiah atau 42,84% dari total keseluruhan. Pada Provinsi Sulawesi Utara penyumbang terbesar dari PDRB 9 sektor adalah Kota Manado.

B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Sulawesi Utara dalam satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung dan belanja langsung.



Gambar 4.4 Grafik jumlah APBD Provinsi Sulawesi Utara

Pada Gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Kota Manado memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 181,83 juta rupiah.

Pada dana perimbangan Kota Manado memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 755,824 juta rupiah. Pada variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kab. Minahasa memiliki nilai tertinggi sebesar 113,144 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak langsung, Kota Manado memiliki nilai tertinggi sebesar 577,275 juta rupiah. Pada variabel belanja langsung, Kota Manado memiliki nilai tertinggi sebesar 423,366 juta rupiah. Pada Provinsi Sulawesi Utara sektor APBD, Kota Manado merupakan daerah yang paling menonjol dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

C. Sektor Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah penduduk di daerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah sektor pendidikan dari Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013.

Pada Tabel 4.2 didapatkan hasil bahwa Kota Manado memiliki sistem pendidikan yang sangat baik jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah pada Kota Manado yakni sebesar 10,92, hal itu juga didukung dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang tinggi yakni sebesar 99,93%. Kota Tomohon memiliki sistem pendidikan terbaik kedua setelah Kota Manado dengan rata-rata lama sekolah sebesar 10,3, dengan AMH sebesar 99,88%.

Tabel 4.2 Sektor pendidikan Provinsi Sulawesi Utara

Kab/Kota	AMH	Rata-rata lama sekolah
Kab. Bolaang Mongondow	98.34	7.48
Kab. Minahasa	99.9	9.55
Kep. Sangihe	98.78	7.76
Kep. Talaud	99.6	8.82
Kab. Minahasa Selatan	99.87	8.8
Kab. Minahasa Utara	99.79	9.42

Kab/Kota	AMH	Rata-rata lama sekolah
Kab. Bolaang Mongondow Utara	98.68	7.44
Kep. Siau Tagulandang Biaro	99.82	8.65
Kab. Minahasa Tenggara	99.56	8.43
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	99.09	7.32
Kab. Bolaang Mongondow Timur	99.59	7.5
Kota Manado	99.93	10.92
Kota Bitung	99.44	9.47
Kota Tomohon	99.88	10.3
Kota Kotamobagu	99.68	9.54

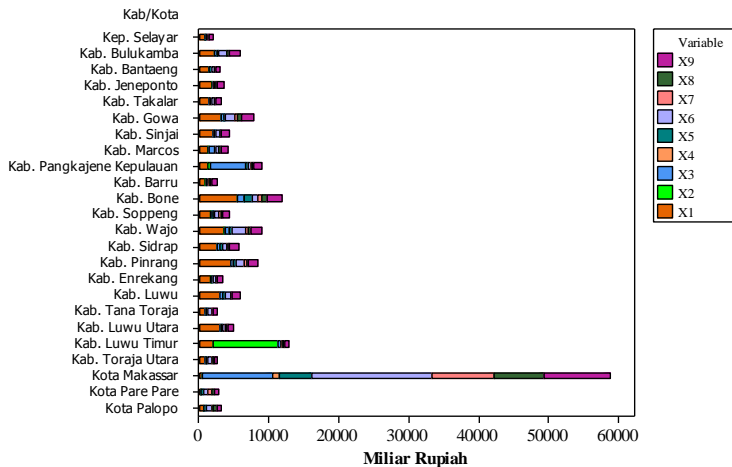
4.1.3 Provinsi Sulawesi Selatan

A. PDRB 9 Sektor

Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalian, PDRB sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan PDRB sektor jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Gambar 4.5 didapatkan hasil bahwa Kabupaten Bone menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan sebesar 5430,07 miliar rupiah atau 12,01% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pertambangan dan penggalian, Kab. Luwu Timur juga menyumbang nilai terbesar yaitu 9289,76 miliar rupiah atau 87,41% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor industri dan pengolahan, Kota Makassar penyumbang terbesar dengan nilai 10063,17 miliar rupiah atau 48,95% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor listrik, gas dan air bersih, Kota Makassar penyumbang terbesar

dengan nilai 975,15 miliar rupiah atau 53,76% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor konstruksi, Kota Makassar penyumbang terbesar dengan nilai 4621,58 miliar rupiah atau 43,65% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, Kota Makassar penyumbang terbesar dengan nilai 17273,9 miliar rupiah atau 55,18% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, Kota Makassar penyumbang terbesar dengan nilai 8984,44 miliar rupiah atau 63,91% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, Kota Makassar penyumbang terbesar dengan nilai 7099,18 miliar rupiah atau 50,87% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor jasa-jasa, Kota Makassar penyumbang terbesar dengan nilai 9462 miliar rupiah atau 29,25% dari total keseluruhan. Pada Provinsi Sulawesi Selatan penyumbang terbesar dari PDRB 9 sektor adalah Kota Makassar.

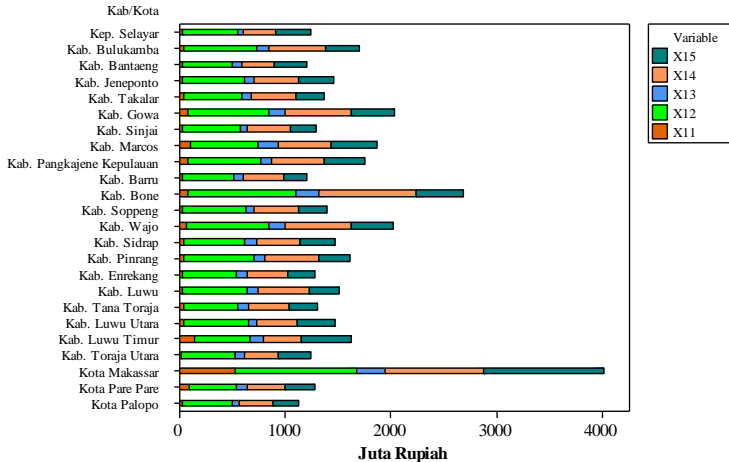


Gambar 4.5 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Selatan

B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Sulawesi Selatan dalam

satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung dan belanja langsung.



Gambar 4.6 Grafik jumlah APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Kota Makassar memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 525,85 juta rupiah. Pada dana perimbangan Kota Makssar memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 1148,088 juta rupiah. Pada variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kota Makassar memiliki nilai tertinggi sebesar 270,703 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak langsung, Kota Makassar memiliki nilai tertinggi sebesar 937,797 juta rupiah. Pada variabel belanja langsung, Kota Makassar memiliki nilai tertinggi sebesar 1134,86 juta rupiah. Pada Provinsi Sulawesi Selatan sektor APBD, Kota Makassar merupakan daerah yang paling menonjol dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

C. Sektor Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila

AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah penduduk di daerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah sektor pendidikan dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013.

Tabel 4.3 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Kab/Kota	AMH	Rata-rata lama sekolah
Kep. Selayar	91.76	7.26
Kab. Bulukamba	88.23	7.17
Kab. Bantaeng	81.4	6.48
Kab. Jeneponto	78.92	6.27
Kab. Takalar	84.69	7.02
Kab. Gowa	83.11	7.37
Kab. Sinjai	88.44	7.1
Kab. Marcos	85.52	7.27
Kab. Pangkajene Kepulauan	90.21	7.22
Kab. Barru	89.55	7.89
Kab. Bone	89.04	6.73
Kab. Soppeng	88.74	7.37
Kab. Wajo	85.62	6.98
Kab. Sidrap	90.25	7.77
Kab. Pinrang	91.99	7.89
Kab. Enrekang	91.35	8.39
Kab. Luwu	91.82	7.94
Kab. Tana Toraja	90.14	8.26
Kab. Luwu Utara	93.11	7.51
Kab. Luwu Timur	93.87	8.21
Kab. Toraja Utara	87.38	7.88
Kota Makassar	97.83	10.9
Kota Pare Pare	97.36	9.91
Kota Palopo	97.45	10.19

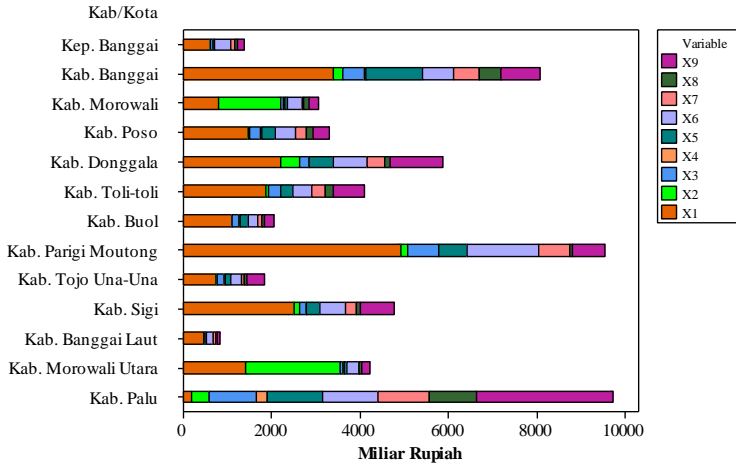
4.1.4 Provinsi Sulawesi Tengah

A. PDRB 9 Sektor

Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalan, PDRB sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan PDRB sektor jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada Gambar 4.7 didapatkan hasil bahwa Kab. Parigi Moutong menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan sebesar 4932,87 miliar rupiah atau 22,80% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pertambangan dan penggalan, Kab. Morowali Utara juga menyumbang nilai terbesar yaitu 2161,31 miliar rupiah atau 43,23% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor industri dan pengolahan, Kota Palu penyumbang terbesar dengan nilai 1063,43 miliar rupiah atau 28,80% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor listrik, gas dan air bersih, Kota Palu penyumbang terbesar dengan nilai 254,95 miliar rupiah atau 59,35% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor konstruksi, Kab. Banggai penyumbang terbesar dengan nilai 1287,55 miliar rupiah atau 25,46% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, Kab. Parigi Moutong penyumbang terbesar dengan nilai 1597,64 miliar rupiah atau 21,43% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, Kota Palu penyumbang terbesar dengan nilai 1180,1 miliar rupiah atau 29,69% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, Kota Palu penyumbang terbesar dengan nilai 1055,48 miliar rupiah atau 40,53% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor jasa-jasa, Kota Palu penyumbang

terbesar dengan nilai 3099,44 miliar rupiah atau 34,61% dari total keseluruhan.

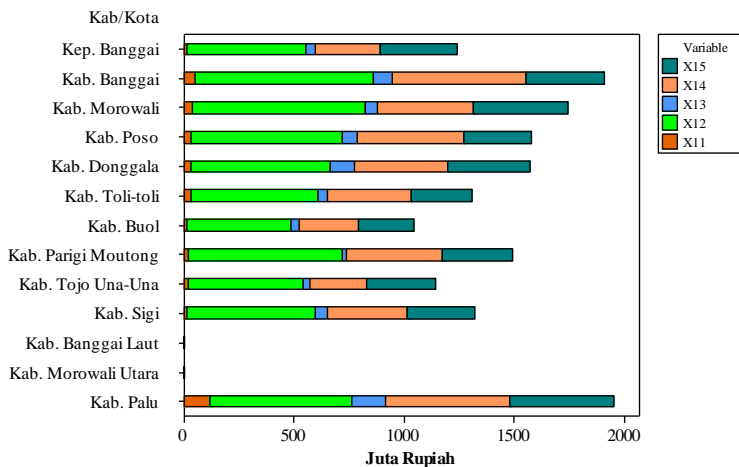


Gambar 4.7 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Tengah

B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Sulawesi Tengah dalam satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pada Gambar 4.8 didapatkan dilihat bahwa Kota Palu memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 117,39 juta rupiah. Pada dana perimbangan Kab. Banggai memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 811,647 juta rupiah. Pada variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kota Palu memiliki nilai tertinggi sebesar 152,889 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak langsung, Kab. Banggai memiliki nilai tertinggi sebesar 607,139 juta rupiah. Pada variabel belanja langsung, Kota Palu memiliki nilai tertinggi sebesar 470,425 juta rupiah.



Gambar 4.8 Grafik Jumlah APBD Provinsi Sulawesi Tengah

C. Sektor Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah penduduk di daerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah sektor pendidikan dari Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013.

Pada Tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa Kota Palu memiliki sistem pendidikan yang sangat baik jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah pada Kota Palu yakni sebesar 11,07, hal itu juga didukung dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang tinggi yakni sebesar 99,37%. Kab. Poso memiliki sistem pendidikan terbaik kedua setelah Kota Palu dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,82, dengan AMH sebesar 97,98%. kabupaten Morowali Utara memiliki sistem pendidikan terbaik ketiga dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,29. Kota Palu memiliki sistem pendidikan yang paling baik di Provinsi Sulawesi Tengah.

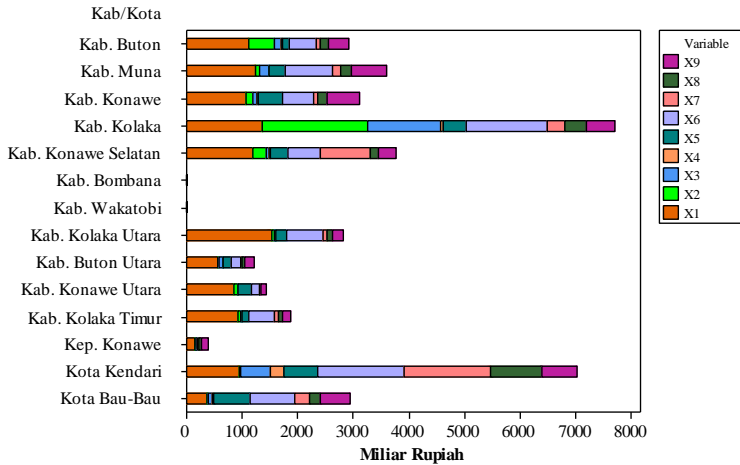
Tabel 4.4 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Kab/Kota	AMH	Rata-rata lama sekolah
Kep. Banggai	95.11	7.96
Kab. Banggai	96.05	8.05
Kab. Morowali	97.54	8.28
Kab. Poso	97.98	8.82
Kab. Donggala	94.75	7.67
Kab. Toli-toli	95.76	8.09
Kab. Buol	98.75	8.38
Kab. Parigi Moutong	94.85	7.19
Kab. Tojo Una-Una	97.58	7.94
Kab. Sigi	96.59	8.09
Kab. Banggai Laut	97.57	8.08
Kab. Morowali Utara	95.2	8.29
Kota Palu	99.37	11.07

4.1.5 Provinsi Sulawesi Tenggara

A. PDRB 9 Sektor

Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalian, PDRB sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan PDRB sektor jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.



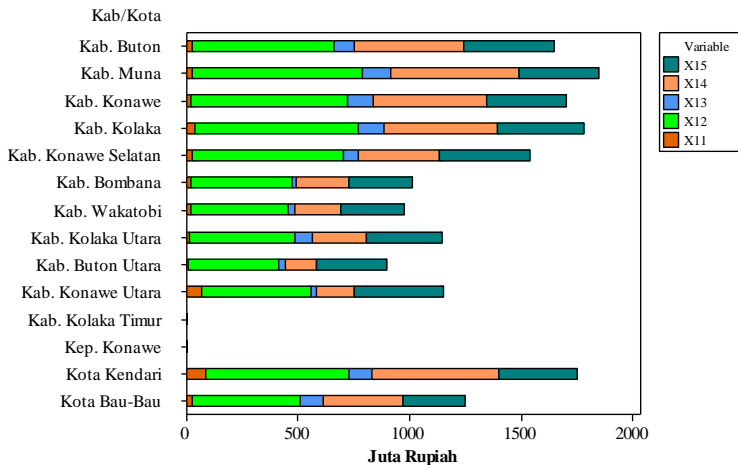
Gambar 4.9 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada Gambar 4.9 diatas dapat dilihat bahwa Kab. Kolaka Utara menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan sebesar 1529,42 miliar rupiah atau 13,53% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pertambangan dan penggalian, Kab. Kolaka juga menyumbang nilai terbesar yaitu 1912,25 miliar rupiah atau 62,99% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor industri dan pengolahan, Kab. Kolaka penyumbang terbesar dengan nilai 1317,78 miliar rupiah atau 53,35% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor listrik, gas dan air bersih, Kota Kendari penyumbang terbesar dengan nilai 235,45 miliar rupiah atau 54,56% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor konstruksi, Kota Bau-Bau penyumbang terbesar dengan nilai 643,38 miliar rupiah atau 18,12% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, Kota Kendari penyumbang terbesar dengan nilai 1569,08 miliar rupiah atau 20,29% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, Kota Kendari penyumbang terbesar dengan nilai 1542,92 miliar rupiah atau 43,41% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa

perusahaan, Kota Kendari penyumbang terbesar dengan nilai 916,69 miliar rupiah atau 38,04% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor jasa-jasa, Kota Kendari penyumbang terbesar dengan nilai 636,59 miliar rupiah atau 14,66% dari total keseluruhan.

B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Sulawesi Tenggara dalam satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung dan belanja langsung.



Gambar 4.10 Grafik Jumlah APBD Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada Gambar 4.10 diatas dapat dilihat bahwa Kota Kendari memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 83,355 juta rupiah. Pada dana perimbangan Kab. Muna memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 763,29 juta rupiah. Pada variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kab. Kolaka memiliki nilai tertinggi sebesar 115,429 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak langsung, Kota Kendari memiliki nilai tertinggi sebesar 572,112 juta rupiah. Pada

variabel belanja langsung, Kab. Buton memiliki nilai tertinggi sebesar 407,848 juta rupiah.

C. Sektor Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah penduduk di daerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah sektor pendidikan dari Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2013.

Tabel 4.5 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kab/Kota	AMH	Rata-rata lama sekolah
Kab. Buton	86.65	7.13
Kab. Muna	88.73	7.55
Kab. Konawe	94.73	8.9
Kab. Kolaka	93.46	8.28
Kab. Konawe Selatan	94.15	7.69
Kab. Bombana	91.47	7.57
Kab. Wakatobi	93.03	8.07
Kab. Kolaka Utara	94.54	7.82
Kab. Buton Utara	89.36	8.14
Kab. Konawe Utara	94.03	8.43
Kab. Kolaka Timur	92.64	8.98
Kep. Konawe	90.99	6.86
Kota Kendari	98.69	11.41
Kota Bau-Bau	95.71	9.97

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa Kota Kendari memiliki sistem pendidikan yang sangat baik jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah pada Kota Kendari yakni sebesar 11,41, hal itu juga didukung dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang tinggi yakni sebesar 98,69%. Kota Bau-Bau

memiliki sistem pendidikan terbaik kedua setelah Kota Kendari dengan rata-rata lama sekolah sebesar 9,97, dengan AMH sebesar 95.71%.

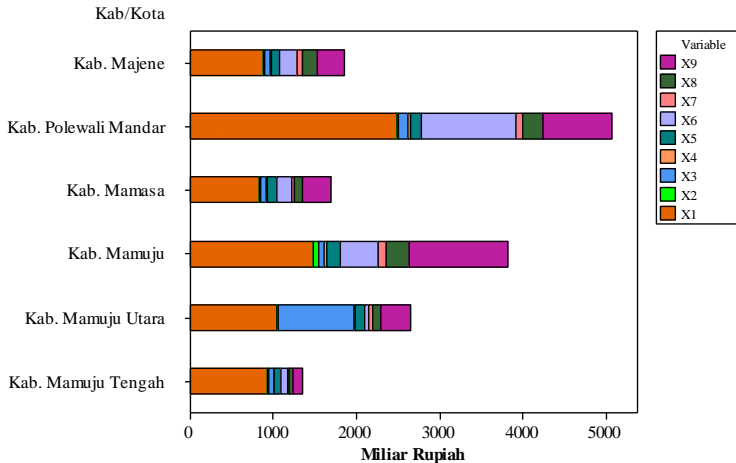
4.1.6 Provinsi Sulawesi Barat

A. PDRB 9 Sektor

Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalian, PDRB sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa perumahan dan PDRB sektor jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.

Pada Gambar 4.11 didapatkan hasil bahwa Kab. Polewali Mandar menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor pertanian, peternakan dan kehutanan sebesar 2488,59 miliar rupiah atau 32,48% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pertambangan dan penggalian, Kab. Mamuju juga menyumbang nilai terbesar yaitu 64,02 miliar rupiah atau 44,55% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor industri dan pengolahan, Kab. Mamuju Utara penyumbang terbesar dengan nilai 913,21 miliar rupiah atau 71,81% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor listrik, gas dan air bersih, Kab. Polewali Mandar penyumbang terbesar dengan nilai 37,18 miliar rupiah atau 38,81% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor konstruksi, Kab. Mamuju penyumbang terbesar dengan nilai 169,46 miliar rupiah atau 24,6% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, Kab. Polewali Mandar penyumbang terbesar dengan nilai 1143,95 miliar rupiah atau 53,8% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, Kab. Mamuju penyumbang terbesar dengan nilai 106,78 miliar rupiah atau 29,93% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa

perusahaan, Kab. Mamuju penyumbang terbesar dengan nilai 273,96 miliar rupiah atau 29,3% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor jasa-jasa, Kab. Mamuju penyumbang terbesar dengan nilai 1179,76 miliar rupiah atau 37,43% dari total keseluruhan.



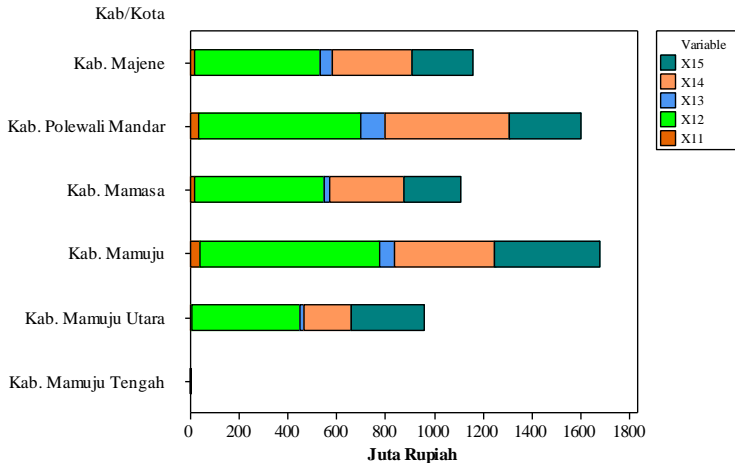
Gambar 4.11 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Barat

B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Sulawesi Barat dalam satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pada Gambar 4.12 didapatkan hasil bahwa Kab. Polewali Mandar memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 30,539 juta rupiah. Pada dana perimbangan Kab. Mamuju memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 734,134 juta rupiah. Pada variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kab. Polewali Mandar memiliki nilai tertinggi sebesar 100,149 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak langsung, Kab. Polewali Mandar memiliki nilai tertinggi

sebesar 510,106 juta rupiah. Pada variabel belanja langsung, Kab. Mamuju memiliki nilai tertinggi sebesar 428,486 juta rupiah.



Gambar 4.12 Grafik jumlah APBD Provinsi Sulawesi Barat

C. Sektor Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah penduduk di daerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah sektor pendidikan dari Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013.

Pada Tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa Kab. Majene memiliki sistem pendidikan yang sangat baik jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah pada Kab. Majene yakni sebesar 8,51, hal itu juga didukung dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang tinggi yakni sebesar 96,53%. Kabupaten Mamuju memiliki sistem pendidikan terbaik kedua dengan rata-rata lama sekolah sebesar 7,58. Kab. Mamuju Utara memiliki sistem pendidikan terbaik ketiga setelah Kab. Majene dan Kab. Mamuju dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,51, dengan AMH sebesar 96,53%.

Tabel 4.6 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat

Kab/Kota	AMH	Rata-rata lama sekolah
Kab. Majene	96.53	8.51
Kab. Polewali Mandar	87.64	7.08
Kab. Mamasa	89.43	7.19
Kab. Mamuju	91.2	7.58
Kab. Mamuju Utara	95.65	7.37
Kab. Mamuju Tengah	91.14	6.66

4.2 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia

Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster.

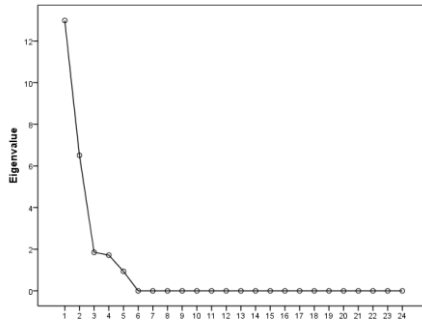
Analisis faktor digunakan untuk mereduksi dimensi data yang mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data dengan beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit tanpa kehilangan informasi dari variabel awal.

KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor.

Bartlett's Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika *Sig.* berada dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor. Pada kasus ini *KMO* dan *Bartlett's Test* tidak muncul karena jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah observasi.

Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat secara visual melalui *Scree Plot*. Pada Gambar 4.13 Dapat dilihat bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 24 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki *eigen-value*

lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi serta bentuknya yang landai dari faktor 1 dan 2.



Gambar 4.13 Scree Plot Provinsi Gorontalo

Dapat dilihat bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 24 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki *eigen-value* lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan varians dari semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan melihat *eigenvalue* serta varians kumulatif pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Total Variance Explained Provinsi Gorontalo

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	12.987	54.111	54.111
2	6.511	27.128	81.238
3	1.852	7.715	88.953
⋮	⋮	⋮	⋮
23	-4.714E-16	-1.964E-15	100
24	-6.146E-16	-2.561E-15	100

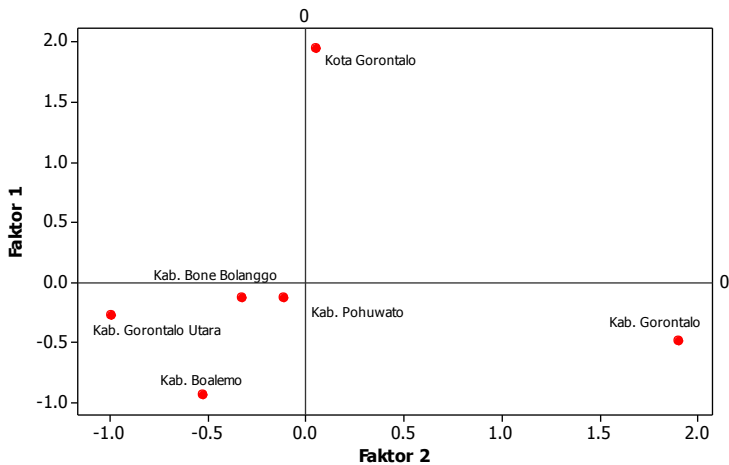
Berdasarkan pada Tabel 4.7 didapatkan *eigenvalue* komponen pertama sebesar 12,987 dengan proporsi keragaman yang dijelaskan sebesar 54,111%. Komponen kedua memberikan proporsi sebesar 6,511 dengan proporsi keragaman sebesar 27,128%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 1,852 dengan proporsi keragaman sebesar 7,715%.

Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen yang digunakan adalah komponen 1, dan 2. Hal ini dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua *eigenvalue* tersebut adalah mencapai 81,238%.

Tabel 4.8 *Loading Factor* Provinsi Gorontalo

Variabel	Faktor	
	1	2
Rata2_Lama_Sklh	.973	
Jmlh_Penduduk	.948	
PDRB_Listrik	.937	
PAD	.908	
PDRB_Perdagangan	.875	
IPM	.874	
AMH	.825	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.802	
PDRB_Konstruksi	.800	.506
Blj_Lgsg	.796	
Pert_Ekonomi	.687	
PDRB_Pertanian	-.652	.557
Jmlh_Industri	.597	
Dana_Perimbangan		.970
PDRB_Jasa		.956
Blj_Tdk_Lgsg		.880
Pnjg_Jalan		.863
Jmlh_ATM		.856
PDRB_Kuangan	.506	.850
Lain2_Pendapatan		.823
PDRB_Industri		.801
PDRB_Pengangkutan	.644	.703
PDRB_Pertambangan		.667
AHH	-.503	.626

Pada tabel 4.8 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru di Provinsi Gorontalo. Dari tabel 4.8 diatas didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel rata-rata lama sekolah dengan nilai 0,973. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel dana perimbangan dengan nilai 0,970. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Gorontalo.



Gambar 4.14 Faktor Skor pada Provinsi Gorontalo

Dari Gambar 4.14 dapat dilihat bahwa Kota Gorontalo menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di kuadran kuadran satu, itu dikarenakan terdapat KPwDN di Kota Gorontalo yang mengindikasikan perekonomian di Kota Gorontalo sangat tinggi. Untuk itu akan dibuat analisis pengelompokan tanpa memasukkan Kota Gorontalo sebagai anggota yang bertujuan untuk mengetahui kab/kota mana yang sebaiknya dibangun KPwDN baru. Berikut adalah hasil analisis faktor pada Provinsi Gorontalo tanpa memasukkan Kota Gorontalo.

Dari hasil analisis faktor terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 24 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki *eigen-value* lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan variansi dari semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan melihat *eigenvalue* serta variansi kumulatif pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 *Total Variance Explained* Provinsi Gorontalo tanpa KPwDN

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	13.941	58.088	58.088
2	4.923	20.514	78.601
3	3.194	13.308	91.909
⋮	⋮	⋮	⋮
23	-5.268E-16	-2.195E-15	100
24	-6.943E-16	-2.893E-15	100

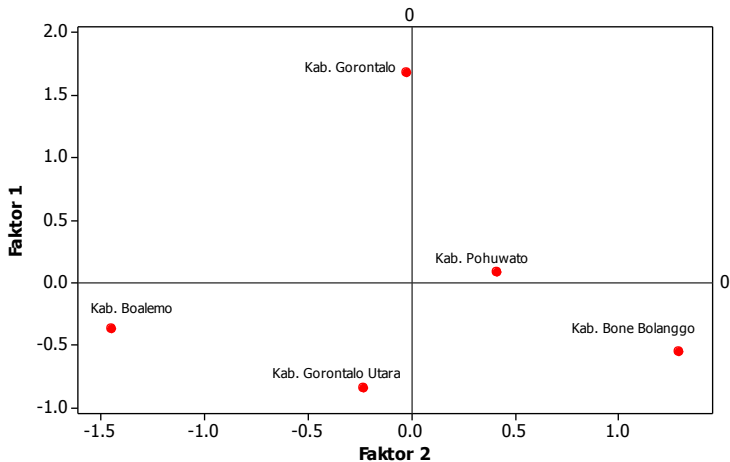
Berdasarkan pada Tabel 4.9 didapatkan *eigenvalue* komponen pertama sebesar 13,941 dengan proporsi keragaman yang dijelaskan sebesar 58,088%. Komponen kedua memberikan proporsi sebesar 4,923 dengan proporsi keragaman sebesar 20,514%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 3,194 dengan proporsi keragaman sebesar 13,308.

Jika dilihat dari *scree plot* dan proporsi variansi kumulatifnya, komponen yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua *eigenvalue* tersebut adalah mencapai 78,601%. Berikut akan disajikan *loading factor* dari analisis faktor Provinsi Gorontalo tanpa KPwDN.

Tabel 4.10 *Loading Factor* Provinsi Gorontalo tanpa KPwDN

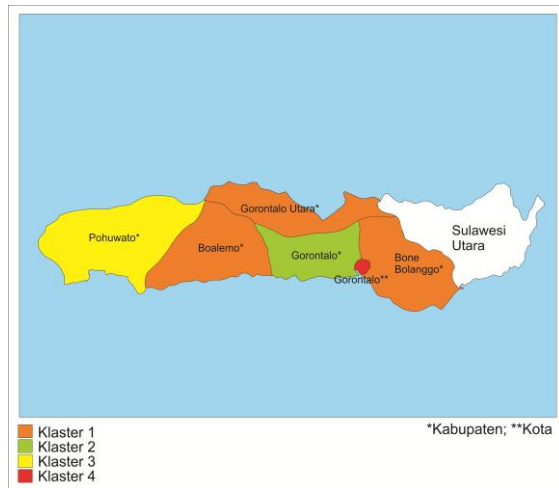
Variabel	Faktor	
	1	2
PDRB_Jasa	.998	
PDRB_Konstruksi	.988	
PDRB_Keuangan	.986	
Dana_Perimbangan	.977	
Pnjl_Jalan	.973	
PDRB_Pengangkutan	.965	
Jmlh_ATM	.953	
Blj_Tdk_Lgsg	.949	
PDRB_Pertanian	.865	
Jmlh_Penduduk	.810	
PDRB_Listrik	.802	
PAD	.798	
PDRB_Industri	.798	.542
PDRB_Perdagangan	.796	
Lain2_Pendapatan	.724	
PDRB_Pertambangan	.673	
AHH	.637	
Pert_Ekonomi		
IPM		.951
Rata2_Lama_Sklh		.913
Pengeluaran_Pr.Kapita		.899
AMH	-.526	.814
Jmlh_Industri		.775
Blj_Lgsg		.698

Pada tabel 4.10 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru di Provinsi Gorontalo tanpa memasukkan daerah yang memiliki KPwDN. Pada tabel 4.10 didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel PDRB sektor jasa-jasa dengan nilai 0,998. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel IPM dengan nilai 0,951. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Gorontalo tanpa KPwDN.



Gambar 4.15 Faktor Skor Provinsi pada Provinsi Gorontalo tanpa KPwDN

Dari Gambar 4.15 dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor itu dikarenakan perekonomian di Kabupaten Gorontalo menduduki posisi tertinggi kedua setelah Kota Gorontalo. Namun pada Kabupaten Gorontalo tidak perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia karena letaknya sudah dekat dengan Kota Gorontalo seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.16. Dari Gambar 4.16 dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara letaknya sangat dekat dengan Kota Gorontalo untuk itu rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kabupaten Pohuwato perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia karena perekonomian di Kabupaten Pohuwato termasuk yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain dan Kabupaten Pohuwato masuk di kuadran satu.



Gambar 4.16 Peta Provinsi Gorontalo

4.3 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia

Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai tahap awal untuk analisis kluster.

Tabel 4.11 KMO dan Bartlett's Test

KMO Measure of Sampling Adequacy		0.414
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Sq	1128,136
	df	231
	Sig.	0.000

KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor, pada Tabel

4.11 didapatkan *KMO* sebesar 0,414 namun diasumsikan data dapat dilanjutkan ke analisis faktor.

Bartlett's Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika *Sig.* berada dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor.. Dari tabel 4.20 diatas didapatkan nilai *Sig.* 0,000 sehingga dapat dilanjutkan ke analisis faktor.

Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat secara visual melalui *Scree Plot*. Terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 22 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki *eigen-value* lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Berikut adalah hasil yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan melihat *eigenvalue* serta varians kumulatif pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Selatan

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	12.244	55.656	55.656
2	3.376	15.346	71.002
3	1.691	7.678	78.690
⋮	⋮	⋮	⋮
21	5.977E-5	0.000	100
22	4.420E-6	2.009E-5	100

Berdasarkan pada Tabel 4.12 didapatkan *eigenvalue* komponen pertama sebesar 12,244 dengan proporsi keragaman yang dijelaskan sebesar 55,656%. Komponen kedua memberikan proporsi sebesar 3.376 dengan proporsi keragaman sebesar 15,346%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 1,691 dengan proporsi keragaman sebesar 7,678%.

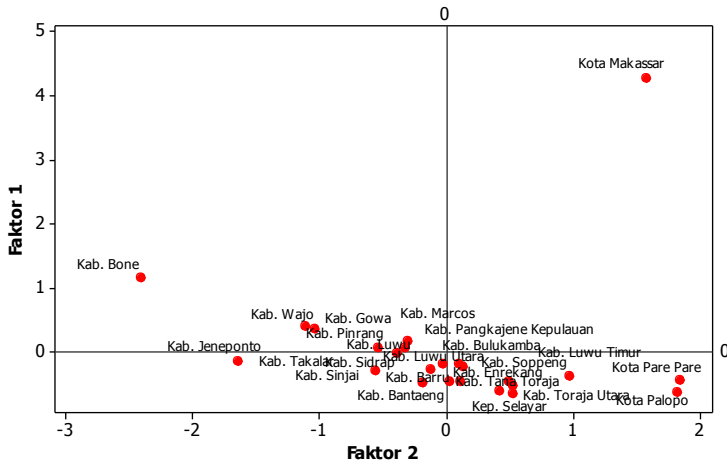
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini

dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua *eigenvalue* tersebut adalah mencapai 71.002%.

Tabel 4.13 *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Selatan

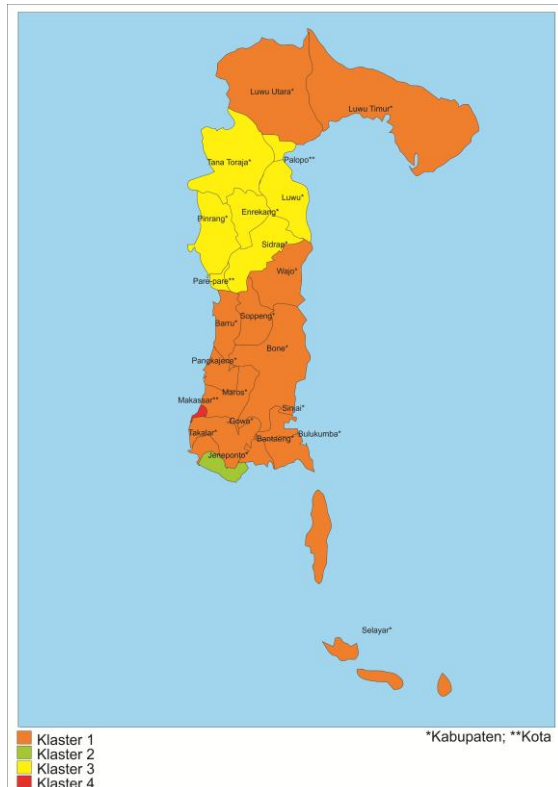
Variabel	Faktor	
	1	2
PDRB_Konstruksi	.948	
Blj_Lgsg	.944	
PDRB_Listrik	.940	
PDRB_Keluaran	.939	
PDRB_Perdagangan	.931	
PDRB_Pengangkutan	.929	
Jmlh_ATM	.923	
PAD	.922	
Dana_Perimbangan	.904	
Jmlh_Penduduk	.884	
PDRB_Industri	.865	
Blj_Tdk_Lgsg	.864	
Lain2_Pendapatan	.854	
Pengeluaran_Pr.Kapita		
PDRB_Jasa		
Rata2_Lama_Sklh		.826
AMH		.732
IPM		.731
PDRB_Pertanian		-.730
Pert_Ekonomi		.673
AHH		
PDRB_Pertambangan		

Pada tabel 4.13 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tabel 4.13 diatas didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel PDRB sektor konstruksi dengan nilai 0,948. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel rata-rata lama sekolah dengan nilai 0,826. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 4.17 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Selatan

Dari gambar 4.17 dapat dilihat bahwa Kota Makassar menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di kuadran satu, itu dikarenakan perekonomian di Kota Makassar menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil faktor skor diatas rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kota Makassar perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia karena perekonomian di Kota Makassar sangat tinggi dan belum ada KPwDN Bank Indonesia di Provinsi Selatan. Berikut adalah peta dari Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 4.18 Peta Provinsi Sulawesi Selatan

4.4 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia

Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster.

Analisis faktor digunakan untuk mereduksi dimensi data yang mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data dengan

beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit tanpa kehilangan informasi dari variabel awal.

KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor.

Bartlett's Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika *Sig.* berada dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor. Pada kasus ini *KMO* dan *Bartlett's Test* tidak muncul karena jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah observasi.

Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat secara visual melalui *Scree Plot*. Dari hasil analisis faktor didapatkan bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 22 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki *eigen-value* lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan varians dari semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan melihat *eigenvalue* serta varians kumulatif pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Utara

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	11.477	52.169	52.169
2	3.843	17.468	69.637
3	1.911	8.686	78.324
⋮	⋮	⋮	⋮
21	-3.072-16	-1.396E-15	100
22	-4.361-16	-1.982E-15	100

Berdasarkan pada Tabel 4.14 didapatkan *eigenvalue* komponen pertama sebesar 11,477 dengan proporsi keragaman yang dijelaskan sebesar 52,169%. Komponen kedua memberikan

proporsi sebesar 3,843 dengan proporsi keragaman sebesar 17,468%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 1,911 dengan proporsi keragaman sebesar 8,686%.

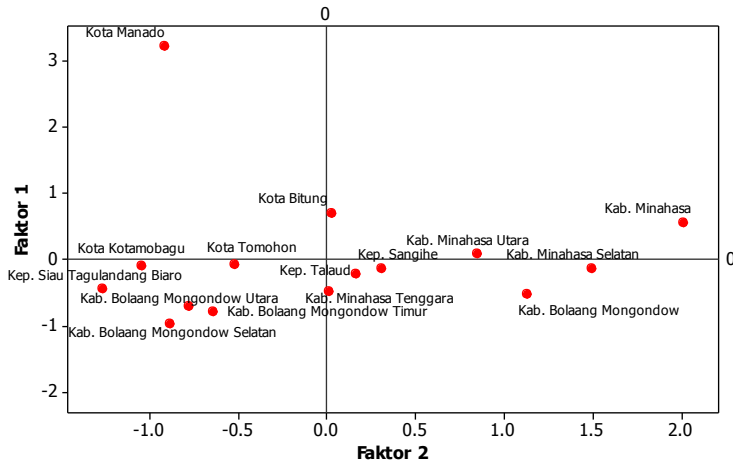
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua *eigenvalue* tersebut adalah mencapai 69,637%.

Tabel 4.15 *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Utara

Variabel	Faktor	
	1	2
PDRB_Keuangan	.961	
PDRB_Pengangkutan	.960	
PDRB_Konstruksi	.954	
PAD	.951	
PDRB_Perdagangan	.940	
PDRB_Jasa	.926	
Blj_Lgsg	.889	
PDRB_Listrik	.865	
Dana_Perimbangan	.824	
IPM	.775	
Rata2_Lama_Sklh	.775	
PDRB_Industri	.744	
Blj_Tdk_Lgsg	.731	.587
Jmlh_Penduduk	.731	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.643	
AMH		
PDRB_Pertanian		.903
Lain2_Pendapatan		.843
Pert_Ekonomi		-.732
PDRB_Pertambangan		.569
Jmlh_Industri		.543
AHH		

Pada tabel 4.15 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru di Provinsi Sulawesi Utara. Dari tabel 4.15 diatas didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel PDRB sektor keuangan dengan nilai 0,961. Pada faktor 2

diberikan oleh variabel PDRB sektor pertanian dengan nilai 0,903. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 4.19 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Utara

Dari gambar 4.19 dapat dilihat bahwa Kota Manado menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di kuadran dua itu dikarenakan terdapat KPwDN di Kota Manado yang mengindikasikan perekonomian di Kota Manado sangat tinggi. Untuk itu akan dibuat analisis pengelompokan tanpa memasukkan Kota Manado sebagai anggota yang bertujuan untuk mengetahui kab/kota mana yang sebaiknya dibangun KPwDN baru.

Dari hasil analisis faktor didapatkan dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 22 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan keempat faktor tersebut memiliki *eigen-value* lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan variansi dari semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil yang lebih terperinci dalam penentuan

banyaknya faktor dengan melihat *eigenvalue* serta varians kumulatif pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Utara tanpa KPwDN

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	9.888	44.944	44.944
2	3.442	15.646	60.590
3	2.600	11.820	72.409
4	1.759	7.994	80.403
⋮	⋮	⋮	⋮
21	-3.315E-16	-1.507E-15	100
22	-6.345E-16	-2.884E-15	100

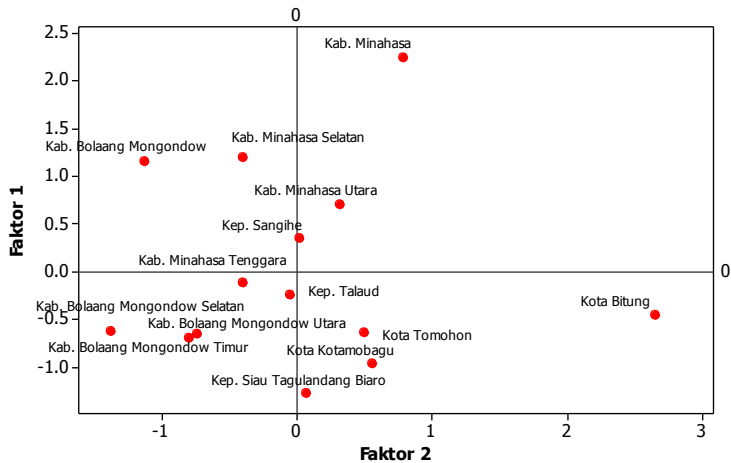
Berdasarkan pada Tabel 4.16 didapatkan *eigenvalue* komponen pertama sebesar 9.888 dengan proporsi keragaman yang dijelaskan sebesar 44.944%. Komponen kedua memberikan proporsi sebesar 3,442 dengan proporsi keragaman sebesar 15.646%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 2,600 dengan proporsi keragaman sebesar 11,820%. Komponen keempat memberikan proporsi sebesar 1,759 dengan proporsi keragaman sebesar 7,994%.

Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari keempat *eigenvalue* tersebut adalah mencapai 60,590%. Pada Tabel 4.16 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru di Provinsi Sulawesi Utara tanpa memasukkan daerah yang memiliki KPwDN. Pada tabel 4.17 didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan nilai 0,916. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel PDRB sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai 0,838. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi Utara tanpa KPwDN.

Tabel 4.17 *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Utara tanpa KPwDN

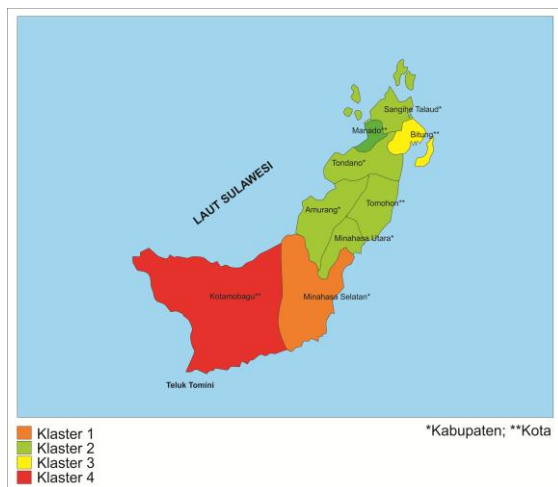
Variabel	Faktor	
	1	2
Lain2_Pendapatan	.916	
Blj_Tdk_Lgsg	.903	
PDRB_Pertanian	.863	
Dana_Perimbangan	.849	
PDRB_Perdagangan	.766	.531
PDRB_Konstruksi	.720	.573
PDRB_Jasa	.689	
Pert_Ekonomi	-.661	
PDRB_Pertambangan	.554	
AHH	.536	
Jmlh_Industri	.512	
PDRB_Listrik		.838
PDRB_Pengangkutan		.827
PDRB_Keuangan		.796
PDRB_Industri		.783
PAD		.772
Rata2_Lama_Sklh		.742
Pengeluaran_Pr.Kapita		.706
IPM		.705
Blj_Lgsg		.625
AMH		
Jmlh_Penduduk		

Dari Gambar 4.20 dapat dilihat bahwa Kabupaten Minahasa menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di kuadran satu, itu dikarenakan perekonomian di Kabupaten Minahasa menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil faktor skor diatas rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kabupaten Minahasa perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia karena perekonomian di Kabupaten Minahasa sangat tinggi. Pada Gambar 4.21 akan ditunjukkan peta dari Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 4.20 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Utara tanpa KPwDN

Berikut adalah peta dari Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan lokasi dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 4.21 Peta Provinsi Sulawesi Utara

4.4 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia

Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster.

Analisis faktor digunakan untuk mereduksi dimensi data yang mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data dengan beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit tanpa kehilangan informasi dari variabel awal.

KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor.

Bartlett's Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika *Sig.* berada dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor. Pada kasus ini *KMO* dan *Bartlett's Test* tidak muncul karena jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah observasi.

Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat secara visual melalui *Scree Plot*. Dari hasil analisis faktor didapatkan hasil bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 23 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki *eigen-value* lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai *eigen* menunjukkan variansi dari semua variabel yang dihitung oleh faktor.

Berdasarkan pada Tabel 4.18 didapatkan *eigenvalue* komponen pertama sebesar 13,211 dengan proporsi keragaman yang dijelaskan sebesar 57.438%. Komponen kedua memberikan proporsi sebesar 3.808 dengan proporsi keragaman sebesar 16,556%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 2,835 dengan proporsi keragaman sebesar 12,326%.

Tabel 4.18 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Tengah

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	13.211	57.438	57.438
2	3.808	16.556	73.994
3	2.835	12.326	86.320
⋮	⋮	⋮	⋮
22	-3.794E-16	-1.650E-15	100
23	-7.128E-16	-3.099E-15	100

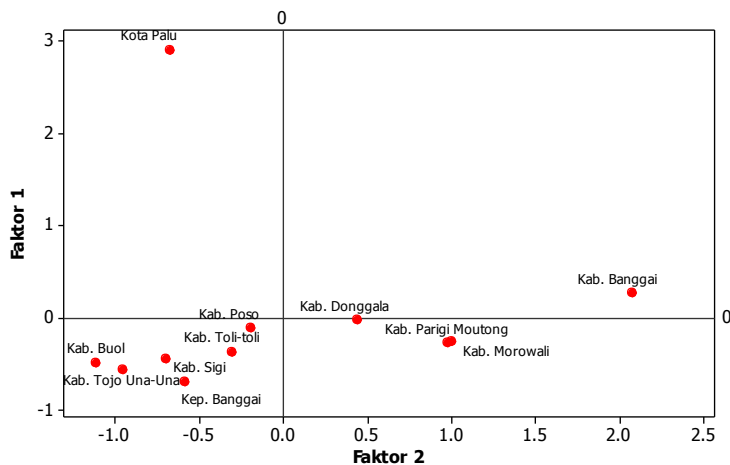
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua *eigenvalue* tersebut adalah mencapai 73,994%.

Tabel 4.19 *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Tengah

Variabel	Faktor	
	1	2
PDRB_Listrik	.983	
Jmlh_ATM	.981	
PAD	.981	
PDRB_Keuangan	.967	
Jmlh_Penduduk	.963	
PDRB_Jasa	.951	
IPM	.947	
Rata2_Lama_Sklh	.881	
AHH	.879	
PDRB_Pengangkutan	.856	
PDRB_Industri	.853	
Lain2_Pendapatan	.849	
PDRB_Konstruksi	.753	
Blj_Lgsg	.714	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.586	
PDRB_Perdagangan	.534	
AMH		
Dana_Perimbangan		.894
Pert_Ekonomi		.759

Variabel	Faktor 1	Faktor 2
Pnjg_Jalan		.676
Blj_Tdk_Lgsg	.656	.671
PDRB_Pertanian		.616
PDRB_Pertambangan		

Pada tabel 4.19 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari tabel 4.19 diatas didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel PDRB sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai 0,983. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel PDRB sektor pertanian dengan nilai 0,894. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 4. 22 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tengah

Dari gambar 4.22 dapat dilihat bahwa Kota Palu menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di kuadran dua, itu dikarenakan terdapat KPwDN di Kota Palu yang mengindikasikan perekonomian di Kota Palu sangat tinggi. Untuk itu akan dibuat analisis pengelompokan tanpa memasukkan Kota

Palu sebagai anggota yang bertujuan untuk mengetahui kab/kota mana yang sebaiknya dibangun KPwDN baru.

Dari hasil analisis faktor didapatkan hasil bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 23 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan keempat faktor tersebut memiliki *eigen-value* lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai *eigen* menunjukkan variansi dari semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan melihat *eigenvalue* serta variansi kumulatif pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Tengah tanpa KPwDN

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	10.127	44.030	44.030
2	5.510	23.956	67.986
3	2.764	12.018	80.004
4	1.513	6.578	91.775
⋮	⋮	⋮	⋮
22	-5.474E-16	-2.380E-15	100
23	-6.256E-16	-2.720E-15	100

Berdasarkan pada Tabel 4.20 didapatkan *eigenvalue* komponen pertama sebesar 10,127 dengan proporsi keragaman yang dijelaskan sebesar 44,030%. Komponen kedua memberikan proporsi sebesar 5,510 dengan proporsi keragaman sebesar 23.956%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 2,764 dengan proporsi keragaman sebesar 12,018%. Komponen keempat memberikan proporsi sebesar 1,513 dengan proporsi keragaman sebesar 6,578%.

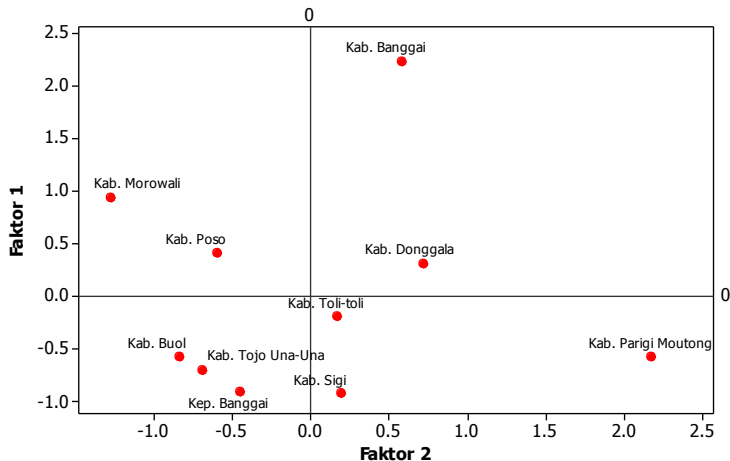
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini

dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua *eigenvalue* tersebut adalah mencapai 67,986%.

Tabel 4.21 *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Tengah tanpa KPwDN

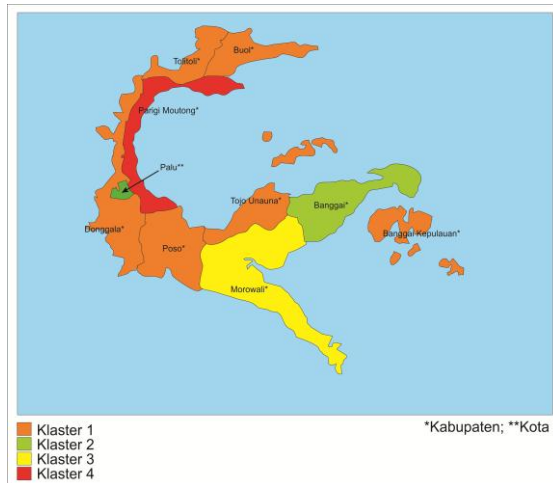
Variabel	Faktor	
	1	2
PAD	.955	
IPM	.901	
Pert_Ekonomi	.890	
Blj_Tdk_Lgsg	.865	
PDRB_Kuangan	.857	
Dana_Perimbangan	.823	
Pnjg_Jalan	.809	
AHH	.783	
PDRB_Listrik	.763	
PDRB_Konstruksi	.679	.624
Jmlh_ATM	.620	
Lain2_Pendapatan	.617	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.558	
Blj_Lgsg	.511	
PDRB_Pertambangan		
PDRB_Perdagangan		.934
PDRB_Pertanian		.933
PDRB_Pengangkutan		.923
Jmlh_Penduduk		.851
PDRB_Industri		.847
Rata2_Lama_Sklh		-.786
AMH		-.742
PDRB_Jasa		.722

Pada tabel 4.21 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru di Provinsi Sulawesi Tengah tanpa memasukkan daerah yang memiliki KPwDN. Pada tabel 4.21 didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel PAD dengan nilai 0,955. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai 0,934. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi Tengah tanpa KPwDN.



Gambar 4. 23 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tengah tanpa KPwDN

Dari gambar 4.23 dapat dilihat bahwa Kabupaten Banggai menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di kuadran satu, itu dikarenakan perekonomian di Kabupaten Banggai menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil faktor skor diatas rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kabupaten Banggai perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia karena perekonomian di Kabupaten Banggai sangat tinggi yang ditunjukkan pada kuadran satu. Berikut adalah peta dari Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 4.24 Peta Provinsi Sulawesi Tengah

4.5 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Indikator Pembangunan Ekonomi

Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster.

Analisis faktor digunakan untuk mereduksi dimensi data yang mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data dengan beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit tanpa kehilangan informasi dari variabel awal.

KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor.

Bartlett's Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika *Sig.* berada dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor.

Pada kasus ini *KMO* dan *Bartlett's Test* tidak muncul karena jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah observasi.

Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat secara visual melalui *Scree Plot*. Dari hasil analisis faktor didapatkan hasil bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 23 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki *eigen-value* lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai *eigen* menunjukkan variansi dari semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan melihat *eigenvalue* serta variansi kumulatif pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Tenggara

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	9.422	42.829	42.829
2	5.482	24.917	67.746
3	2.488	11.309	79.055
⋮	⋮	⋮	⋮
21	-3.752E-16	-1.705E-15	100
22	-3.912E-16	-1.778E-15	100

Berdasarkan pada Tabel 4.22 didapatkan *eigenvalue* komponen pertama sebesar 9,422 dengan proporsi keragaman yang dijelaskan sebesar 42.829%. Komponen kedua memberikan proporsi sebesar 5,482 dengan proporsi keragaman sebesar 24,917%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 2,488 dengan proporsi keragaman sebesar 11,309%.

Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua *eigenvalue* tersebut adalah mencapai 67,746%.

Pada Tabel 4.23 didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru

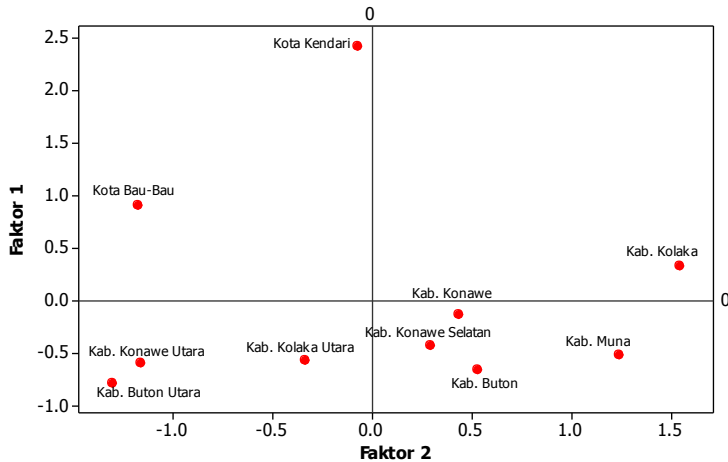
di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari tabel 4.23 diatas didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel IPM dengan nilai 0,960. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel dana perimbangan dengan nilai 0,918. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 4.23 Nilai *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Tenggara

Variabel	Faktor	
	1	2
IPM	.960	
Jmlh_Penduduk	.949	
Rata2_Lama_Sklh	.926	
PDRB_Listrik	.922	
PDRB_Kuangan	.916	
PDRB_Konstruksi	.855	
PDRB_Pengangkutan	.788	
PDRB_Perdagangan	.785	.545
AMH	.716	
PAD	.644	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.622	
PDRB_Jasa	.622	.575
AHH		
Dana_Perimbangan		.918
Pnjg_Jalan		.814
Blj_Tdk_Lgsg		.792
PDRB_Pertanian		.720
Lain2_Pendapatan		.693
PDRB_Pertambangan		.624
PDRB_Industri		.573
Blj_Lgsg		.511
Pert_Ekonomi		

Dari Gambar 4.25 dapat dilihat bahwa Kota Kendari menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di kuadran dua, itu dikarenakan terdapat KPwDN di Kota Kendari yang mengindikasikan perekonomian di Kota Kendari sangat tinggi. Untuk itu akan dibuat analisis pengelompokan tanpa memasukkan Kota Kendari sebagai anggota yang bertujuan untuk

mengetahui kab/kota mana yang sebaiknya dibangun KPwDN baru. Berikut adalah hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa memasukkan Kota Kendari.



Gambar 4. 25 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tenggara

Dari hasil analisis faktor didapatkan hasil bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 22 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan keempat faktor tersebut memiliki *eigen-value* lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan variansi dari semua variabel yang dihitung oleh faktor.

Berdasarkan pada Tabel 4.24 didapatkan *eigenvalue* komponen pertama sebesar 8,247 dengan proporsi keragaman yang dijelaskan sebesar 37,484%. Komponen kedua memberikan proporsi sebesar 5,977 dengan proporsi keragaman sebesar 27.167%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 2,572 dengan proporsi keragaman sebesar 11,692. Komponen keempat memberikan proporsi sebesar 1,667 dengan proporsi keragaman sebesar 7,578.

Tabel 4.24 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa KPwDN

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	8.247	37.484	37.484
2	5.977	27.167	64.651
3	2.572	11.692	76.343
4	1.667	7.578	83.921
⋮	⋮	⋮	⋮
21	-4.161E-16	-1.891E-15	100
22	-5.512E-16	-2.505E-15	100

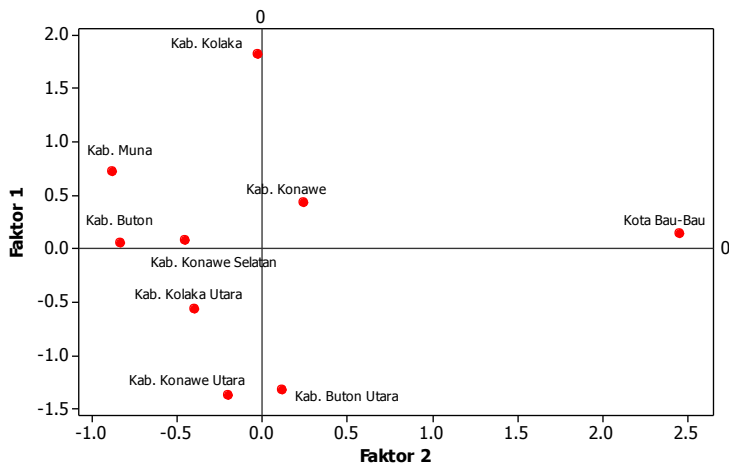
Pada tabel 4.24 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru di Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa memasukkan daerah yang memiliki KPwDN. Pada tabel 4.25 didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa dengan nilai 0,963. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel rata-rata lama sekolah dengan nilai 0,940. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa KPwDN.

Tabel 4.25 *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa KPwDN

Variabel	Faktor	
	1	2
PDRB_Keuangan	.963	
PDRB_Perdagangan	.927	
Blj_Tdk_Lgsg	.874	
Lain2_Pendapatan	.865	
PDRB_Listrik	.849	.501
PDRB_Jasa	.830	
Dana_Perimbangan	.817	
PDRB_Industri	.732	
PDRB_Pertambangan	.718	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.707	
Pert_Ekonomi	-.559	
PDRB_Pengangkutan		

Variabel	Faktor 1	Faktor 2
Rata2_Lama_Sklh		.940
IPM		.912
Jmlh_Penduduk		.843
PDRB_Konstruksi		.808
Blj_Lgsg		-.750
AHH		.739
PDRB_Pertanian		-.727
Pnjg_Jalan	.549	-.658
AMH		.556
PAD		

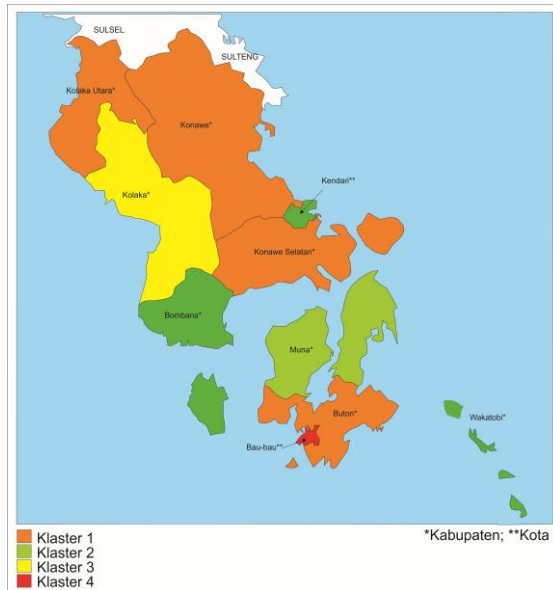
Dari hasil analisis faktor selanjutnya akan dibuat faktor skor dengan jumlah faktor sebanyak 2 faktor.



Gambar 4. 26 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa KPwDN

Dari Gambar 4.26 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kolaka menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di kuadran dua, itu dikarenakan perekonomian di Kabupaten Kolaka menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil faktor skor diatas rekomendasi yang dapat diberikan yaitu

Kabupaten Kolaka perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia karena perekonomian di Kabupaten Banggai sangat tinggi. Berikut adalah peta dari Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 4.27 Peta Provinsi Sulawesi Tenggara

4.6 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia

Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster.

Analisis faktor digunakan untuk mereduksi dimensi data yang mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data dengan beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit tanpa kehilangan informasi dari variabel awal.

KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum

dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor.

Bartlett's Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika *Sig.* berada dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor. Pada kasus ini *KMO* dan *Bartlett's Test* tidak muncul karena jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah observasi.

Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat secara visual melalui *Scree Plot*. Dari hasil analisis faktor didapatkan hasil bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk dari 22 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki *eigen-value* lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai *eigen* menunjukkan variansi dari semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan melihat *eigenvalue* serta variansi kumulatif pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26 *Total Variance Explained* Provinsi Sulawesi Barat

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	12.480	54.261	54.261
2	4.984	21.669	75.930
3	3.164	13.756	89.686
⋮	⋮	⋮	⋮
23	-4.952E-16	-2.153-15	100
23	-5.655E-16	-2.459-15	100

Berdasarkan pada Tabel 4.26 didapatkan *eigenvalue* komponen pertama sebesar 12,480 dengan proporsi keragaman yang dijelaskan sebesar 54.261%. Komponen kedua memberikan proporsi sebesar 4,984 dengan proporsi keragaman sebesar 21,669%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 3,164 dengan proporsi keragaman sebesar 13,756%.

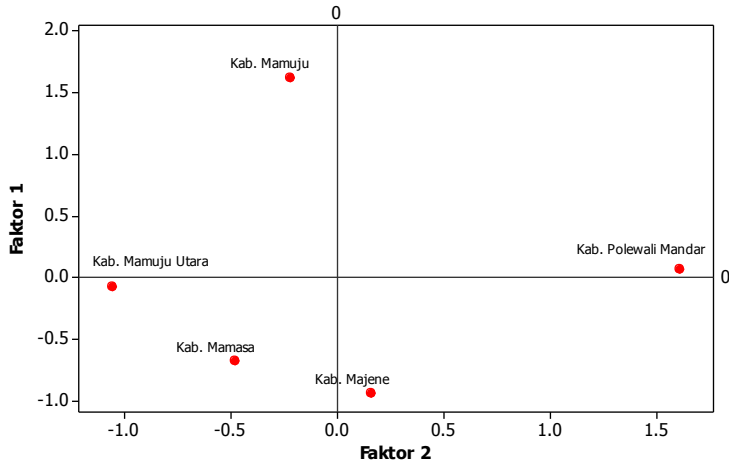
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen yang digunakan adalah komponen 1 dan 2. Hal ini dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari ketiga *eigenvalue* tersebut adalah mencapai 75,930%.

Tabel 4.27 *Loading Factor* Provinsi Sulawesi Barat

Variabel	Faktor	
	1	2
Blj_Lgsg	.981	
PDRB_Konstruksi	.971	
Jmlh_ATM	.919	
PDRB_Jasa	.915	
PDRB_Pertambangan	.910	
Pert_Ekonomi	.832	
PDRB_Pengangkutan	.814	
PAD	.783	.511
Dana_Perimbangan	.752	.559
PDRB_Keuangan	.672	.648
Pengeluaran_Pr.Kapita	-.598	.582
Rata2_Lama_Sklh		
Lain2_Pendapatan		.947
PDRB_Perdagangan		.935
Blj_Tdk_Lgsg		.900
PDRB_Listrik		.893
Jmlh_Penduduk		.881
PDRB_Pertanian		.832
Jmlh_Industri		.809
AHH		-.597
IPM		-.583
AMH		-.563
PDRB_Industri		-.557

Pada Tabel 4.27 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru di Provinsi Sulawesi Barat. Dari tabel 4.27 diatas didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel belanja langsung dengan nilai 0,981. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan nilai 0,947.

Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi Barat.



Gambar 4.28 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Barat

Dari Gambar 4.28 dapat dilihat bahwa Kabupaten Mamuju menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di kuadran satu, itu dikarenakan perekonomian di Kabupaten Mamuju menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil faktor skor diatas rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kabupaten Mamuju perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia karena perekonomian di Kabupaten Mamuju sangat tinggi dan belum ada KPwDN Bank Indonesia di Provinsi Barat. Berikut adalah peta dari Provinsi Sulawesi Barat.



Gambar 4.29 Peta Provinsi Sulawesi Barat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis statistika deskriptif didapatkan hasil pada Provinsi Gorontalo, penyumbang terbesar PDRB 9 sektor dan APBD adalah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Pada Provinsi Sulawesi Selatan penyumbang terbesar PDRB 9 sektor dan APBD adalah Kota Makassar. Pada Provinsi Sulawesi Utara penyumbang terbesar PDRB 9 sektor dan APBD adalah Kota Manado. Pada Provinsi Sulawesi Tengah penyumbang terbesar PDRB 9 sektor dan APBD adalah Kota Palu. Pada Provinsi Sulawesi Tenggara penyumbang PDRB 9 sektor dan APBD adalah Kota Kendari. Pada Provinsi Sulawesi Barat penyumbang terbesar PDRB 9 sektor dan APBD adalah Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hasil analisis pengelompokan pada Pulau Sulawesi dengan 25 variabel yang digunakan untuk menentukan lokasi yang perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia baru, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Pada provinsi Gorontalo, setelah dianalisis menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor skor yang menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Pohuwato tergolong tinggi. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kabupaten Pohuwato perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia.
- b. Pada provinsi Sulawesi Selatan, setelah dianalisis menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor skor yang menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Makassar sangat tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kota Makassar perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia.

- c. Pada provinsi Sulawesi Utara, setelah dianalisis menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor yang menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Minahasa tergolong tinggi. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kabupaten Minahasa perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia.
- d. Pada Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dianalisis menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor yang menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Banggai tergolong tinggi. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kabupaten Banggai perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia.
- e. Pada provinsi Sulawesi Tenggara, setelah dianalisis menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor yang menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Kolaka tergolong tinggi. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kabupaten Kolaka perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia.
- f. Pada provinsi Sulawesi Barat, setelah dianalisis menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor yang menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Mamuju tergolong tinggi. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kabupaten Mamuju perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian yang selanjutnya sebaiknya data yang akan digunakan sudah lengkap karena dalam penelitian ini masih ada yang belum lengkap dikarenakan sumber tidak menyediakan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Apabila seluruh data yang berkaitan dengan pembangun KPwDN Bank Indonesia tersedia, maka hasil analisis akan lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2015). *Seputar Pulau Sulawesi Indonesia*. Retrieved from gocelebes Website: <http://www.gocelebes.com/seputar-pulau-sulawesi-indonesia/>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2014). *Sulawesi Barat Dalam Angka 2014*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2014). *Sulawesi Utara Dalam Angka 2014*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. (2014). *Sulawesi Tengah Dalam Angka 2014*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2014). *Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2014*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2014). *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2014*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2014). *Gorontalo Dalam Angka 2014*.
- Bank Indonesia. (2015). *Term of Reference (Kerangka Acuan) Penelitian: Analisis Pengembangan Jaringan Distribusi Uang dan Layanan Kas Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2015). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Gorontalo*.
- Bank Indonesia. (2015). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Utara*.
- Bank Indonesia. (2015). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Bank Indonesia. (2015). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Bank Indonesia. (2015). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- Bank Indonesia. (2015). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Barat*.

- Ismail, M. (2010). Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Hukum*. No. 3 Vol. 17 Juli 2010:337-362.
- Johnson, R. and Wichern, D. (2007). *Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. (2015). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Sulawesi Utara Triwulan IV 2014*. Manado: Kantor Perwakilan Cabang Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. (2015). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2014*. Makassar: Kantor Perwakilan Cabang Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. (2015). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV 2014*. Palu: Kantor Perwakilan Cabang Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. (2015). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV 2014*. Kendari: Kantor Perwakilan Cabang Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. (2015). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Gorontalo Triwulan IV 2014*. Gorontalo: Kantor Perwakilan Cabang Bank Indonesia Provinsi Gorontalo.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. (2015). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Sulawesi Barat Triwulan IV 2014*. Mamuju: Kantor Perwakilan Cabang Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat.
- Morrison, D. F. (1976). *Multivariate Statistical Methods Third Edition*. USA: McGRAW-Hill Book Company.
- Hance, J (2015). *Facts On Sulawesi*. Retrieved from Portal Mongabay Indonesia Website: <http://www.mongabay.com/profiles/sulawesi.html>

- Hair, J. F. JR, Black, W. C, Babin, B. J, Anderson, R. E. (2010).
Multivariate Data Analysis 7th Edition.
- Pasal 34 UU No. 13 Tahun 1968
- Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992
- Pasal 37 UU No. 7 Tahun 1992
- Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999
- Rencher, A. C. (2002). *Methods of Multivariate Analysis 2nd Edition*. Wiley Series In Probability And Statistics.
- Sharma, S. (1996). *Applied Multivariate Techniques*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Walpole, R. E. (1992). *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Analisis Faktor Provinsi Gorontalo.....	81
Lampiran 2 Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Selatan.....	85
Lampiran 3 Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Utara	88
Lampiran 4 Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Tengah	93
Lampiran 5 Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Tengah	98
Lampiran 6 Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Barat.....	103

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN

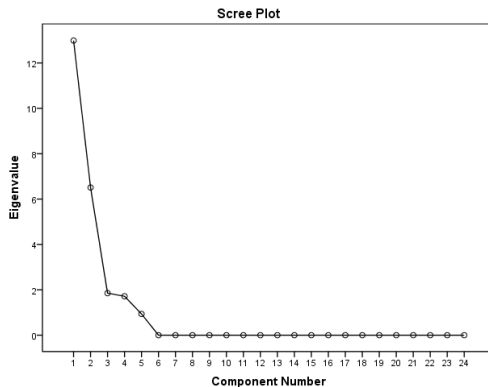
Lampiran 1. Analisis Faktor Provinsi Gorontalo

1.1 Total Variance Explained

Component	Total Variance Explained								
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	12.987	54.111	54.111	12.987	54.111	54.111	10.816	45.065	45.065
2	6.511	27.128	81.238	6.511	27.128	81.238	8.682	36.173	81.238
3	1.852	7.715	88.953						
4	1.715	7.147	96.101						
5	.936	3.899	100.000						
6	6.131E-16	2.555E-15	100.000						
7	5.204E-16	2.168E-15	100.000						
8	4.613E-16	1.922E-15	100.000						
9	3.513E-16	1.464E-15	100.000						
10	2.642E-16	1.101E-15	100.000						
11	2.514E-16	1.048E-15	100.000						
12	1.818E-16	7.576E-16	100.000						
13	1.035E-16	4.311E-16	100.000						
14	7.530E-17	3.138E-16	100.000						
15	2.016E-17	8.402E-17	100.000						
16	-2.101E-17	-8.752E-17	100.000						
17	-7.648E-17	-3.186E-16	100.000						
18	-1.387E-16	-5.778E-16	100.000						
19	-1.431E-16	-5.964E-16	100.000						
20	-2.468E-16	-1.028E-15	100.000						
21	-3.342E-16	-1.393E-15	100.000						
22	-4.093E-16	-1.705E-15	100.000						
23	-4.714E-16	-1.964E-15	100.000						
24	-6.146E-16	-2.561E-15	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

1.2 Scree Plot



1.3 Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Rata2_Lama_Sklh	.973	
Jmlh_Penduduk	.948	
PDRB_Listrik	.937	
PAD	.908	
PDRB_Perdagangan	.875	
IPM	.874	
AMH	.825	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.802	
PDRB_Konstruksi	.800	.506
Bilj_Lgsg	.796	
Pert_Ekonomi	.687	
PDRB_Pertanian	-.652	.557
Jmlh_Industri	.597	
Dana_Perimbangan		.970
PDRB_Jasa		.956
Bij_Tdk_Lgsg		.880
Pnjg_Jalan		.863
Jmlh_ATM		.856
PDRB_Kuangan	.506	.850
Lain2_Pendapatan		.823
PDRB_Industri		.801
PDRB_Pengangkutan	.644	.703
PDRB_Pertambangan		.667
AHH	-.503	.626

1.4 Matriks Korelasi

	PDRB_Pertanian	PDRB_Pertambangan	PDRB_Industri	PDRB_Listrik	PDRB_Konstruksi	PDRB_Perdagangan	PDRB_Pengangkutan	PDRB_Kuangan	PDRB_Jasa	Pert_Ekonomi
Correlation	1.000	.279	.168	-.558	-.360	-.312	-.162	.158	-.348	-.172
PDRB_Pertanian		.279	1.000	.371	.048	.296	-.106	.521	.506	.620
PDRB_Pertambangan			.279	.371	1.000	.523	.726	.662	.804	.894
PDRB_Industri				.371	.371	1.000	.523	.726	.662	.894
PDRB_Listrik					.371	.371	1.000	.523	.726	.662
PDRB_Konstruksi						.371	.371	1.000	.523	.726
PDRB_Perdagangan							.371	.371	1.000	.523
PDRB_Pengangkutan								.371	.371	1.000
PDRB_Kuangan									.371	.371
PDRB_Jasa										.371
Pert_Ekonomi										
PAD										
Dana_Perimbangan										
Lain2_Pendapatan										
Bilj_Lgsg										
Jmlh_Industri										
Jmlh_Penduduk										
Pnjg_Jalan										
AHH										
IPM										
Pengeluaran_Pr.Kapita										
AMH										
Rata2_Lama_Sklh										
Jmlh_ATM										

a. This matrix is not positive definite.

1.4 Matriks Korelasi (lanjutan)

n Matrix*

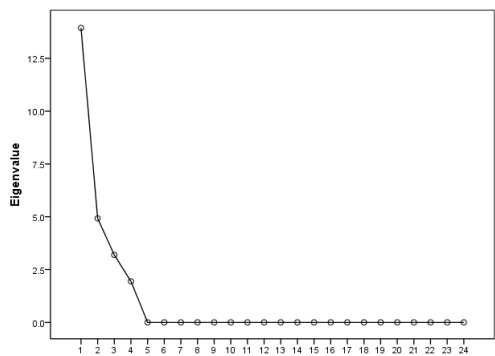
PAD	Dana Perimbangan	Lain2 Pendapatan	Bl. Tdk Lgs	Bl. Lgs	Jmlh_Industri	Jmlh_Penduduk	Prjg_Jalan	AHH	IPM	Pengeluaran- Pr_Kapita	AHH	Rata2 Lama_Skh	Jmlh_ATM
-504	617	240	.173	-.078	.039	-.705	.800	.665	-.459	-.380	-.633	-.697	.080
.024	.528	.507	.471	.001	.436	-.026	.561	.141	-.099	.112	-.429	-.140	.710
.543	.794	.911	.950	.687	.665	.457	.438	.451	.705	.510	.353	.520	.816
.995	.229	.231	.589	.762	.465	.977	-.277	-.433	.743	.588	.616	.905	.596
.935	.504	.523	.821	.686	.471	.890	.064	-.129	.693	.476	.428	.796	.837
.972	.451	.341	.721	.874	.566	.888	-.083	-.277	.731	.581	.541	.826	.681
.807	.667	.674	.911	.605	.514	.739	.300	.046	.586	.407	.238	.635	.956
.699	.866	.735	.976	.693	.581	.554	.497	.239	.523	.359	.140	.480	.945
.493	.944	.769	.952	.475	.430	.331	.720	.425	.292	.123	-.128	.227	.946
.623	.265	.146	.405	.729	.828	.963	-.163	-.536	.465	.734	.319	.518	.534
1.000	.285	.241	.822	.767	.426	.962	-.218	-.380	.720	.531	.581	.681	.610
.285	1.000	.732	.872	.446	.401	.078	.832	.585	.164	.025	-.233	.016	.797
.241	.732	1.000	.850	.345	.507	.208	.576	.659	.517	.332	.152	.285	.761
.622	.872	.850	1.000	.621	.533	.502	.547	.402	.559	.331	.167	.466	.930
.767	.446	.345	.621	1.000	.760	.662	-.116	-.167	.761	.755	.639	.723	.484
.426	.401	.507	.533	.760	1.000	.384	-.017	-.116	.663	.883	.470	.497	.520
.962	.078	.208	.502	.662	.384	1.000	-.302	-.456	.774	.592	.692	.950	.513
-.218	.832	.576	.547	-.116	-.017	-.392	1.000	.763	-.325	-.436	-.665	-.481	.530
-.380	.585	.659	.402	-.187	-.116	-.456	.763	1.000	-.095	-.345	-.316	-.373	.219
.720	.164	.517	.559	.761	.663	.774	-.325	-.095	1.000	.846	.906	.921	.413
.531	.025	.332	.331	.755	.883	.592	-.436	-.345	.848	1.000	.800	.751	.284
.581	-.233	.152	.167	.639	.470	.692	-.665	-.316	.906	.800	1.000	.875	.007
.881	.016	.285	.466	.723	.497	.950	-.481	-.373	.921	.751	.875	1.000	.403
.610	.797	.761	.930	.484	.520	.513	.530	.219	.413	.294	.007	.403	1.000

1.5 Total Variance Explained tanpa memasukkan KPwDN

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	13.941	58.088	58.088	13.941	58.088	58.088	13.675	56.979	56.979
2	4.923	20.514	78.601	4.923	20.514	78.601	5.189	21.622	78.601
3	3.194	13.308	91.909						
4	1.942	8.091	100.000						
5	6.378E-16	2.657E-15	100.000						
6	4.971E-16	2.071E-15	100.000						
7	4.511E-16	1.879E-15	100.000						
8	3.386E-16	1.411E-15	100.000						
9	3.000E-16	1.250E-15	100.000						
10	2.579E-16	1.075E-15	100.000						
11	1.852E-16	7.719E-16	100.000						
12	1.259E-16	5.245E-16	100.000						
13	1.136E-16	4.733E-16	100.000						
14	1.402E-17	5.842E-17	100.000						
15	-4.940E-18	-2.058E-17	100.000						
16	-1.187E-16	-4.946E-16	100.000						
17	-1.475E-16	-6.146E-16	100.000						
18	-1.634E-16	-6.809E-16	100.000						
19	-2.430E-16	-1.013E-15	100.000						
20	-2.733E-16	-1.139E-15	100.000						
21	-3.394E-16	-1.414E-15	100.000						
22	-4.064E-16	-1.693E-15	100.000						
23	-5.268E-16	-2.195E-15	100.000						
24	-6.943E-16	-2.893E-15	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

1.6 Scree Plot tanpa memasukkan KPwDN



1.7 Rotated Component Matrix tanpa memasukkan KPwDN

Rotated Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
PDRB_Jasa	.998	
PDRB_Konstruksi	.988	
PDRB_Keuangan	.986	
Dana_Perimbangan	.977	
Pnjg_Jalan	.973	
PDRB_Pengangkutan	.965	
Jmlh_ATM	.953	
Bij_Tdk_Lgsg	.949	
PDRB_Pertanian	.865	
Jmlh_Penduduk	.810	
PDRB_Listrik	.802	
PAD	.798	
PDRB_Industri	.798	.542
PDRB_Perdagangan	.796	
Lain2_Pendapatan	.724	
PDRB_Pertambangan	.673	
AHH	.637	
Pert_Ekonomi		
IPM		.951
Rata2_Lama_Sklh		.913
Pengeluaran_Pr.Kapita		.899
AMH	-.526	.814
Jmlh_Industri		.775
Bij_Lgsg		.698

1.8 Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN

Correlation s										
Correlation	PDRB_Pertanian	PDRB_Pertambangan	PDRB_Industri	PDRB_Listrik	PDRB_Konstruksi	PDRB_Perdagangan	PDRB_Pengangkutan	PDRB_Keluangan	PDRB_Jasa	Pert_Ekonomi
PDRB_Pertanian	1.000	.346	.760	.927	.785	.984	.717	.808	.847	.408
PDRB_Pertambangan	.346	1.000	.438	.454	.704	.327	.799	.830	.867	.613
PDRB_Industri	.760	.438	1.000	.519	.795	.664	.786	.869	.821	.198
PDRB_Listrik	.927	.454	.519	1.000	.705	.963	.654	.814	.762	.608
PDRB_Konstruksi	.785	.704	.795	.705	1.000	.697	.987	.963	.964	.236
PDRB_Perdagangan	.984	.327	.664	.963	.697	1.000	.631	.844	.767	.520
PDRB_Pengangkutan	.717	.799	.786	.654	.987	.631	1.000	.939	.973	.304
PDRB_Keluangan	.808	.830	.869	.814	.963	.844	.939	1.000	.985	.365
PDRB_Jasa	.847	.867	.821	.762	.994	.767	.973	.985	1.000	.276
Pert_Ekonomi	.408	.613	.198	.608	.236	.520	.304	.365	.276	1.000
PAD	.937	.289	.510	.954	.710	.944	.619	.799	.766	.347
Dana_Permimbangan	.936	.532	.858	.827	.947	.870	.904	.992	.976	.290
Lain2_Pendapatan	.533	.525	.941	.280	.772	.404	.797	.769	.763	.059
Bi_Tdk_Lqsg	.835	.563	.938	.662	.952	.735	.929	.971	.964	.190
Bi_Lqsg	.767	.049	.595	.690	.292	.819	.250	.539	.388	.573
Jmih_Industri	.484	.495	.600	.461	.308	.529	.374	.484	.359	.804
Jmih_Penduduk	.406	.484	.303	.389	.305	.889	.910	.764	.841	.060
Phjg_Jalan	.795	.595	.760	.687	.988	.686	.951	.939	.981	.103
AHH	.521	.132	.835	.198	.685	.364	.637	.865	.682	-.364
IPM	.215	-.090	.649	-.074	.060	.165	.079	.214	.102	.056
Pengeluaran_Pi_Kapita	.088	.181	.349	.031	-.118	.142	-.035	.063	-.073	.599
AMH	-.256	-.552	.076	-.463	-.544	-.247	-.534	-.387	-.501	-.136
Rata2_Lama_Sklh	-.063	-.290	.399	-.335	-.229	-.099	-.203	-.088	-.195	.076
Jmih_ATM	.698	.840	.770	.653	.974	.820	.997	.928	.959	.362

a. This matrix is not positive definite.

1.8 Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN (lanjutan)

Correlation Matrix ^a										
ni	PAD	Dana_Permimbangan	Lain2_Pendapatan	Bi_Tdk_Lqsg	Bi_Lqsg	Jmih_Industri	Jmih_Penduduk	Phjg_Jalan	AHH	IPM
26	.937	.936	.533	.835	.767	.484	.444	.785	.521	.215
13	.289	.532	.525	.563	.049	.495	.684	.595	.132	-.090
38	.510	.858	.941	.938	.595	.600	.717	.760	.835	.649
29	.954	.827	.280	.662	.690	.461	.303	.687	.198	-.074
36	.710	.947	.772	.952	.292	.308	.889	.986	.685	.060
20	.844	.870	.404	.735	.819	.509	.305	.886	.364	.165
24	.619	.904	.797	.929	.250	.374	.910	.951	.637	.079
35	.799	.992	.769	.971	.539	.484	.764	.939	.665	.214
76	.766	.976	.763	.964	.388	.359	.841	.981	.682	.102
30	.347	.290	.059	.190	.573	.804	-.050	.103	-.364	.056
17	1.000	.845	.267	.678	.615	.235	.329	.741	.340	-.117
30	.845	1.000	.736	.965	.556	.415	.730	.943	.695	.201
59	.287	.736	1.000	.885	.312	.484	.846	.730	.962	.612
30	.676	.965	.885	1.000	.467	.433	.841	.937	.817	.347
73	.615	.556	.312	.467	1.000	.762	-.070	.246	.206	.564
24	.235	.415	.484	.433	.762	1.000	.123	.173	.083	.830
50	.329	.730	.846	.841	-.070	.123	1.000	.877	.764	.105
33	.741	.943	.730	.937	.246	.173	.877	1.000	.729	.008
34	.340	.686	.862	.817	.206	.083	.764	.729	1.000	.501
56	-.117	.201	.612	.347	.664	.830	.105	.006	.501	1.000
39	-.189	-.005	.298	.050	.597	.865	-.174	-.250	-.079	.758
36	-.480	-.377	.042	-.266	.321	.309	-.455	-.569	.041	.801
76	-.368	-.097	.397	.082	.397	.478	-.115	-.274	.323	.954
32	.596	.884	.785	.909	.251	.415	.896	.926	.589	.074

Lampiran 2. Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Selatan

2.1 KMO and Bartlett's Test

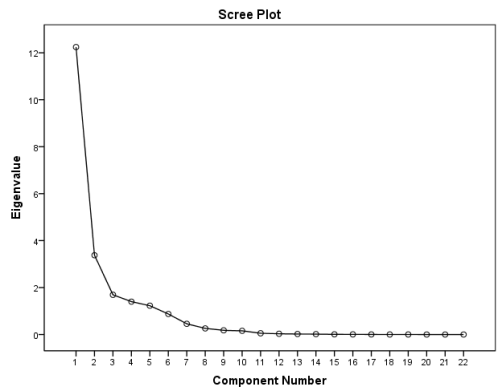
KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.414
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1128.136
	df	231
	Sig.	.000

2.2 Total Variance Explained

Component	Total Variance Explained								
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	12.244	55.656	55.656	12.244	55.656	55.656	11.426	51.936	51.936
2	3.376	15.346	71.002	3.376	15.346	71.002	4.195	19.066	71.002
3	1.691	7.687	78.690						
4	1.399	6.361	85.051						
5	1.227	5.577	90.628						
6	.874	3.975	94.603						
7	.455	2.069	96.672						
8	.261	1.185	97.857						
9	.177	.807	98.664						
10	.156	.710	99.374						
11	.052	.238	99.613						
12	.031	.141	99.754						
13	.021	.094	99.848						
14	.016	.071	99.918						
15	.008	.035	99.953						
16	.006	.028	99.981						
17	.002	.010	99.991						
18	.001	.004	99.995						
19	.001	.004	99.999						
20	.000	.001	100.000						
21	5.977E-5	.000	100.000						
22	4.420E-6	2.009E-5	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

2.3 Scree Plot



2.4 Rotated Component Matrix

Rotated Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
PDRB_Konstruksi	.948	
Bij_Lgsg	.944	
PDRB_Listrik	.940	
PDRB_Kuangan	.939	
PDRB_Perdagangan	.931	
PDRB_Pengangkutan	.929	
Jmlh_ATM	.923	
PAD	.922	
Dana_Perimbangan	.904	
Jmlh_Penduduk	.884	
PDRB_Industri	.865	
Bij_Tdk_Lgsg	.864	
Lain2_Pendapatan	.854	
Pengeluaran_Pr.Kapita		
PDRB_Jasa		
Rata2_Lama_Sklh		.826
AMH		.732
IPM		.731
PDRB_Pertanian		-.730
Pert_Ekonomi		.673
AHH		
PDRB_Pertambangan		

2.5 Matriks Korelasi

Correlatic										
	PDRB_Pertanian	PDRB_Pertambangan	PDRB_Industri	PDRB_Listrik	PDRB_Konstruksi	PDRB_Perdagangan	PDRB_Pengangkutan	PDRB_Kuangan	PDRB_Jasa	
Correlation										
PDRB_Pertanian	1.000	.032	-.234	-.176	-.115	-.191	-.221	-.195	-.108	
PDRB_Pertambangan	.032	1.000	-.047	-.052	-.090	-.071	-.056	-.061	-.053	
PDRB_Industri	-.234	-.047	1.000	.877	.875	.879	.887	.884	.083	
PDRB_Listrik	-.176	-.052	.877	1.000	.982	.983	.996	.997	.040	
PDRB_Konstruksi	-.115	-.090	.875	.982	1.000	.980	.983	.987	.004	
PDRB_Perdagangan	-.191	-.071	.879	.993	.980	1.000	.996	.995	.028	
PDRB_Pengangkutan	-.221	-.056	.887	.996	.983	.996	1.000	.998	.041	
PDRB_Kuangan	-.195	-.061	.884	.997	.987	.995	.998	1.000	.039	
PDRB_Jasa	-.109	-.053	.083	.040	.004	.028	.041	.039	1.000	
Pert_Ekonomi	-.604	.405	.190	.196	.134	.207	.222	.202	.184	
PAD	-.194	.160	.890	.955	.931	.946	.957	.957	.158	
Dana_Perimbangan	.420	-.122	.693	.723	.761	.713	.700	.720	.097	
Lain2_Pendapatan	.288	.088	.622	.696	.708	.675	.672	.690	.365	
Bij_Tdk_Lgsg	.459	-.136	.620	.662	.709	.650	.637	.661	.114	
Bij_Lgsg	-.064	.147	.872	.936	.917	.923	.930	.932	.168	
Jmlh_Penduduk	-.325	-.085	.872	.974	.956	.975	.984	.982	.033	
AHH	-.088	-.092	.062	.195	.162	.219	.199	.200	.133	
IPM	-.208	.028	.374	.492	.493	.503	.504	.508	.042	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.208	-.070	.310	.392	.379	.370	.370	.389	.171	
AMH	-.222	.187	.337	.358	.389	.364	.381	.378	-.150	
Rata2_Lama_Sklh	-.463	.065	.462	.584	.557	.583	.598	.595	-.054	
Jmlh_ATM	-.235	-.064	.887	.994	.981	.995	.998	.997	.055	

2.5 Matriks Korelasi (lanjutan)

tion Matriks

Pert. Ekonomi	PAD	Dana Perimbangan	Lain2 Pendaptan	Bij. Tdk Lgsq	Bij. Lgsq	Jmih Penduduk	AHH	IPM	Pengeluaran. Pr Kapita	AMH	Rata2 Lama Sth	Jmih. ATM
-604	-194	420	288	459	-064	-325	-088	-208	208	-222	-463	-235
405	160	-122	088	-136	147	-085	-092	028	-070	187	065	-064
190	890	693	822	820	872	872	062	374	310	337	462	887
198	955	723	696	862	936	974	195	482	392	358	584	994
134	931	761	708	709	917	956	182	493	379	389	557	981
207	946	713	675	650	923	975	219	503	370	364	583	995
222	957	700	672	637	930	984	199	504	370	381	598	998
202	957	720	690	661	932	982	200	508	389	378	595	997
184	158	097	365	114	168	033	133	042	171	-150	-054	055
1000	310	-219	-037	-312	278	257	115	308	090	326	383	223
310	1000	706	762	652	672	939	177	507	414	399	583	954
-219	706	1000	873	979	788	618	-025	161	458	070	108	885
-037	762	873	1000	889	612	607	176	267	415	066	200	861
-312	652	979	889	1000	712	566	009	162	444	049	102	824
278	972	788	812	712	1000	887	095	385	428	281	436	923
257	939	618	607	566	887	1000	216	536	377	398	648	985
115	177	-025	176	009	095	216	1000	721	-052	376	489	212
308	507	161	267	162	385	536	721	1000	369	843	869	516
090	414	458	415	444	428	377	-052	369	1000	182	186	374
326	399	070	066	049	281	398	376	843	182	1000	830	385
383	583	108	200	102	436	648	489	869	186	830	1000	604
223	954	685	661	624	923	985	212	516	374	385	604	1000

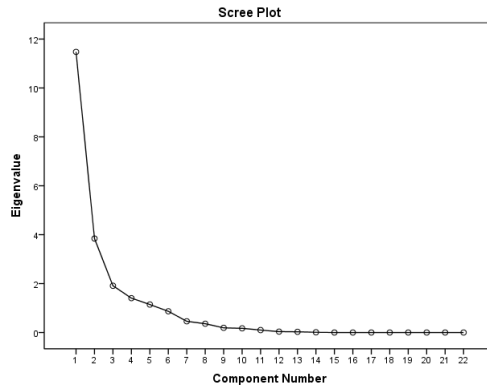
Lampiran 3. Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Utara

3.1 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	11.477	52.169	52.169	11.477	52.169	52.169	11.447	52.030	52.030
2	3.843	17.468	69.637	3.843	17.468	69.637	3.874	17.607	69.637
3	1.911	8.686	78.324						
4	1.406	6.389	84.712						
5	1.144	5.199	89.912						
6	.867	3.939	93.851						
7	.459	2.085	95.936						
8	.359	1.632	97.568						
9	.191	.867	98.435						
10	.171	.777	99.211						
11	.100	.455	99.666						
12	.036	.163	99.829						
13	.028	.127	99.956						
14	.010	.044	100.000						
15	2.954E-16	1.343E-15	100.000						
16	2.797E-16	1.271E-15	100.000						
17	5.968E-17	2.713E-16	100.000						
18	-3.674E-17	-1.670E-16	100.000						
19	-5.560E-17	-2.527E-16	100.000						
20	-1.010E-16	-4.592E-16	100.000						
21	-3.072E-16	-1.396E-15	100.000						
22	-4.361E-16	-1.982E-15	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

3.2 Scree Plot



3.3 Rotated Component Matrix

Rotated Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
PDRB_Keluaran	.961	
PDRB_Pengangkutan	.960	
PDRB_Konstruksi	.954	
PAD	.951	
PDRB_Perdagangan	.940	
PDRB_Jasa	.926	
Bij_Lgsg	.889	
PDRB_Listrik	.865	
Dana_Perimbangan	.824	
IPM	.775	
Rata2_Lama_Sklh	.775	
PDRB_Industri	.744	
Bij_Tdk_Lgsg	.731	.587
Jmlh_Penduduk	.731	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.643	
AMH		
PDRB_Pertanian		.903
Lain2_Pendapatan		.843
Pert_Ekonomi		-.732
PDRB_Pertambangan		.569
Jmlh_Industri		.543
AHH		

3.4 Matriks Korelasi

		Correlation										F
		PDRB Pertanian	PDRB Pertambangan	PDRB Industri	PDRB Listrik	PDRB Konstruksi	PDRB Perdagangan	PDRB Pengangkutan	PDRB Keuangan	PDRB Jasa		
Correlation	PDRB Pertanian	1.000	.423	.418	.294	.195	-.080	.047	-.069	-.105		
	PDRB Pertambangan	.423	1.000	-.050	-.128	.017	-.196	-.238	-.275	-.207		
	PDRB Industri	.418	-.050	1.000	.960	.740	.571	.808	.642	.527		
	PDRB Listrik	.294	-.128	.960	1.000	.846	.729	.900	.793	.690		
	PDRB Konstruksi	.195	.017	.740	.846	1.000	.928	.922	.916	.911		
	PDRB Perdagangan	-.080	-.196	.571	.729	.928	1.000	.934	.985	.995		
	PDRB Pengangkutan	.047	-.238	.808	.900	.922	.934	1.000	.961	.911		
	PDRB Keuangan	-.069	-.275	.642	.793	.916	.985	.961	1.000	.980		
	PDRB_Jasa	-.105	-.207	.527	.690	.911	.995	.911	.980	1.000		
	Pert_Ekonomi	-.493	-.430	.151	.252	.180	.344	.362	.372	.362		
	PAD	-.079	-.253	.627	.774	.909	.986	.961	.989	.978		
	Dana_Perimbangan	.448	-.032	.631	.712	.837	.753	.746	.759	.731		
	Lain2_Pendapatan	.812	.431	.531	.494	.566	.319	.359	.305	.291		
	BiL_Tdk_Lgsg	.541	.079	.545	.629	.781	.686	.632	.663	.651		
	BiL_Lgsg	-.144	-.302	.638	.751	.800	.878	.910	.898	.852		
	Jmlh_Industri	.593	.022	.040	-.052	-.059	-.185	-.161	-.160	-.152		
	Jmlh_Penduduk	-.363	-.398	.356	.494	.610	.702	.655	.744	.745		
	AHH	.178	.222	.109	.154	.366	.287	.197	.261	.300		
	IPM	.032	-.108	.510	.595	.685	.587	.600	.611	.585		
	Pengeluaran_PrKapita	-.019	-.357	.452	.529	.471	.454	.525	.518	.456		
	AMH	-.156	.243	.320	.339	.424	.304	.316	.287	.273		
	Rata2_Lama_Skth	-.037	-.104	.583	.658	.731	.606	.639	.619	.592		

a. This matrix is not positive definite.

3.4 Matriks Korelasi (lanjutan)

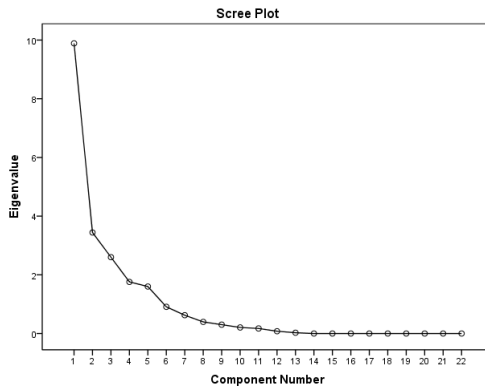
Correlation Matrix ^a													
ia	Pert. Ekonomi	PAD	Dana Perimbangan	Lain2 Pendapatan	BiL_Tdk_Lgsg	BiL_Lgsg	Jmlh_Industri	Jmlh_Penduduk	AHH	IPM	Pengeluaran_Prkapita	AMH	Rata2 Lama_Skth
35	-.493	-.079	.448	.812	.541	-.144	.593	-.363	.178	.032	-.019	-.156	-.037
37	-.430	-.253	-.032	.431	.079	-.302	.022	-.398	.222	-.108	-.357	.243	-.104
37	.151	.627	.631	.531	.545	.638	.040	.356	.109	.510	.452	.320	.583
30	.252	.774	.712	.494	.629	.751	-.052	.494	.154	.595	.529	.339	.658
11	.180	.909	.837	.566	.781	.800	-.059	.610	.366	.685	.471	.424	.731
35	.344	.986	.753	.319	.666	.878	-.185	.702	.287	.587	.454	.304	.806
11	.362	.961	.746	.359	.632	.910	-.161	.855	.197	.600	.525	.316	.839
30	.372	.989	.759	.305	.663	.898	-.160	.744	.261	.611	.518	.287	.819
30	.362	.978	.731	.291	.651	.852	-.152	.745	.300	.585	.456	.273	.592
32	1.000	.377	-.227	-.386	-.250	.311	-.174	.422	-.517	-.149	.036	.006	.061
38	.377	1.000	.743	.283	.643	.908	-.221	.702	.269	.602	.525	.250	.589
31	-.227	.743	1.000	.745	.964	.662	.152	.379	.548	.696	.546	.188	.552
31	-.386	.283	.745	1.000	.837	.175	.417	-.092	.326	.344	.211	.184	.275
31	-.250	.643	.964	.837	1.000	.491	.228	.300	.524	.627	.484	.174	.480
32	.311	.908	.662	.175	.491	1.000	-.279	.610	.163	.595	.571	.316	.808
32	-.174	-.221	.152	.417	.228	-.279	1.000	-.120	.124	-.120	-.199	-.276	-.140
15	.422	.702	.379	-.092	.300	.610	-.120	1.000	.246	.634	.508	.365	.685
30	-.517	.269	.548	.326	.524	.163	.124	.246	1.000	.642	.235	.124	.369
35	-.149	.602	.696	.344	.627	.595	-.120	.634	.642	1.000	.799	.502	.873
36	.036	.525	.546	.211	.494	.571	-.199	.508	.235	.799	1.000	.176	.590
33	.006	.250	.188	.194	.174	.316	-.276	.365	.124	.502	.176	1.000	.744
32	.061	.589	.552	.275	.480	.608	-.140	.685	.369	.873	.590	.744	1.000

3.5 Total Variance Explained tanpa memasukkan KPwDN

Component	Total Variance Explained								
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	9.888	44.944	44.944	9.888	44.944	44.944	6.745	30.659	30.659
2	3.442	15.646	60.590	3.442	15.646	60.590	6.585	29.931	60.590
3	2.600	11.820	72.409						
4	1.759	7.994	80.403						
5	1.601	7.276	87.680						
6	.909	4.131	91.810						
7	.623	2.834	94.644						
8	.396	1.800	96.444						
9	.301	1.370	97.814						
10	.206	.936	98.750						
11	.172	.782	99.533						
12	.077	.350	99.883						
13	.026	.117	100.000						
14	4.022E-16	1.828E-15	100.000						
15	3.407E-16	1.549E-15	100.000						
16	1.377E-17	6.261E-17	100.000						
17	5.564E-20	2.529E-19	100.000						
18	-9.412E-17	-4.278E-16	100.000						
19	-1.153E-16	-5.243E-16	100.000						
20	-2.376E-16	-1.080E-15	100.000						
21	-3.315E-16	-1.507E-15	100.000						
22	-6.345E-16	-2.884E-15	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

3.6 Scree Plot tanpa memasukkan KPwDN



3.7 Rotated Component Matrix tanpa KPwDN

Rotated Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
Lain2_Pendapatan	.916	
Blj_Tdk_Lgsg	.903	
PDRB_Pertanian	.863	
Dana_Perimbangan	.849	
PDRB_Perdagangan	.766	.531
PDRB_Konstruksi	.720	.573
PDRB_Jasa	.689	
Pert_Ekonomi	-.661	
PDRB_Pertambangan	.554	
AHH	.536	
Jmlh_Industri	.512	
PDRB_Listrik		.838
PDRB_Pengangkutan		.827
PDRB_Kuangan		.796
PDRB_Industri		.783
PAD		.772
Rata2_Lama_Sklh		.742
Pengeluaran_Pr.Kapita		.706
IPM		.705
Blj_Lgsg		.625
AMH		
Jmlh_Penduduk		

3.8 Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN

		Correlation									
		PDRB_Pertanian	PDRB_Pertambangan	PDRB_Industri	PDRB_Listrik	PDRB_Konstruksi	PDRB_Perdagangan	PDRB_Pengangkutan	PDRB_Kuangan	PDRB_Jasa	
Correlation	PDRB_Pertanian	1.000	.390	.605	.570	.734	.691	.555	.502	.533	
	PDRB_Pertambangan	.390	1.000	.096	.064	.501	.408	.017	-.055	.338	
	PDRB_Industri	.605	.096	1.000	.969	.720	.597	.988	.761	.309	
	PDRB_Listrik	.570	.064	.969	1.000	.743	.684	.969	.853	.397	
	PDRB_Konstruksi	.734	.501	.720	.743	1.000	.923	.868	.659	.728	
	PDRB_Perdagangan	.691	.408	.597	.684	.923	1.000	.577	.767	.837	
	PDRB_Pengangkutan	.555	.017	.988	.969	.668	.577	1.000	.787	.279	
	PDRB_Kuangan	.502	-.055	.761	.853	.659	.767	.787	1.000	.651	
	PDRB_Jasa	.533	.338	.309	.397	.728	.837	.279	.651	1.000	
	Pert_Ekonomi	-.458	-.361	-.067	-.028	-.386	-.432	-.049	-.144	-.312	
	PAD	.544	.051	.778	.839	.641	.691	.836	.821	.485	
	Dana_Perimbangan	.789	.201	.474	.501	.706	.790	.472	.636	.618	
	Lain2_Pendapatan	.881	.506	.517	.504	.815	.815	.470	.518	.640	
	Blj_Tdk_Lgsg	.796	.284	.381	.430	.719	.840	.378	.608	.724	
	Blj_Lgsg	.083	-.140	.514	.507	.167	.051	.547	.339	-.254	
	Jmlh_Industri	.574	-.041	.174	.124	.263	.197	.098	.216	.377	
	Jmlh_Penduduk	-.316	-.303	.018	.065	.004	.027	.040	.315	.360	
	AHH	.233	.301	.001	.015	.350	.394	-.008	.187	.463	
	IPM	.161	.036	.350	.406	.559	.557	.379	.530	.535	
	Pengeluaran_Pr.Kapita	.072	-.280	.318	.381	.259	.324	.401	.521	.331	
	AMH	-.109	.336	.231	.236	.410	.268	.204	.158	.119	
	Rata2_Lama_Sklh	.089	.050	.437	.484	.824	.518	.427	.459	.416	

a. This matrix is not positive definite.

3.8 Matriks Korelasi tanpa Memasukkan KPwDN (lanjutan)

elation Matrix*

is	Pert_Ekonomi	PAD	Dana_Perimbangan	Lain2_Pendapatan	Bj_Tdk_Lgsg	Bj_Lgsg	Jmlh_Industri	Jmlh_Penduduk	AHH	IPM	Pengeluaran_P_Kapita	AHH	Rata2_Lama_Sklh
13	-.458	.544	.789	.881	.798	.683	.574	-.316	.233	.161	.072	-.109	.089
16	-.361	.051	.201	.506	.284	-.140	-.041	-.303	.301	.036	-.280	.336	.050
19	-.067	.778	.474	.517	.381	.514	.174	.018	.001	.350	.318	.231	.437
17	-.028	.839	.501	.504	.430	.507	.124	.065	.015	.406	.381	.236	.484
18	-.366	.841	.706	.815	.719	.167	.263	.004	.350	.559	.259	.410	.624
17	-.432	.691	.790	.815	.840	.551	.197	.027	.394	.557	.324	.298	.518
19	-.049	.836	.472	.470	.378	.547	.098	.040	-.008	.379	.401	.204	.427
11	-.144	.821	.636	.518	.608	.339	.216	.315	.187	.530	.521	.158	.459
10	-.312	.485	.618	.640	.724	-.254	.377	.360	.463	.535	.331	.119	.416
2	1.000	-.165	-.735	-.516	-.635	-.151	-.090	.192	-.689	-.466	-.164	-.116	-.216
15	-.165	1.000	.608	.489	.571	.408	-.019	.060	.244	.545	.620	.004	.351
8	-.735	.608	1.000	.846	.957	.226	.406	-.164	.548	.556	.404	.028	.315
10	-.516	.489	.846	1.000	.899	.037	.476	-.316	.298	.299	.154	.156	.216
14	-.635	.571	.957	.899	1.000	.006	.431	-.154	.494	.493	.340	.041	.263
14	-.151	.408	.226	.037	.006	1.000	-.182	-.066	-.074	.360	.497	.199	.339
17	-.090	-.019	.406	.476	.431	-.182	1.000	.057	.162	-.007	-.121	-.232	-.024
10	.192	.060	-.164	-.316	-.154	-.066	.057	1.000	.129	.449	.340	.269	.512
13	-.689	.244	.548	.298	.494	-.074	.182	.129	1.000	.631	.162	.071	.304
15	-.466	.545	.556	.299	.483	.360	-.007	.449	.631	1.000	.752	.447	.825
11	-.164	.620	.404	.154	.340	.497	-.121	.340	.162	.752	1.000	.081	.481
9	-.116	.004	.028	.156	.041	.199	-.232	.269	.071	.447	.081	1.000	.744
6	-.216	.351	.315	.216	.263	.339	-.024	.512	.304	.825	.481	.744	1.000

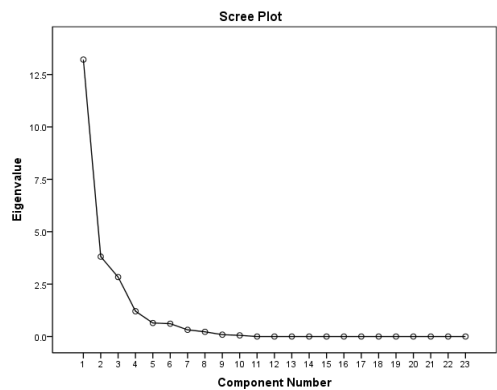
Lampiran 4. Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Tengah

4.1 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	13.211	57.438	57.438	13.211	57.438	57.438	12.970	56.390	56.390
2	3.808	16.556	73.994	3.808	16.556	73.994	4.049	17.604	73.994
3	2.835	12.326	86.320						
4	1.207	5.247	91.567						
5	.645	2.804	94.371						
6	.611	2.658	97.028						
7	.318	1.384	98.412						
8	.223	.968	99.380						
9	.088	.383	99.763						
10	.055	.237	100.000						
11	6.574E-16	2.858E-15	100.000						
12	3.329E-16	1.447E-15	100.000						
13	2.331E-16	1.014E-15	100.000						
14	1.315E-16	5.719E-16	100.000						
15	1.014E-16	4.409E-16	100.000						
16	6.139E-17	2.669E-16	100.000						
17	-6.922E-18	-3.009E-17	100.000						
18	-1.005E-16	-4.371E-16	100.000						
19	-1.748E-16	-7.600E-16	100.000						
20	-2.447E-16	-1.064E-15	100.000						
21	-2.610E-16	-1.135E-15	100.000						
22	-3.794E-16	-1.650E-15	100.000						
23	-7.128E-16	-3.099E-15	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

4.2 Scree Plot



4.3 Rotated Component Matrix

Rotated Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
PDRB_Listrik	.983	
Jmlh_ATM	.981	
PAD	.981	
PDRB_Kuangan	.967	
Jmlh_Penduduk	.963	
PDRB_Jasa	.951	
IPM	.947	
Rata2_Lama_Sklh	.881	
AHH	.879	
PDRB_Pengangkutan	.856	
PDRB_Industri	.853	
Lain2_Pendapatan	.849	
PDRB_Konstruksi	.753	
Blj_Lgsg	.714	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.586	
PDRB_Perdagangan	.534	
AMH		
Dana_Perimbangan		.894
Pert_Ekonomi		.759
Pnjpg_Jalan		.676
Blj_Tdk_Lgsg	.656	.671
PDRB_Pertanian		.616
PDRB_Pertambangan		

4.4 Matriks Korelasi

Correlation Matrix ^a											
		PDRB_Pertanian	PDRB_Pertambangan	PDRB_Industri	PDRB_Listrik	PDRB_Konstruksi	PDRB_Perdagangan	PDRB_Pengangkutan	PDRB_Keuangan	PDRB_Jasa	Pert_Ekonomi
Correlation	PDRB_Pertanian	1.000	-.179	.213	-.318	.331	.576	.265	-.210	-.107	.064
	PDRB_Pertambangan	-.179	1.000	-.052	.086	-.035	.000	-.047	.105	.062	.596
	PDRB_Industri	.213	-.052	1.000	.835	.837	.828	.971	.832	.849	.074
	PDRB_Listrik	-.318	.086	.835	1.000	.879	.486	.815	.955	.936	.687
	PDRB_Konstruksi	.331	-.035	.837	.879	1.000	.652	.887	.816	.758	.432
	PDRB_Perdagangan	.576	.000	.828	.486	.652	1.000	.850	.454	.625	-.061
	PDRB_Pengangkutan	.265	-.047	.971	.815	.887	.850	1.000	.836	.893	.101
	PDRB_Keuangan	-.210	.105	.832	.955	.816	.454	.836	1.000	.907	.316
	PDRB_Jasa	-.107	.062	.849	.936	.758	.625	.893	.907	1.000	.038
	Pert_Ekonomi	.064	.596	.074	.087	.432	-.061	.101	.316	.038	1.000
	PAD	-.282	.280	.810	.955	.737	.456	.906	.971	.906	.308
	Dana_Perimbangan	.401	-.576	.319	.109	.504	.381	.353	.292	-.155	.771
	Lain2_Pendapatan	-.265	.215	.566	.776	.882	.323	.873	.816	.846	.282
	Biji_Tdk_Lgsg	.284	.294	.664	.528	.830	.540	.724	.696	.583	.617
	Biji_Lgsg	-.292	.660	.476	.660	.461	.370	.516	.662	.647	.492
	Jmlh_Penduduk	-.331	.102	.819	.989	.607	.519	.802	.908	.932	-.006
	Prjg_Jalan	.218	.162	-.269	-.437	.056	-.300	-.279	-.208	-.489	.683
	AHH	.034	.190	.791	.820	.910	.535	.838	.911	.822	.487
	IPM	-.285	.335	.767	.963	.719	.406	.747	.922	.829	.382
	Pengeluaran_Pr_Kapita	-.092	.510	.544	.504	.451	.406	.516	.521	.515	.362
	AMH	-.615	.130	.222	.535	.089	-.218	.094	.460	.296	.056
	Rata2_Lama_Skh	-.580	.113	.594	.906	.446	.160	.559	.851	.759	.070
	Jmlh_ATM	-.337	.058	.817	.984	.670	.460	.811	.949	.920	.066

a. This matrix is not positive definite.

4.4 Matriks Korelasi (lanjutan)

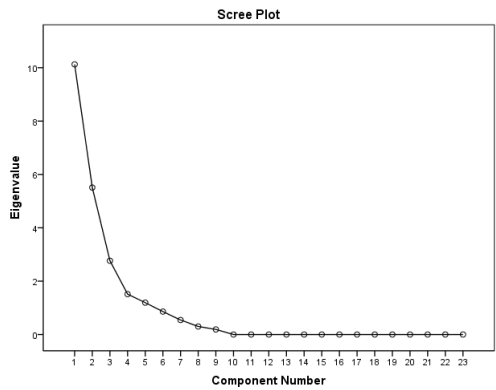
	Dana_Perimbangan	Lain2_Pendapatan	Biji_Tdk_Lgsg	Biji_Lgsg	Jmlh_Penduduk	Prjg_Jalan	AHH	IPM	Pengeluaran_Pr_Kapita	AMH	Rata2_Lama_Skh	Jmlh_ATM
1	.401	-.265	.284	-.292	-.331	.218	.034	-.285	-.092	-.615	-.580	-.337
2	.576	.215	.294	.660	.102	.162	.190	.335	.510	.130	.113	.058
3	.319	.566	.664	.476	.819	-.269	.791	.767	.544	.222	.594	.817
4	.109	.776	.528	.660	.989	-.437	.820	.903	.504	.535	.906	.984
5	.504	.682	.830	.461	.607	.056	.910	.719	.451	.089	.446	.670
6	.381	.323	.540	.370	.519	-.300	.535	.408	.406	-.218	.160	.460
7	.353	.873	.724	.516	.802	-.279	.838	.747	.516	.094	.559	.811
8	.292	.816	.696	.662	.908	-.208	.911	.922	.521	.460	.851	.949
9	.155	.846	.583	.647	.932	-.489	.822	.829	.515	.296	.759	.929
10	.771	.292	.617	.492	-.006	.683	.487	.362	.362	.055	.070	.066
11	.337	.842	.694	.758	.924	-.227	.862	.967	.672	.479	.867	.962
12	1.000	.302	.836	.519	.052	.465	.463	.362	.491	-.133	.025	.129
13	.302	1.000	.678	.726	.747	-.255	.806	.818	.523	.295	.734	.821
14	.836	.678	1.000	.563	.458	.205	.800	.701	.551	.070	.424	.570
15	.519	.726	.563	1.000	.669	-.106	.650	.737	.663	.181	.563	.643
16	.052	.747	.458	.669	1.000	-.521	.765	.865	.496	.497	.888	.971
17	.465	-.255	.205	-.106	-.521	1.000	-.075	-.133	.176	-.285	-.428	-.405
18	.463	.806	.800	.650	.765	-.075	1.000	.872	.469	.342	.684	.799
19	.382	.818	.701	.737	.865	-.133	.872	1.000	.724	.570	.850	.910
20	.491	.523	.551	.663	.496	.176	.469	.724	1.000	.126	.366	.544
21	-.133	.295	.070	.181	.497	-.285	.342	.570	.126	1.000	.758	.510
22	.025	.734	.424	.563	.888	-.428	.684	.850	.366	.758	1.000	.920
23	.129	.821	.570	.643	.971	-.405	.799	.910	.544	.510	.920	1.000

4.5 Total Variance Explained tanpa memasukkan KPwDN

Component	Total Variance Explained								
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	10.127	44.030	44.030	10.127	44.030	44.030	8.917	38.769	38.769
2	5.510	23.956	67.986	5.510	23.956	67.986	6.720	29.217	67.986
3	2.764	12.018	80.004						
4	1.513	6.578	86.581						
5	1.194	5.193	91.775						
6	.859	3.734	95.509						
7	.544	2.366	97.875						
8	.301	1.307	99.182						
9	.188	.818	100.000						
10	5.009E-16	2.178E-15	100.000						
11	3.740E-16	1.626E-15	100.000						
12	2.832E-16	1.231E-15	100.000						
13	2.242E-16	9.749E-16	100.000						
14	1.284E-16	5.581E-16	100.000						
15	5.802E-17	2.523E-16	100.000						
16	1.086E-17	4.721E-17	100.000						
17	-6.174E-17	-2.684E-16	100.000						
18	-1.466E-16	-6.373E-16	100.000						
19	-1.938E-16	-8.425E-16	100.000						
20	-3.591E-16	-1.561E-15	100.000						
21	-4.499E-16	-1.956E-15	100.000						
22	-5.474E-16	-2.380E-15	100.000						
23	-6.256E-16	-2.720E-15	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

4.6 Scree Plot tanpa memasukkan KPwDN



4.7 Rotated Component Matrix tanpa memasukkan KPwDN

Rotated Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
PAD	.955	
IPM	.901	
Pert_Ekonomi	.890	
Blj_Tdk_Lgsg	.865	
PDRB_Kewangan	.857	
Dana_Perimbangan	.823	
Pnjg_Jalan	.809	
AHH	.783	
PDRB_Listrik	.763	
PDRB_Konstruksi	.679	.624
Jmlh_ATM	.620	
Lain2_Pendapatan	.617	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.558	
Blj_Lgsg	.511	
PDRB_Pertambangan		
PDRB_Perdagangan		.934
PDRB_Pertanian		.933
PDRB_Pengangkutan		.923
Jmlh_Penduduk		.851
PDRB_Industri		.847
Rata2_Lama_Sklh		-.786
AMH		-.742
PDRB_Jasa		.722

4.8 Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN

Correlation Matrix ^a										
	PDRB_Pertanian	PDRB_Pertambangan	PDRB_Industri	PDRB_Listrik	PDRB_Konstruksi	PDRB_Perdagangan	PDRB_Pengangkutan	PDRB_Kewangan	PDRB_Jasa	Pert_Ekonomi
Correlation										
PDRB_Pertanian	1.000	-.152	.915	.494	.746	.920	.949	.363	.661	.074
PDRB_Pertambangan	-.152	1.000	-.223	-.135	-.121	-.096	-.203	.026	-.087	.598
PDRB_Industri	.915	-.223	1.000	.600	.746	.851	.925	.425	.494	.104
PDRB_Listrik	.494	-.135	.600	1.000	.893	.197	.606	.936	.473	.587
PDRB_Konstruksi	.746	-.121	.746	.893	1.000	.526	.839	.837	.666	.527
PDRB_Perdagangan	.920	-.096	.851	.197	.526	1.000	.870	.071	.560	-.077
PDRB_Pengangkutan	.949	-.203	.925	.606	.839	.870	1.000	.500	.730	.143
PDRB_Kewangan	.363	.026	.425	.936	.837	.071	.500	1.000	.410	.752
PDRB_Jasa	.661	-.087	.494	.473	.666	.560	.730	.410	1.000	.963
Pert_Ekonomi	.074	.598	.104	.587	.527	-.077	.143	.752	.963	1.000
PAD	.200	.443	.317	.733	.619	.064	.371	.811	.372	.794
Dana_Perimbangan	.452	.575	.469	.532	.595	.408	.503	.625	.292	.772
Lain2_Pendapatan	.031	.210	-.081	.371	.442	-.050	.219	.480	.596	.411
Blj_Tdk_Lgsg	.549	.278	.565	.727	.783	.417	.663	.788	.482	.684
Blj_Lgsg	-.058	.799	-.122	-.034	.105	.086	-.002	.169	.110	.649
Jmlh_Penduduk	.706	-.029	.801	-.102	.237	.859	.685	-.174	.541	-.296
Pnjg_Jalan	.033	.251	.262	.646	.520	-.081	.211	.745	-.059	.803
AHH	.541	.172	.468	.769	.879	.311	.603	.812	.469	.739
IPM	.099	.504	.246	.612	.508	-.002	.233	.625	.138	.758
Pengeluaran_Pr.Kapita	.110	.527	.304	.249	.234	.234	.260	.230	.212	.405
AMH	-.527	.088	-.412	-.032	-.347	-.637	-.612	-.109	-.616	.056
Rata2_Lama_Sklh	-.624	.845	-.634	.012	-.296	-.742	-.570	.086	-.504	.140
Jmlh_ATM	.146	-.191	-.306	.618	.496	.016	.401	.628	.376	.233

a. This matrix is not positive definite.

4.8 Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN

rix*

mi	PAD	Dana Pembangunan	Lain2 Pendapatan	Bil_Tdk_Lgsd	Bil_Lgsd	Jmlh Penduduk	Prjg_Jalan	AHH	IPM	Pengeluaran_ Pr_Kapita	AMH	Rasio2 Lama_Slth	Jmlh_ATM
74	.200	.452	.031	.549	-.058	.706	.033	.541	.099	.110	-.527	-.624	.146
98	.443	.575	.210	.278	.799	-.029	.251	.172	.504	.527	.088	.045	-.191
04	.317	.469	-.081	.565	-.122	.601	.262	.468	.246	.304	-.412	-.534	.306
87	.733	.532	.371	.727	-.034	-.102	.646	.769	.612	.249	-.032	.012	.618
27	.619	.595	.442	.783	.105	.237	.520	.879	.508	.234	-.347	-.296	.496
77	.064	.408	-.050	.417	.086	.859	-.081	.311	-.002	.234	-.637	-.742	.018
43	.371	.503	.219	.663	-.002	.685	.211	.603	.233	.260	-.612	-.570	.401
52	.611	.625	.480	.788	.189	-.174	.745	.812	.625	.230	-.109	.098	.628
63	.372	.292	.596	.462	.110	.541	-.059	.469	.138	.212	-.616	-.504	.376
00	.784	.772	.411	.684	.649	-.296	.803	.739	.758	.405	.056	.140	.233
94	1.000	.799	.591	.832	.497	-.085	.771	.636	.865	.693	-.082	.127	.680
72	.799	1.000	.409	.916	.659	.127	.567	.668	.705	.536	-.187	-.037	.382
11	.591	.409	1.000	.576	.455	-.064	.226	.543	.502	.280	-.203	.178	.594
64	.832	.916	.576	1.000	.425	.137	.567	.792	.706	.428	-.232	.034	.651
49	.497	.659	.455	.425	1.000	.041	.367	.291	.424	.524	-.290	-.155	-.047
96	-.085	.127	-.064	.137	.041	1.000	-.217	.047	-.170	.273	-.765	-.790	-.033
03	.771	.567	.226	.567	.367	-.217	1.000	.569	.743	.558	-.012	.105	.470
39	.636	.668	.543	.792	.291	.047	.569	1.000	.651	.179	-.135	-.055	.374
58	.865	.705	.502	.706	.424	-.170	.743	.651	1.000	.711	.234	.268	.543
05	.693	.536	.280	.428	.524	.273	.558	.179	.711	1.000	-.183	-.203	.382
56	-.082	-.187	-.203	-.232	-.290	-.765	-.012	-.135	.234	-.163	1.000	.766	-.101
40	.127	-.037	.178	.034	-.155	-.790	.105	-.055	.268	-.203	.766	1.000	.334
33	.680	.382	.594	.651	-.047	-.033	.470	.374	.543	.382	-.101	.334	1.000

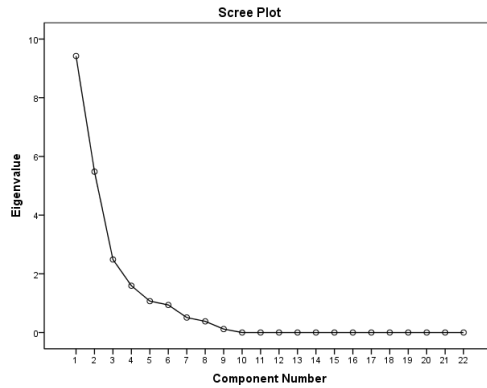
Lampiran 5. Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Tengah

5.1 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	9.422	42.829	42.829	9.422	42.829	42.829	9.215	41.888	41.888
2	5.482	24.917	67.746	5.482	24.917	67.746	5.689	25.859	67.746
3	2.488	11.309	79.055						
4	1.593	7.242	86.298						
5	1.069	4.859	91.157						
6	.938	4.264	95.421						
7	.510	2.319	97.740						
8	.380	1.727	99.467						
9	.117	.533	100.000						
10	4.814E-16	2.188E-15	100.000						
11	4.405E-16	2.002E-15	100.000						
12	3.191E-16	1.451E-15	100.000						
13	1.445E-16	6.570E-16	100.000						
14	7.829E-17	3.558E-16	100.000						
15	2.526E-17	1.148E-16	100.000						
16	9.724E-18	4.420E-17	100.000						
17	-4.994E-17	-2.270E-16	100.000						
18	-8.527E-17	-3.876E-16	100.000						
19	-2.506E-16	-1.139E-15	100.000						
20	-2.860E-16	-1.300E-15	100.000						
21	-3.752E-16	-1.705E-15	100.000						
22	-3.912E-16	-1.778E-15	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

5.2 Scree Plot



5.3 Rotated Component Matrix

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
IPM	.960	
Jmlh_Penduduk	.949	
Rata2_Lama_Sklh	.926	
PDRB_Listrik	.922	
PDRB_Kuangan	.916	
PDRB_Konstruksi	.855	
PDRB_Pengangkutan	.788	
PDRB_Perdagangan	.785	.545
AMH	.716	
PAD	.644	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.622	
PDRB_Jasa	.622	.575
AHH		
Dana_Perimbangan		.918
Pnjg_Jalan		.814
Blij_Tdk_Lgsg		.792
PDRB_Pertanian		.720
Lain2_Pendapatan		.693
PDRB_Pertambangan		.624
PDRB_Industri		.573
Blij_Lgsg		.511
Pert_Ekonomi		

5.4 Matriks Korelasi

Correlation

		PDRB_Pertanian	PDRB_Pertambahan	PDRB_Industri	PDRB_Listrik	PDRB_Konstruksi	PDRB_Perdagangan	PDRB_Pengangkutan	PDRB_Keluangan	PDRB_Jasa
Correlation	PDRB_Pertanian	1.000	.393	.284	-.074	-.341	.273	.018	.039	.041
	PDRB_Pertambahan	.393	1.000	.884	-.047	.018	.483	-.040	.147	.175
	PDRB_Industri	.284	.884	1.000	.386	.306	.774	.296	.557	.401
	PDRB_Listrik	-.074	-.047	.386	1.000	.626	.740	.864	.974	.527
	PDRB_Konstruksi	-.341	.018	.306	.626	1.000	.638	.569	.641	.697
	PDRB_Perdagangan	.273	.483	.774	.740	.638	1.000	.655	.864	.733
	PDRB_Pengangkutan	.018	-.040	.296	.864	.569	.655	1.000	.843	.416
	PDRB_Keluangan	.039	.147	.557	.974	.641	.864	.843	1.000	.636
	PDRB_Jasa	.041	.175	.401	.527	.697	.733	.416	.636	1.000
	Pert_Ekonomi	-.022	-.259	-.184	.214	-.139	-.069	.106	.101	-.466
	PAD	-.034	.047	.350	.714	.393	.426	.608	.687	.180
	Dana_Perimbangan	.532	.436	.448	.197	.207	.529	.263	.355	.707
	Lain2_Pendapatan	.292	.312	.423	.315	.519	.712	.186	.460	.909
	Bil_Tdk_Lgsg	.336	.307	.459	.484	.439	.723	.411	.616	.913
	Bil_Lgsg	.573	.387	.196	-.130	-.446	-.056	.058	-.067	-.173
	Jmlh_Penduduk	-.305	-.197	.225	.939	.720	.661	.804	.888	.531
	AHH	-.836	-.162	-.047	.315	.508	.049	.264	.245	.219
	IPM	-.371	.002	.346	.821	.865	.654	.692	.789	.490
	Pengeluaran_PrKapita	.370	.504	.693	.614	.351	.870	.471	.725	.517
	AMH	-.083	-.090	.175	.593	.761	.453	.606	.540	.216
	Rata2_Lama_Skth	-.457	-.201	.205	.829	.852	.535	.651	.761	.458
	Prjg_Jalan	.610	.201	.039	-.246	-.291	.065	-.067	-.120	.355

a. This matrix is not positive definite.

5.4 Matriks Korelasi (lanjutan)

relation Matrix*

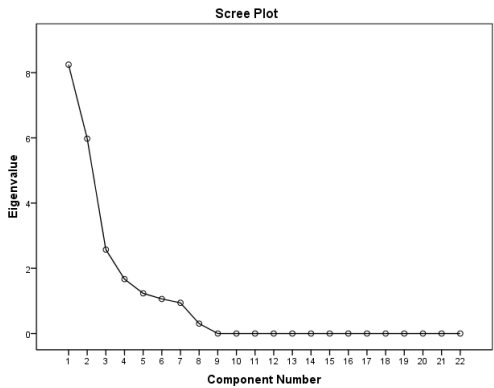
sa	Pert_Ekonomi	PAD	Dana_Perimbangan	Lain2_Pendapatan	Bil_Tdk_Lgsg	Bil_Lgsg	Jmlh_Penduduk	AHH	IPM	Pengeluaran_PrKapita	AMH	Rata2_Lama_Skth	Prjg_Jalan
341	-.022	-.034	.532	.292	.336	.573	-.305	-.836	-.371	.370	-.083	-.457	.610
175	-.259	.047	.436	.312	.307	.387	-.197	-.162	.002	.504	-.090	-.201	.201
401	-.184	.350	.448	.423	.459	.196	.225	-.047	.346	.693	.175	.205	.039
327	.214	.714	.197	.315	.484	-.130	.939	.315	.821	.614	.593	.829	-.246
397	-.139	.393	.207	.519	.439	-.446	.720	.508	.865	.351	.761	.852	-.291
733	-.069	.468	.529	.712	.723	-.056	.661	.049	.654	.870	.453	.535	.065
416	.106	.608	.283	.186	.411	.058	.804	.264	.692	.471	.606	.651	-.067
336	.101	.687	.355	.460	.616	-.067	.888	.245	.789	.725	.540	.761	-.120
300	-.466	.180	.707	.909	.913	-.173	.531	.219	.490	.517	.216	.458	.355
466	1.000	.473	-.536	-.388	-.377	.027	.289	.013	.224	.229	.228	.164	-.552
180	.473	1.000	.164	-.028	.240	.268	.634	.091	.552	.363	.520	.602	-.255
707	-.536	.164	1.000	.686	.876	.519	.038	-.272	-.036	.357	-.067	-.096	.814
309	-.388	-.028	.686	1.000	.881	-.149	.320	.003	.320	.635	.093	.216	.428
313	-.377	.240	.876	.881	1.000	.196	.405	.010	.303	.616	.043	.222	.583
173	.027	.268	.519	-.149	.196	1.000	-.343	-.414	-.403	.034	-.265	-.483	.860
531	.289	.634	.038	.320	.405	-.343	1.000	.522	.897	.561	.590	.889	-.377
219	.013	.091	-.272	.003	.010	-.414	.522	1.000	.623	.036	.167	.552	-.491
490	.224	.552	-.036	.320	.303	-.403	.897	.623	1.000	.539	.761	.939	-.548
517	.229	.363	.357	.635	.616	.034	.561	.036	.539	1.000	.230	.330	.011
216	.228	.520	-.067	.093	.043	-.265	.590	.167	.761	.230	1.000	.767	-.491
458	.184	.602	-.096	.216	.222	-.483	.889	.552	.939	.330	.767	1.000	-.577
355	-.552	-.255	.814	.428	.583	.560	-.377	-.491	-.548	.011	-.491	-.577	1.000

5.5 Total Variance Explained tanpa memasukkan KPwDN

Component	Total Variance Explained								
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	8.247	37.484	37.484	8.247	37.484	37.484	8.199	37.269	37.269
2	5.977	27.167	64.651	5.977	27.167	64.651	6.024	27.382	64.651
3	2.572	11.692	76.343						
4	1.667	7.578	83.921						
5	1.232	5.600	89.521						
6	1.060	4.820	94.341						
7	.941	4.277	98.618						
8	.304	1.382	100.000						
9	4.986E-16	2.266E-15	100.000						
10	3.658E-16	1.663E-15	100.000						
11	3.401E-16	1.546E-15	100.000						
12	1.515E-16	6.888E-16	100.000						
13	1.350E-16	6.137E-16	100.000						
14	7.005E-17	3.184E-16	100.000						
15	-1.604E-18	-7.293E-18	100.000						
16	-7.554E-17	-3.434E-16	100.000						
17	-1.487E-16	-6.759E-16	100.000						
18	-2.184E-16	-9.928E-16	100.000						
19	-2.564E-16	-1.166E-15	100.000						
20	-3.611E-16	-1.642E-15	100.000						
21	-4.161E-16	-1.891E-15	100.000						
22	-5.512E-16	-2.505E-15	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

5.6 Scree Plot tanpa memasukkan KPwDN



5.7 Rotated Component Matrix tanpa memasukkan KPwDN

Rotated Component Matrix ^a		
	Component	
	1	2
PDRB_Keuangan	.963	
PDRB_Perdagangan	.927	
Blj_Tdk_Lgsg	.874	
Lain2_Pendapatan	.865	
PDRB_Listrik	.849	.501
PDRB_Jasa	.830	
Dana_Perimbangan	.817	
PDRB_Industri	.732	
PDRB_Pertambangan	.718	
Pengeluaran_Pr.Kapita	.707	
Pert_Ekonomi	-.559	
PDRB_Pengangkutan		
Rata2_Lama_Sklh		.940
IPM		.912
Jmlh_Penduduk		.843
PDRB_Konstruksi		.808
Blj_Lgsg		-.750
AHH		.739
PDRB_Pertanian		-.727
Pnjg_Jalan	.549	-.658
AMH		.556
PAD		

5.8 Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN

		Correlation									
		PDRB Pertanian	PDRB Pertambangan	PDRB Industri	PDRB Listrik	PDRB Konstruksi	PDRB Perdagangan	PDRB Pengangkutan	PDRB Keuangan	PDRB_Jasa	f
Correlation	PDRB_Pertanian	1.000	.386	.316	.005	-.353	.412	.155	.287	.078	
	PDRB_Pertambangan	.386	1.000	.978	.847	.123	.766	.197	.811	.271	
	PDRB_Industri	.316	.978	1.000	.893	.206	.809	.139	.849	.332	
	PDRB_Listrik	.005	.847	.893	1.000	.781	.859	.338	.915	.747	
	PDRB_Konstruksi	-.353	.123	.206	.781	1.000	.477	.304	.523	.823	
	PDRB_Perdagangan	.412	.766	.809	.859	.477	1.000	.302	.963	.672	
	PDRB_Pengangkutan	.155	.197	.139	.338	.304	.302	1.000	.299	.148	
	PDRB_Keuangan	.287	.811	.849	.915	.523	.963	.299	1.000	.748	
	PDRB_Jasa	.078	.271	.332	.747	.823	.672	.148	.748	1.000	
	Pert_Ekonomi	.002	-.220	-.289	-.491	-.360	-.352	-.303	-.505	-.680	
	PAD	.032	.258	.238	-.064	.034	.014	-.037	.029	-.191	
	Dana_Perimbangan	.546	.465	.436	.461	.175	.591	.353	.664	.728	
	Lain2_Pendapatan	.312	.354	.395	.734	.503	.779	.061	.779	.929	
	Blj_Tdk_Lgsg	.398	.410	.401	.596	.305	.668	.160	.734	.897	
	Blj_Lgsg	.570	.378	.231	-.197	.463	.005	.260	.055	-.148	
	Jmlh_Penduduk	-.582	-.104	-.046	.540	.731	.291	.143	.280	.432	
	Pnjg_Jalan	.614	.164	.117	.077	-.188	.307	.305	.338	.524	
	AHH	-.849	-.123	-.127	.290	.448	-.158	.074	-.007	.126	
	IPM	-.473	.197	.230	.708	.847	.360	.174	.393	.308	
	Pengeluaran_Pr.Kapita	.484	.709	.676	.601	.114	.815	.054	.733	.390	
	AMH	-.050	.004	.037	.349	.669	.169	.320	.104	-.009	
	Rata2_Lama_Sklh	-.647	-.110	-.007	.481	.851	.089	-.045	.141	.246	

a. This matrix is not positive definite.

5.8 Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN

lation Matrix*

sa	Pert_Ekonomi	PAD	Dana_Perimbangan	Lain2_Pendapatan	Bij_Tek_Lgsg	Bij_Lgsg	Jmlh_Penduduk	Prjg_Jalan	AHH	IPM	Pengeluaran_P_Kabupa	AMH	Rata2_Lama_Sklh
76	.002	.032	.546	.312	.398	.570	-.582	.614	-.849	-.473	.464	-.050	-.647
71	-.220	.258	.465	.354	.410	.378	-.104	.164	-.123	.197	.709	.004	-.110
32	-.289	.238	.436	.395	.401	.231	-.046	.117	-.127	.230	.676	.037	-.007
47	-.491	-.064	.461	.734	.598	-.197	.540	.077	.290	.708	.601	.349	.481
23	-.360	.034	.175	.503	.305	-.463	.731	-.168	.448	.847	.114	.869	.851
72	-.352	.014	.591	.779	.668	.005	.281	.307	-.158	.360	.815	.169	.089
46	-.303	-.037	.353	.061	.169	.280	.143	.305	.074	.174	.054	.320	-.045
48	-.505	.029	.664	.779	.734	.055	.280	.338	-.007	.393	.733	.104	.141
30	-.680	-.191	.728	.929	.897	-.148	.432	.524	.126	.308	.390	-.009	.246
80	1.000	.383	-.803	-.475	-.565	.060	.020	-.513	-.075	-.008	.083	.074	-.099
91	.383	1.000	.120	-.244	-.072	.501	-.135	-.093	-.162	.008	-.043	.206	.057
28	-.603	.120	1.000	.681	.908	.535	-.162	.681	-.316	-.181	.353	-.155	-.301
29	-.475	-.244	.681	1.000	.894	-.134	.384	.503	-.049	.281	.845	-.009	.119
97	-.585	-.072	.908	.894	1.000	.256	.137	.771	-.105	.023	.525	.220	-.145
48	.060	.501	.635	-.134	.256	1.000	-.634	.557	-.405	-.501	.099	-.255	-.665
32	.020	-.135	-.162	-.384	.137	-.634	1.000	-.345	.710	.796	.229	.263	.677
24	-.513	-.093	.881	.503	.771	.557	-.345	1.000	-.452	-.546	.184	-.429	-.620
26	-.075	-.162	-.316	-.049	-.105	-.405	.710	-.452	1.000	.660	-.129	.026	.575
38	-.008	.008	-.181	.281	.023	-.501	.796	-.546	.660	1.000	.258	.633	.857
90	.083	-.043	.353	.645	.525	.099	.229	.184	-.129	.258	1.000	-.084	-.163
39	.074	.206	-.155	-.009	-.220	-.255	.263	-.429	.026	.633	-.084	1.000	.688
16	-.099	.057	-.301	.119	-.145	-.665	.677	-.620	.575	.857	-.163	.688	1.000

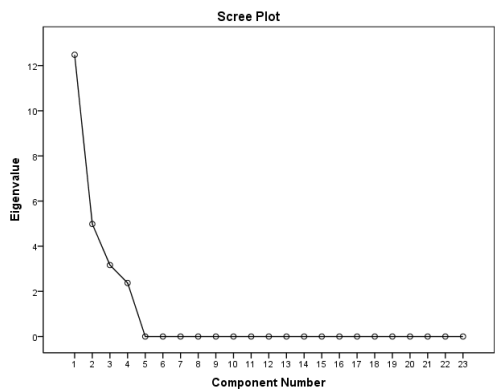
Lampiran 6. Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Barat

6.1 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	12.480	54.261	54.261	12.480	54.261	54.261	8.901	38.701	38.701
2	4.984	21.669	75.930	4.984	21.669	75.930	8.563	37.229	75.930
3	3.164	13.756	89.686						
4	2.372	10.314	100.000						
5	6.582E-16	2.862E-15	100.000						
6	4.606E-16	2.002E-15	100.000						
7	3.663E-16	1.593E-15	100.000						
8	3.072E-16	1.336E-15	100.000						
9	1.476E-16	6.419E-16	100.000						
10	1.219E-16	5.300E-16	100.000						
11	9.694E-17	4.215E-16	100.000						
12	7.259E-17	3.156E-16	100.000						
13	4.341E-17	1.887E-16	100.000						
14	3.873E-18	1.684E-17	100.000						
15	-1.276E-17	-5.549E-17	100.000						
16	-1.327E-16	-5.772E-16	100.000						
17	-1.507E-16	-6.554E-16	100.000						
18	-1.915E-16	-8.325E-16	100.000						
19	-3.208E-16	-1.395E-15	100.000						
20	-3.501E-16	-1.522E-15	100.000						
21	-4.101E-16	-1.783E-15	100.000						
22	-4.952E-16	-2.153E-15	100.000						
23	-5.655E-16	-2.459E-15	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

6.2 Scree Plot



6.3 Rotated Component Matrix

	Rotated Component Matrix ^a	
	Component	
	1	2
Bij_Lgsg	.981	
PDRB_Konstruksi	.971	
Jmlh_ATM	.919	
PDRB_Jasa	.915	
PDRB_Pertambangan	.910	
Pert_Ekonomi	.832	
PDRB_Pengangkutan	.814	
PAD	.783	.511
Dana_Perimbangan	.752	.559
PDRB_Keuangan	.672	.648
Pengeluaran_Pr.Kapita	-.598	.582
Rata2_Lama_Sklh		
Lain2_Pendapatan		.947
PDRB_Perdagangan		.935
Bij_Tdk_Lgsg		.900
PDRB_Listrik		.893
Jmlh_Penduduk		.881
PDRB_Pertanian		.832
Jmlh_Industri		.809
AHH		-.597
IPM		-.583
AMH		-.563
PDRB_Industri		-.557

6.4 Matriks Korelasi

Correlation Matrix ^a											
		PDRB_Pertanian	PDRB_Pertambangan	PDRB_Industri	PDRB_Listrik	PDRB_Konstruksi	PDRB_Pendagang	PDRB_Pengangkutan	PDRB_Keluarga	PDRB_Keluarga	PDRB_Jasa
Correlation	PDRB_Pertanian	1.000	.217	-.205	.893	.401	.965	.603	.690	.641	.527
	PDRB_Pertambangan	.217	1.000	-.304	.422	.931	.158	.816	.758	.874	.601
	PDRB_Industri	-.205	-.304	1.000	-.494	-.268	-.423	-.126	-.559	-.388	.407
	PDRB_Listrik	.893	.422	-.494	1.000	.464	.923	.741	.903	.719	.393
	PDRB_Konstruksi	.401	.931	-.268	.464	1.000	.324	.759	.727	.949	.687
	PDRB_Pendagang	.965	.158	-.423	.923	.324	1.000	.502	.706	.586	.307
	PDRB_Pengangkutan	.603	.816	-.126	.741	.759	.502	1.000	.883	.861	.787
	PDRB_Keluarga	.690	.758	-.559	.903	.727	.706	.883	1.000	.886	.479
	PDRB_Jasa	.641	.874	-.388	.719	.949	.586	.861	.886	1.000	.693
	Pert_Ekonomi	.527	.601	.407	.393	.687	.307	.787	.479	.693	1.000
	PAD	.609	.849	-.603	.793	.866	.625	.822	.957	.996	.481
	Dana_Pertambangan	.668	.772	-.629	.794	.854	.695	.737	.914	.948	.445
	Lain2_Pendapatan	.907	.301	-.528	.989	.370	.959	.633	.840	.641	.292
	Bij_Tdk_Lgsg	.831	.391	-.708	.941	.482	.922	.568	.856	.709	.193
	Bij_Lgsg	.313	.942	-.010	.386	.933	.175	.856	.675	.872	.827
	Jmlh_Industri	.934	-.029	-.231	.739	.238	.937	.295	.463	.459	.310
	Jmlh_Penduduk	.577	-.250	-.385	.698	-.300	.689	.199	.416	.010	-.183
	AHH	-.513	.089	-.093	-.598	.211	-.483	-.462	-.392	-.051	-.237
	IPM	-.919	-.106	-.185	-.664	-.348	-.801	-.504	-.441	-.526	-.683
	Pengeluaran_Pn_Kapita	.040	-.312	-.631	.316	.473	.259	.169	.168	-.273	-.686
	AHH	-.656	-.110	.480	-.496	.413	-.718	-.086	-.367	-.503	-.099
	Rate2_Lama_Skih	-.474	.101	-.207	-.078	-.266	-.386	.074	.080	-.252	-.362
	Jmlh_ATM	.657	.842	-.111	.709	.877	.539	.961	.853	.945	.857

a. This matrix is not positive definite.

6.4 Matriks Korelasi (lanjutan)

rix^a

i	PAD	Dana_Pertambangan	Lain2_Pendapatan	Bij_Tdk_Lgsg	Bij_Lgsg	Jmlh_Industri	Jmlh_Penduduk	AHH	IPM	Pengeluaran_Pn_Kapita	AHH	Rate2_Lama_Skih	Jmlh_ATM
7	.609	.668	.907	.831	.313	.934	.577	-.513	-.919	.040	-.656	-.474	.657
7	.849	.772	.301	.391	.942	-.029	-.250	.089	-.106	-.312	-.110	.101	.842
7	-.603	-.629	-.528	-.708	-.010	-.231	-.385	-.093	-.165	-.631	.480	-.207	-.111
7	.793	.794	.989	.941	.388	.739	.698	-.598	-.664	.316	-.496	-.078	.709
7	.866	.854	.370	.482	.933	.238	-.300	.211	-.348	-.473	-.413	-.266	.877
7	.625	.695	.959	.922	.175	.937	.689	-.483	-.801	.259	-.718	-.386	.539
7	.822	.737	.633	.568	.856	.295	.199	-.462	-.504	-.169	-.086	.074	.961
7	.957	.914	.840	.856	.675	.463	.416	-.392	-.441	.168	-.367	.080	.853
7	.956	.948	.641	.709	.872	.459	.010	-.051	-.526	-.273	-.503	-.252	.945
7	.481	.445	.292	.193	.827	.310	-.183	-.237	-.683	-.686	-.099	-.362	.857
1	1.000	.982	.729	.817	.755	.428	.184	-.111	-.385	.006	-.491	-.060	.858
3	.982	1.000	.752	.861	.689	.546	.179	-.032	-.458	-.015	-.646	-.218	.814
2	.729	.752	1.000	.958	.261	.800	.755	-.585	-.671	.385	-.563	-.129	.610
7	.817	.861	.958	1.000	.292	.769	.625	-.342	-.559	.373	-.700	-.176	.588
7	.755	.689	.261	.292	1.000	.062	-.324	.029	-.320	-.553	-.101	-.096	.914
3	.428	.546	.800	.769	.062	1.000	.524	-.310	-.881	.059	-.821	-.663	.405
7	.184	.179	.755	.625	-.324	.524	1.000	-.811	-.337	.788	-.143	.242	.048
7	-.111	-.032	-.585	-.342	.029	-.310	-.811	1.000	.416	-.438	-.250	-.341	-.269
3	-.385	-.458	-.671	-.559	-.320	-.881	-.337	.416	1.000	.282	.577	.674	-.605
3	.006	-.015	.385	.373	-.553	.059	.788	-.438	.282	1.000	.050	.573	-.350
9	-.491	-.646	-.563	-.700	-.101	-.821	-.143	-.250	.577	.050	1.000	.750	-.286
7	-.060	-.218	-.129	-.176	-.096	-.663	.242	-.341	.674	.573	.750	1.000	-.177
7	.858	.814	.610	.588	.914	.405	.048	-.269	-.605	-.350	-.286	-.177	1.000

6.5 Data Sulawesi Dalam Angka 2013

Provinsi	Kab/Kota	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
Gorontalo	Kab. Boalemo	454.84	7.84	41.69	5.36	83.76	115.95	49.04	107.54	248.56
	Kab. Gorontalo	832.49	34.3	188.42	11.41	226	272.78	306.88	378.06	1063.17
	Kab. Pohuwato	773.57	10.18	97.05	11.35	89.38	281.46	57.15	204.49	384.3
	Kab. Bone Bolango	492.64	8.01	134.6	3.84	68.46	128.61	43.15	134.81	203.44
	Kab. Gorontalo Utara	340.92	23.34	32	5.06	45.8	92.14	30.61	67.51	39.26
	Kota Gorontalo	97.14	15.35	166.92	42.89	380.73	553.6	359.16	345.05	659.9
	Kab. Bolaang Mongondow	1309.6	127.85	64.67	6.72	365.09	268.67	80.06	74.53	470.67
	Kab. Minahasa	1269.42	300.48	480.12	60.93	1215.8	966.22	535.17	362.92	873.97
	Kep. Sangihe	521.78	57.17	102.9	9.39	205.88	324.79	257.28	157.09	434.86
	Kep. Talaud	403.34	25.92	25.14	3.4	142.39	113.06	69.86	87.7	178.31
Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	1112.5	252.83	400.82	21.38	659.05	313.69	406.51	74.95	429.18
	Kab. Minahasa Utara	774.18	356.85	273.73	22.97	859.59	448.31	336.81	62.4	492.26
	Kab. Bolaang Mongondow Utara	338.97	74.25	28.67	1.96	144.05	80.42	17.38	25.8	366.62
	Kep. Siau Tagulandang Biaro	245.8	20.32	7.64	4.61	114.01	131.13	115.63	40.39	210.64
	Kab. Minahasa Tenggara	659.97	181.45	269.61	15.31	442.77	237.93	274.47	47.79	291.7
	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	257.15	62.17	10.42	1.13	52.46	69.05	31.14	10.98	192.28
	Kab. Bolaang Mongondow Timur	284.55	354.24	13.59	2.09	83.48	72.05	26.21	15.85	227.52
	Kota Manado	286.54	9.96	823.15	111.12	2598.8	5101.31	2959.13	1754.62	4130.09
	Kota Bitung	1008.25	24.42	1086.49	104.67	795.3	451.07	1310.57	373.25	376.15
	Kota Tomohon	251.91	105.69	116.9	15.83	509.98	284.85	133.8	36.89	362.96
Sulawesi Selatan	Kota Kotamobagu	103.66	32.66	20.23	4.16	232.34	198.25	60.23	179.96	603.85
	Kep. Selayar	749.32	9.76	43.09	6.06	236.9	194.19	151.7	44.59	580.28
	Kab. Bulukamba	2157.21	33.65	331.24	33.59	217.64	1018.66	166.61	361.36	1510.54
	Kab. Bantaeng	1312.19	31.47	82.03	22.54	246.31	396.18	96.31	188.26	575.58
	Kab. Jeneponto	1805.62	35.15	47.02	19.14	124.07	183.76	78.7	193.28	1064.88
	Kab. Takalar	1419.02	14.37	187.82	29	114.88	300.45	112.33	196.1	756.99
	Kab. Gowa	3096.01	66.01	238.16	121.28	222.69	1201.75	537.27	594.8	1754.81
	Kab. Sinjai	2012.8	17.11	61.49	8.74	217.4	495.49	123.86	229.12	1118.74
	Kab. Maros	1254.93	52.23	888.69	30.95	75.4	314.19	180.31	252.33	96935
	Kab. Pangkajene Kepulauan	1156.7	356.01	5123.94	20.67	239.91	366.15	215.22	258.32	1159.12
Sulawesi Tengah	Kab. Barru	835.16	37.25	63.83	21.83	237.93	233.44	96.33	178.75	798.61
	Kab. Bone	5430.07	84.86	784.25	89.61	1068.61	937.16	526.53	748.72	2119.06
	Kab. Soppeng	1628	21.89	265.34	37.11	241.59	601.6	216.93	278.88	963.64
	Kab. Wajo	3415.19	311.66	502.4	48.61	309.51	1919.1	415.29	463.75	1556.04
	Kab. Sidrap	2521.63	28.79	318.76	70.58	334.23	598.91	151.46	317.74	1300.25
	Kab. Pinrang	4376.73	77.2	339.29	56.46	336.37	1126.25	386.76	353.56	1208.92
	Kab. Enrekang	1628.48	18.95	102.53	14.33	149.93	314.94	69.1	136.53	881.81
	Kab. Luwu	2909.78	47.24	312.9	12.27	417.85	707.53	120.24	154.38	1102.52
	Kab. Tana Toraja	850.95	17.08	111.08	17.63	158.64	563.4	134.58	176.36	538.28
	Kab. Luwu Utara	2885.44	47.87	126.01	30.32	220.85	368.38	141.22	320.01	711.33
Sulawesi Tengah	Kab. Luwu Timur	1999.11	9289.76	253.13	33.39	74.9	220.57	160.57	214.39	544.03
	Kab. Toraja Utara	798.6	14.52	150.06	23.05	149.84	550.66	208.41	227.22	488.99
	Kota Makassar	321.39	1.42	10063.17	975.15	4621.58	17273.9	8984.44	7099.18	9462
	Kota Pare Pare	174.46	8.71	56.1	35.06	239.99	690.71	497.18	483.73	585.87
	Kota Palopo	488.68	4.45	104.81	56.6	331.03	728.42	287.39	483.96	598.32
	Kep. Banggai	604.15	8.57	63.37	3.68	25.67	375.21	90.05	49.87	158.28
	Kab. Banggai	3407.43	202	488.19	40.15	1287.55	688.37	597.32	488.49	881.45
	Kab. Morowali	785.69	1416.2	73.49	10.02	66.85	345.86	17.95	123.71	221.69
	Kab. Poso	1461.34	28.37	266.91	17.09	293.71	478.51	250.45	139.28	369.52
	Kab. Donggala	2206.68	412.49	223.92	14.5	526.75	779.08	409.7	119.35	1189.98
Sulawesi Tengah	Kab. Toli-toli	1863.81	53.48	272.48	18.68	261.32	440.4	294.23	194.47	693.12
	Kab. Buol	1088.05	19.37	150.11	13.87	200.27	215.53	85.56	75.35	196.57
	Kab. Parigi Moutong	4932.87	155.75	688.12	16.01	642.28	1597.64	705.92	81.58	740.84
	Kab. Tojo Una-Una	739.16	22.56	164.49	15.18	131.77	253.06	38.28	75.41	394
	Kab. Sigi	2504.43	128.49	136.49	11.45	306.77	597.38	234.42	95.83	771.43
	Kab. Banggai Laut	452.14	4.79	34.17	4.96	13.61	157.95	54.62	46.63	64.3
	Kab. Morowali Utara	1396.49	2161.31	66.93	9.02	54.57	277.34	16.29	58.73	175.41
	Kota Palu	196.19	385.85	1063.43	254.95	1245.64	1247.18	1180.1	1055.48	3099.44
	Kab. Buton	1109.67	463.44	137.55	14.97	114.58	499.96	67.19	135.95	379.27
	Kab. Muna	1234.44	86.08	154.98	18.37	280.33	856.4	136.47	201.66	619.92
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	1078.09	110.29	66.44	26.59	449.91	550.06	85.04	165.34	582.54
	Kab. Kolaka	1350.21	1912.25	1317.78	45.28	406.71	1449.93	327.89	381.82	514.32
	Kab. Konawe Selatan	1202.69	237.32	46.48	19.26	319.86	580.57	904.5	139.08	325.34
	Kab. Bombana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kab. Wakatobi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kab. Kolaka Utara	1529.42	58.05	11.48	11.26	193.94	643.86	79.45	89.32	197.44
	Kab. Buton Utara	565.9	11.01	68.45	7.91	153.95	167.38	29.89	48.84	169.66
	Kab. Konawe Utara	846.07	69.1	12.33	3.18	235.61	144.26	7.66	24.25	103.5
	Kab. Kolaka Timur	929.09	36.81	24.02	9.31	123.64	449.32	85.04	64.94	151.48
	Kep. Konawe	149.01	15.35	4.77	2.42	25.13	25.68	3.36	44.83	125.62
Sulawesi Barat	Kota Kendari	945.91	15.58	553.18	235.45	604.36	1569.08	1542.91	916.69	636.59
	Kota Bau-Bau	362.67	20.34	72.45	37.51	643.38	798.3	284.87	197.17	536.04
	Kab. Majene	877.4	18.85	56.98	17.56	97.79	217.34	62.66	176.73	323.25
	Kab. Polewali Mandar	2488.59	19.67	103.18	37.18	124.99	1143.95	84.06	244.83	831.07
	Kab. Mamasa	835.19	10.2	73.23	5.32	111.06	185.82	25.11	95.86	349.16
	Kab. Mamuju	1487.44	64.02	58.78	25.15	169.46	449.53	106.78	273.96	1179.76
Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Utara	1047.46	14.19	913.21	5.61	109.35	50.14	61.09	92.7	349.57
	Kab. Mamuju Tengah	926.29	16.77	66.36	4.97	76.13	79.62	17.07	51.03	119.4

X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25		
T11	16.079	-38.117	37.187	37.585	37.771	117.500	596	8.1	8.87	17	68.6	69.76	61.125	95.83	6.6	1	
T12	-1.321	591.825	119.758	-61.105	165.663	117.500	1299	17.1	10.00	0.6	69.57	71.105	63.002	95.50	6.9	20	
T13	-1.961	-91.951	38.097	299.701	188.571	117.500	1259	1.1	786.0	68.17	71.113	63.672	97.09	7.0	6	1	
T14	15.867	-16.078	86.033	397.977	263.136	117.500	1281	7.9	567.85	69.18	71.3	61.07	98.87	7.86	1	1	
T15	13.847	77.189	21.81	189.765	30.787	117.500	1221	5.1	239.12	67.17	70.58	63.808	96.67	8.67	*	*	
T16	13.179	-71.719	71.377	-17.107	103.829	117.500	1265	19.17	106.55	67.50	71.1	61.658	99.67	10.18	18	1	
T17	16.161	51.555	57.706	78.951	121.851	150.000	79	7	15.56	73.06	73.33	63.858	98.17	7.18	**	**	
T18	38.019	615.109	111.111	-57.166	231.161	150.000	566	36.9	119.193	71.8	77.06	63.556	99.9	9.55	20	1	
T19	2.725	510.996	-0.199	779.991	210.719	150.000	113	21.6	10.79	71.55	76.79	67.1	98.78	7.76	15	1	
T20	7.800	510.281	78.713	109.075	285.139	150.000	511	8	110.331	73.57	76.7	67.57	99.6	8.83	1	1	
T21	11.915	501.755	81.509	770.738	218.016	150.000	85	17.5	160.91	73.76	75.83	63.705	99.87	8.1	12	1	
T22	22.710	-7.001	68.679	119.017	30.719	150.000	197	19.9	118.17	71.09	77.31	67.17	99.79	9.33	15	1	
T23	8.16	7.0905	27.919	171.661	238.506	150.000	51	77	93.11	70.3	71.9	61.008	98.68	7	**	**	
T24	12.185	1.1199	26.161	231.871	211.966	150.000	140	29.6	0	69	70.56	67.919	99.83	8.65	1	1	
T25	5.160	-1.756	-1.766	217.07	30.579	150.000	167	1	-5.609	70.1	71.79	63.17	99.56	8.1	1	1	
T26	5.510	717.819	12.113	156.909	198.601	150.000	-15	71	167.186	71.7	73.37	60.76	99.9	7.13			
T27	10.000	106.999	17.78	110.121	30.335	150.000	70	71	71.17	71.51	71.75	63.335	99.59	7.15			
T28	181.831	755.831	62.96	577.275	-21.166	150.000	107	35.1	-2.118	73.96	79.1	65.841	99.91	10.92	+2.1		
T29	-0.851	-86.105	-9.968	187.11	29.938	150.000	-29	60.0	-1.096	70.9	76.66	66.671	99.91	9.77	63		
T30	12.501	79.675	9.236	201.501	218.236	150.000	183	6.6	32.070	71.17	73.83	61.59	99.88	10.1	3	1	
T31	10.701	160.511	7.69	202.111	218.78	150.000	55	32.11	11.671	73.17	77.05	67.919	99.68	9.55	25	1	
T32	21.261	531.105	57.683	399.956	713.929	150.000	106	7.9	68.08	71.1	61.651	91.76	73.6	9	1	1	
T33	17.297	688.597	116.107	5.179	110.13	150.000	7	18.9	73.63	71.31	61.17	88.21	71.17	7.17	1	1	
T34	2.559	-67.881	99.517	108.709	10.79	150.000	-56	6.11	70.59	73.33	63.377	81.1	6.8	30	1	1	
T35	11.66	5.969	8.585	335.803	127.21	150.000	-19	15.1	65	66.33	60.1	78.92	63.7	19			
T36	71.66	5.717	88.761	3.581	268.17	150.000	-53	8.86	70.1	70.77	60.33	88.49	70.1	19			
T37	80.129	760.010	15.955	619.016	-19.186	150.000	786	36.80	72.0	71.13	61.675	87.11	71.17	6			
T38	21.219	5.7819	71.965	-0.77	216.779	150.000	35	-1.35	73.83	71.50	61.92	88.11	7.1	3			
T39	108.67	6.159	187.37	503.7	-2.87	150.000	216	7.1	71.55	71.8	67.17	85.53	73.17	3			
T40	82.511	683.596	101.717	-98.07	183.78	150.000	789	8.7	69.16	71.36	61.88	90.31	73.3	11			
T41	17.278	-85.135	8.6710	787.113	12.166	150.000	-13	9.9	69.53	72.66	61.17	88.21	78.9	19			
T42	8.035	1.011733	338.853	917.38	11.11	150.000	160	38.78	70.56	73.08	62.58	85.0	67.17	57			
T43	22.15	603.105	75.151	3.5295	27.556	150.000	169	9.0	71.91	71.91	61.678	78.7	7.17	3			
T44	60.527	781.158	159.361	618.988	19.739	150.000	161	15.91	72.11	72.55	67.99	85.63	6.98	6			
T45	19.998	5.79	108.755	111.09	715.967	150.000	176	10.0	71.78	70.05	67.32	90.25	7.17	51			
T46	15.017	663.799	107.83	506.115	298.853	150.000	191	8.61	73.81	71.87	62.86	91.99	78.9	19			
T47	20.67	231.51	99.557	775.129	256.017	150.000	108	11.1	75.66	75.67	61.736	91.15	8.19	19			
T48	25.1	617.65	95.857	8.188	28.806	150.000	117	15.73	70.68	75.11	61.85	91.83	7.79	51			
T49	12.955	521.956	108.019	78.6089	269.006	150.000	105	15.69	70.8	71.76	62.333	90.1	8.26	39			
T50	-7.817	606.18	81.826	382.856	761.502	150.000	-0	38.17	72.01	75.16	62.337	91.1	7.51	39			
T51	55.129	517.665	17.611	750.909	-80.163	150.000	76	25.1	71.29	71.96	61.657	91.87	8.21	1			
T52	18.888	510.775	90.255	717.91	10.31	150.000	190	0	71.66	71.69	61.8	88.78	7.88	1			
T53	525.851	1.18.078	270.071	917.977	117.86	150.000	776	16.2	70.78	80.17	62.08	97.87	10.9	1516			
T54	8.979	-58.233	9.218	155.09	281.91	150.000	1520	129	75.0	79.03	68.8	87.16	9.91	77			
T55	10.32	-69.053	61.553	119.69	318.35	150.000	613	11	72.91	71.77	61.79	97.5	10.19	5			
T56	12.861	5.0656	-1.0	396.098	79.679	990.00	-25	17.17	69.85	69.13	61.858	95.11	7.96	9			
T57	-7.975	8.11647	86.715	607.119	155.819	990.00	15	35.11	69.81	73.75	61.37	96.05	8.65	1			
T58	16.67	782.169	5.86	-1.9727	-2.6833	990.00	76	16.60	65.95	73.27	61.88	97.5	8.83	6			
T59	29.581	688.03	69.961	-83.168	107.106	990.00	13	11.40	65.95	71.54	62.903	97.58	8.28	6			
T60	17.955	610.817	108.909	-23.607	175.16	990.00	67	10.15	66.29	71.3	60.333	97.75	7.67	11			
T61	10.67	579.719	-7.1	177.91	275.97	990.00	5	12.75	69.83	70.2	67.057	95.76	8.09	16			
T62	15.07	-72.053	7.13	268.567	253.279	990.00	15	11.95	65.95	71.07	62.186	98.78	7.18	10			
T63	20.107	700.283	18.638	-17.6	717.1	990.00	87	10.15	66.03	70.17	67.1	9.85	7.19	8			
T64	19.883	519.19	12.016	359.16	713.909	990.00	25	10.1	60.1	66.23	70	63.810	97.58	7.9	5		
T65	12.111	581.139	59.326	760.503	106.005	990.00	-7	61.1	66	68.96	60.107	96.59	8.09	1			
T66	0	0	0	0	0	990.00	93	0	67.17	68.61	61.030	97.07	8.08	30			
T67	0	0	0	0	0	990.00	11	0	69.6	71.3	60.911	95.3	8.29	0			
T68	117.719	60.653	153.889	56.111	-70.35	990.00	903	8.3	70.73	77.88	68.2	99.17	11.07	35.3			
T69	21.688	6.03831	91.719	-87.91	-0.788	1123.07	1	98	9.231	69.78	70.15	67.41	8.665	7.17	1		
T70	2.7308	761.29	13.136	57.15	159.108	1123.07	30	97	110.673	66.66	68.97	63.63	8.87	71	25	9	
T71	16.666	707.6	12.117	50.787	158.19	1123.07	1	79	89.211	68.73	71.67	61.908	97.71	8.9	*	*	
T72	7.86	771.917	115.29	208.371	188.14	1123.07	-77	7.1	67.7	72.19	60.237	97.1	8.38	15			
T73	2.06	683.21	60.831	766.11	-0.6817	1123.07	5	63	102.10	68.2	70.7	63.0	9.15	7.69	1		
T74	10.759	-5.31	11.292	337.71	388.968	1123.07	3	-9	67.21	68.52	69.67	61.89	91.7	7.57	7		
T75	19.083	-7.7	38.669	309.50	285.7	1123.07	6	33.1	183.88	68.6	69.77	60.576	91.07	8.07	1		
T76	17.559	-69.588	78.001	3.151	117.967	1123.07	1	78	-96.07	66.11	70.65	67.37	99.7	7.83	1		
T77	6.091	-0.901	119.18	119.126	1123.07	0	29	-1.3	69.12	70.1	61.6	89.16	91.7	7.18	10		
T78	6.6597	-9.037	20.613	170.677	198.95	1123.07	0	11	117.76	67.91	70.66	61.32	99.07	8.1			
T79	0	0	0	0	0	1123.07	0	38	189.6	67.51	68.59	61.891	93.6	8.98			
T80	0	0	0	0	0	1123.07	0	11	0	69.81	66.0	60.79	99.99	8.66			
T81	8.7555	6.1056	101.091	573.113	7.9715	1123.07	37	1063	189.6	67.03	67.17	98.09	11.1	14.6			
T82	21.6	-85.863	106.41	75.7378	379.917	1123.07	7	-76	189.8	71.19	75.1	63.16	95.71	9.97	1		
T83	18.389	5.11887	-9.99	738.89	350.735	11650.00	310	168	69.15	66.11	71.16	63.9	96.57	8.51	13		
T84	10.519	669.169	100.149	510.106	293.173	11650.00	1563	30	65.63	69.17	69.6	87.6	7.08	13			
T85	-1.97	571.515	36.673	703.033	21.3	11650.00	591	51	71.8	72.56	67.965	89.17	7.19	*	*		
T86	1.18	77.17	61.123	-11.667	-2.886	11650.00	585	50	69.08	71.18	67.37	91.3	7.38	15			
T87	8.371	-78.76															

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BIODATA PENULIS



Fakhrol Azizi Indillah lahir di Surabaya pada tanggal 16 Mei 1993. Penulis yang memiliki hobi bermain game dan membaca buku ini merupakan putri pertama dari Muhammad Fauzi dan Budi-yanti. Sebelumnya, penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN Tut Wuri Handayani Surabaya, SMPN 1 Sukodono dan SMA Muham-madiyah 2 Ssidoarjo.

Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan menuju jenjang perguruan tinggi di jurusan Statistika ITS melalui jalur masuk SNMPTN tulis pada tahun 2011. Pada tahun kedua sebagai mahasiswa di Statistika ITS Penulis aktif berorganisasi sebagai Staf SOSMAS HIMASTA ITS periode 2012-2013. Penulis juga aktif sebagai *Organizing Comitte* Gerigi periode 2012-2013.

Untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai tugas akhir, hubungi penulis melalui:

Email: azizi.fakhrul@live.com